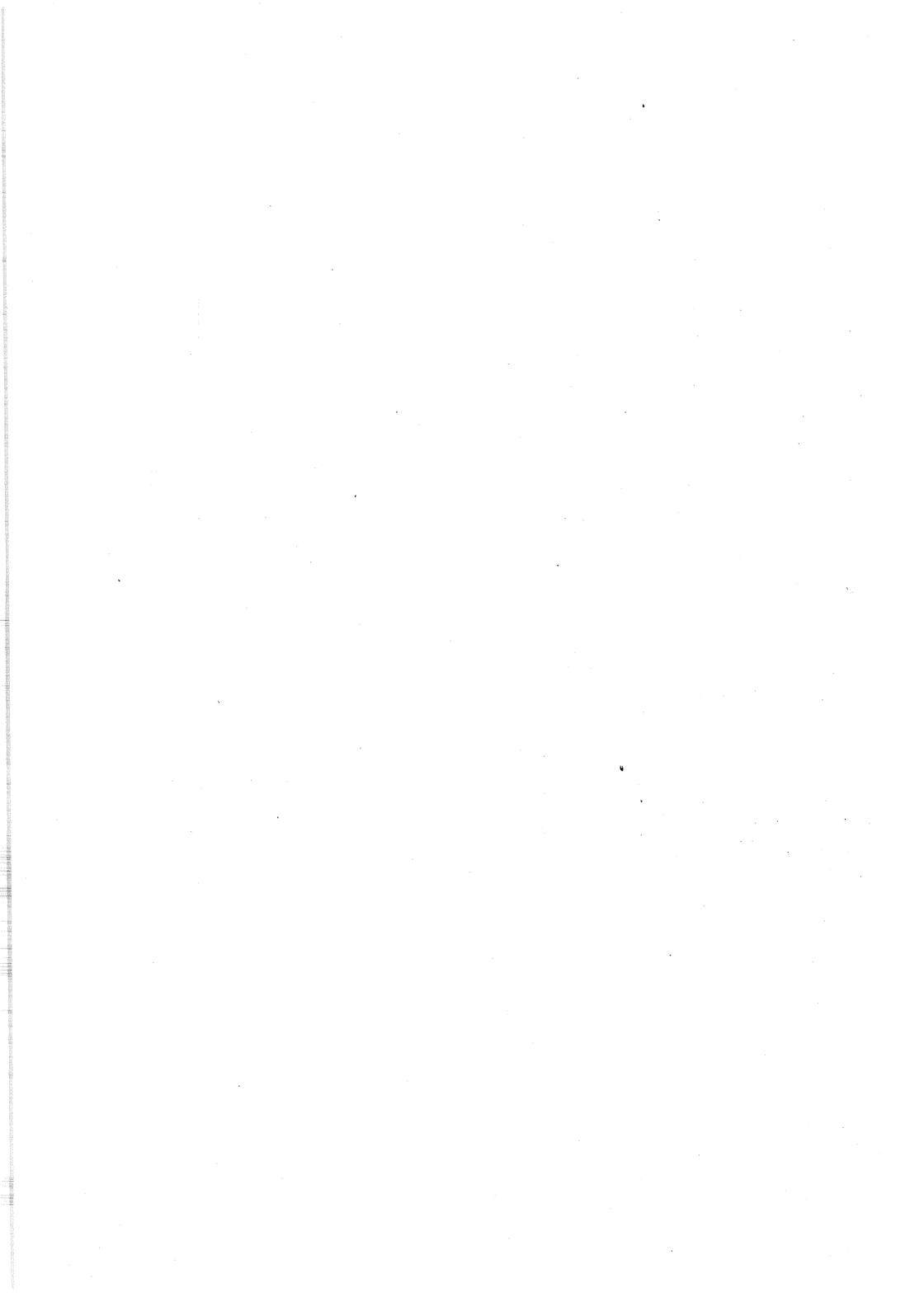


**CYBER DEMOKRASI
WACANA EMANSIPATORIS
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2009**



**CYBER DEMOKRASI
WACANA EMANSIPATORIS
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2009**

Oleh :
Nina Widyawati
Widjajanti M. Santoso
Katubi
Sutamat Arybowo

Editor :
Nina Widyawati



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

© 2011 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cyber Demokrasi Wacana Emansipatoris dalam Pemilihan
Presiden 2009/Nina Widyawati, Widjajanti M. Santoso,
Katubi, Sutamat Arybowo— Jakarta, 2011.

iv hlm +146 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-602-221-141-9

1. Pemilu
2. Cyberdemokrasi

324

Diterbitkan atas kerjasama:
PMB-LIPI dengan PT. Gading Inti Prima

Penerbit:

PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)

Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No. 7

Kelapa Gading

Jakarta 14250

Telp: (021) 4508142



*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232
Faks.: 021-5701232

KATA PENGANTAR

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian tahun 2009 yang berjudul "Cyberdemokrasi, Perkembangan Kontemporer Demokrasi di Indonesia : Kasus Pemilihan Umum 2009" yang dibiayai oleh Program Insentif Peneliti dan Perekayasa tahun anggaran 2009. Penelitian tahun 2009 merupakan penelitian yang sifatnya eksploratori, mengingat tema-tema yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu masalah *cyberpolitics* maupun *cybersociety* belum banyak dilakukan di Indonesia sehingga referensi tentang kasus Indonesia masih kurang. Fokus penelitian tahun 2009 adalah identifikasi permasalahan yang dibagi dalam 2 hal yaitu identifikasi sumber dan identifikasi konten. Pada tahun 2010 fokusnya pada konten, artinya penelitian ini berbicara tentang analisis wacana yang berkembang di situs resmi partai, situs resmi presiden/wakil presiden serta *facebook* yang membicarakan masalah pemilihan presiden 2009.

Alasan pemilihan topik adalah pada pemilihan presiden kali ini pola komunikasi antara kandidat dengan konstituen berubah. Kini kandidat tidak hanya melakukan komunikasi melalui media lama saja (pidato di lapangan terbuka, melalui radio, televisi atau melalui surat kabar), kandidat juga melakukan dialog dengan konstituennya melalui dunia maya baik melalui ruang interaktif yang disediakan dalam situs resmi partai maupun situs resmi capres/cawapres ataupun melalui jejaring sosial *facebook*. Perubahan pola komunikasi ini tidak bisa dihindari mengingat perkembangan media baru juga diikuti oleh berkembangnya komunitas baru seperti *facebookers* yang cukup berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat. Perkembangan komunitas baru ini di satu pihak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik, di satu pihak dapat mengurangi makna demokrasi karena adanya pihak yang merasa dirugikan oleh intrik

politik sebagaimana yang dialami oleh capres Megawati. Namun karena regulasi dalam ciberdemokrasi masih rendah maka kasus ini tidak bisa diteruskan ke pengadilan.

Penelitian ini melihat bagaimana wacana yang berkembang dalam situs resmi partai atau capres/cawapres serta situs yang berkembang dalam masyarakat yaitu *facebook* dengan menggunakan analisis wacana kritis model Sara Mills. Studi ini juga dilengkapi dengan studi kasus untuk melihat pengetahuan masyarakat tentang e-demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan praktis maupun sumbangan akademis terhadap perkembangan cyberdemokrasi di Indonesia. Dengan mengetahui wacana yang berkembang dalam situs tersebut diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan kepada pemerintah dalam menyusun regulasi di bidang e-demokrasi.

Penelitian ini merupakan salah satu kegiatan penelitian Program Insentif Peneliti dan Perekayasa yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI). Kami menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dalam hal ini teman-teman pengajar serta mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Padjajaran dan para peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta berbagai pihak lainnya yang telah menjadi nara sumber penelitian ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Haryatmoko yang telah memberikan masukan pada seminar *research design* serta Dr. Daniel Dhakidae yang telah memberikan masukan pada seminar laporan akhir. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Haryati, M.Si, dan teman-teman yang hadir dalam seminar *research design* dan laporan akhir, masukannya sangat berharga untuk memperbaiki laporan ini. Tim mengucapkan terima kasih atas semua informasi yang diberikan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran penelitian ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, kami mengharap kritik masukan dari pembaca untuk

perbaikan pada tugas kami berikutnya. Akhir kata kami ucapkan selamat membaca.

Jakarta, Desember 2010

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan – LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... v

BAB I
PENDAHULUAN1

BAB II
ANALISIS WACANA KRITIS DALAM
POLITIK INFORMASIONAL8

2.1	Masyarakat Jaringan dan Politik Informasional	8
2.2	Wacana	10
2.2.1	Wacana dan Ideologi	11
2.2.1.1	Ideologi dan Kebenaran	12
2.2.1.2	Subjek	12
2.2.1.3	Determinan Wacana	13
2.2.2	Bahasa, Wacana, dan Ideologi	14
2.2.3	Struktur Diskursif	15
2.2.3.1	<i>Episteme</i>	17
2.2.3.2	Pernyataan (<i>The Statement</i>)	18
2.2.3.3	Wacana	19
2.2.3.4	Arsip	20
2.2.4	Eksklusi dalam Wacana	21
2.3	Media dan Rusaknya Ruang Publik	22
2.4	Mayarakat Virtual dan Internet	25
2.5	Analisis Wacana Kritis dan Hubungan Kekuasaan	26

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN29

3.1	Wacana Kelas Sosial dalam Dunia Maya pada Pilpres Indonesia Tahun 2009	29
-----	---------------------------------------------------------------------------------	----

3.1.1	Pengantar	29
3.1.2	Kelas Sosial: Masalah dalam Pendefinisian	30
3.1.3	BLT, Kemiskinan, dan Masyarakat Kelas Bawah	33
	3.1.3.1 Teks Iklan PDIP	34
	3.1.3.2 Teks Iklan Golkar	38
3.1.4	Desa vs Kota	42
	3.1.4.1 Teks Iklan PAN	43
3.1.5	Petani dan Wong Cilik VS Kelas Menengah ke Atas	46
	3.1.5.1 Teks Iklan Partai Demokrat	47
	3.1.5.2 Teks Iklan Golkar 1	51
3.1.6	Tingkat Pendidikan	52
	3.1.6.1 Teks Iklan Golkar 2	53
3.1.7	Penutup	56
3.2	Identitas Entis, Agama Dan Dukungan Kelompok Tertentu?	57
	3.2.1 Pengantar	57
	3.2.2 Hegemoni Jawa dan Terhadap Non-Jawa	59
	3.2.3 Identitas Agama untuk Mencari Dukungan atau Penolakan	64
	3.2.4 <i>Identity or Denigrate?</i>	68
	3.2.5 Penutup	70
3.3	<i>Say No To</i> Kandidat Presiden 2009 (Analisis Gender)	71
	3.3.1 Pengantar	71
	3.3.2 Sebutan	78
	3.3.3 Kemiskinan	79
	3.3.4 Demokrasi	81
	3.3.5 Generasi	92
	3.3.6 Pandangan terhadap Pemimpin	94
	3.3.7 Pemimpin Perempuan	96
	3.3.8 Perpecahan dan Kesatuan	106
	3.3.9 Sikap Terhadap Kepemimpinan Mega	107
	3.3.10 Tentang SNTM dan FB	113
	3.3.11 Analisis Gender	126

BAB IV

PANDANGAN *FACEBOOKERS* TERHADAP DEMOKRATISASI MELALUI INTERNET 133

4.1	Perkembangan Demokrasi Melalui Internet di Indonesia	133
4.2	Pola Penggunaan Media Baru untuk Politik dan Demokrasi	138

BAB V	
PENUTUP	141
DAFTAR PUSTAKA	145

BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian pertama pada tahun 2009, yang berjudul "Cyber Demokrasi: Perkembangan Kontemporer Demokrasi di Indonesia (Kasus Pemilu 2009)". Dalam penelitian tersebut dilakukan identifikasi sumber dan identifikasi konten. Namun, karena penelitiannya bersifat eksploratif, identifikasi konten yang dilakukan pada tahun pertama hanya jenis informasi yang terdapat dalam situs. Pada tahun ini dilanjutkan dengan kajian akademis tentang wacana kekuasaan yang berkembang dalam situs tersebut. Karena sifat mediana yang interaktif, asumsi penelitian ini adalah wacana kekuasaan yang disajikan dalam situs tersebut lebih egaliter dibanding yang terdapat dalam media konvensional. Oleh karena itu, subjudul penelitian yang dipilih adalah wacana emansipatoris dalam pilpres 2009.

Hasil penelitian tahun 2009 menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (selanjutnya disingkat TIK), sebagai media baru memiliki kelebihan dibanding media lain. Media baru memiliki fasilitas yang menyertainya, yaitu adanya elemen partisipasi masyarakat di dalam mengekspresikan pemikiran dan pemaknaan mereka terhadap politik. Meskipun perkembangan isu ini masih dianggap baru dan dilihat sebagai sebuah perkembangan yang masih dini, kelengkapan untuk melihat dan mengamati apa yang dipikirkan oleh masyarakat merupakan sumbangan yang penting bagi dunia akademis maupun praktis. TIK memang memiliki kekurangan, di antaranya adalah masih rendahnya tingkat regulasi sehingga dapat memunculkan kejahatan politik jenis baru yang dilakukan melalui internet yang belum bisa diselesaikan secara hukum. Pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2009 lalu, calon presiden Megawati adalah pihak yang merasa dirugikan oleh situs jejaring sosial *facebook* (FB) "Say No To Megawati." Megawati mengadu pada badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) bahwa

wacana yang dikembangkan dalam kelompok tersebut sangat merugikan dirinya. Namun, nampaknya regulasi ke arah sana belum ada. Oleh karena itu, kasusnya hanya disimpan di bawah meja. Selain itu, media baru memiliki kontrol politik dan teknis yang rendah sehingga dapat saja digunakan untuk melakukan tindak subversif dan intrik politik sebagaimana terjadi pada situs “*Say No To Megawati*”. Dalam kasus “*Say No To Megawati*,” yang bisa dilakukan hanyalah menghapus diskusi interaktif tersebut dan muncul situs baru “*Say No To Megawati (clear)*” yang isinya lebih sopan.

Fokus dialog dalam ruang maya melibatkan institusi politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun aktor politik sebagai contoh: ”si Legislator itu otaknya cuma kriminal doang dan bagaimana caranya menghalalkan penjarahan duit lewat kesempatan di politik”. Sementara itu, *blogger* lain menjawab dengan kata-kata puitis tentang pengalamannya di dalam menghayati politik Indonesia.

“....Dulu dalam fahamku, kau ku pilih karena kau orang yang tepat di posisimu, kau pengelola manajemen dasyat dari segala kehebatan negeriku. Maka itu ku serahkan tanpa syarat semua kepadamu. Dengan maksud kita bersama-sama menyeberangi tepian bahagia menjadi bangsa bermartabat. Tapi kini, rencana janjimu adalah angin lalu, semua ucapan manis mu kau buang di ngarai hampa. Ketahuilah semua kepalsuan yang kau ucapkan, aku tak percaya lagi!! Aku tidak ingin bersama mu di Pemilu 2009 mendatang“.

Itulah sedikit cuplikan dari dialog yang berkembang dalam dunia maya mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi 20 tahun yang lalu ketika dialog politik masyarakat hanya bisa diakomodasi melalui media lama, yaitu radio, tv, dan koran/majalah. Dalam media lama wacana emansipatoris tidak mungkin dilakukan karena adanya mekanisme kontrol dalam bentuk *gate keeping*. Dalam media baru hal ini sangat mungkin dilakukan karena media baru memiliki sifat interkoneksi yang dapat diakses oleh pengirim atau penerima yang bersifat individual, interaktif, mudah digandakan, dan

terbuka. Media baru juga membentuk kekuatan yang seimbang antara media dan *audience* sehingga ada kesetaraan di antara keduanya.

Berkembangnya media baru diikuti oleh berkembangnya komunitas baru yang disebut *netter*, yaitu komunitas yang menggunakan dan mengembangkan *blog*, *facebook*, dan *You Tube* sebagai forum diskusi untuk membahas berbagai masalah, termasuk politik. Komunitas *netter* mengembangkan *blog*, *You Tube*, dan *facebook* sebagai ekspresi dari pemikiran dan kepentingannya. Dalam hal ini kepentingan para politikus untuk membuat *blog*, *facebook*, dan *You Tube* merupakan konsekuensi dari profesi mereka yang berbeda dari kepentingan dan kebutuhan esensial dari para *netter* untuk mengembangkan komunitas ini. Inilah era demokrasi dalam dunia *cyber*. Antara aktor politik dan konstituen saling bisa mengekspresikan dirinya secara terbuka. Demokrasi dalam dunia maya ini disebut *cyber* demokrasi, yang juga disebut sebagai e-demokrasi, *cyber* politik, atau e-politik. Terminologi ini merujuk pada penggunaan internet dan teknologi komunikasi untuk memacu proses demokratisasi.

Berkembangnya komunitas baru di dunia *cyber* membuat sumber informasi dari masyarakat sangat banyak, biasanya dilakukan melalui *blog*, *You Tube*, dan *facebook*. Komunitas tersebut sangat interaktif, tetapi bersifat sangat eksklusif, yang terbagi dalam kelompok-kelompok pendukung partai atau calon presiden (*capres*)/ calon wakil presiden (*cawapres*) tertentu. Dibanding dengan pemilihan umum legislatif kelompok ini sangat antusias melakukan diskusi untuk pilpres. Dalam sebuah situs jejaring sosial FB dari sebuah komunitas “*Say No To Megawati*,” seorang *netter* mengatakan bahwa “percayalah kalo negara di pimpin seorang wanita niscaya negara tersebut akan menuju kehancuran... dikutip dari sabda Rasulullah.” Dalam komunitas lain yang tergabung dalam “*Say No To SBY*,” seorang *netter* berbalik dengan mengejek: *sby* cuman modal *smile* aja....visi dan misinya neoliberalisme....bisanya membagikan blt aja....klu gua orang paling kaya di dunia, gua bagi tu BLT sama semua rakyat di indonesia hihihihihihihihihih BLT (bencana lanjut terus) hahahaha”. Dalam “*Say No To Yusuf Kalla*,” ada *netter* yang menulis “Hati-hati, JK-WIN itu

didukung oleh FPI/FUI, dan raja judi. Makanya fitnah soal suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) itu selalu berasal dari kubu JK-WIN.” Selain itu, ada komunitas yang mendorong orang untuk terjun ke legislatif daripada lembaga tersebut dipenuhi oleh orang yang dianggap tidak berkompeten. Ada pula komunitas yang menggalang dukungan untuk tidak menggunakan hak pilih atau golongan putih (golput).

Dalam abad informasi ini para aktor politik tampaknya sadar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan konstituennya. Dari hasil penelitian tahun lalu ditemukan bahwa semua partai politik yang mendapatkan *electoral threshold* memiliki *website*, hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menggunakan *blog*. Demikian juga semua capres/cawapres memiliki *website*, bahkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) menyapa konstituennya melalui FB, yaitu SBY Presidenku dan JK-Real President. Menyadari bahwa kaum muda, terutama pemilih pertama lebih banyak menggunakan media baru dibanding media cetak, lembaga pemerintah seperti KPUD Kota Bandung menggunakan FB untuk sosialisasi Pemilu. Kemudahan berkomunikasi melalui FB juga membuat beberapa calon legislatif (caleg) menggunakan situs jejaring sosial ini untuk berkomunikasi dengan konstituennya.

Berdasar paparan di atas dapat disimpulkan bahwa TIK banyak digunakan dalam Pemilu 2009, baik Pemilu legislatif maupun pilpres. Artinya, TIK telah membantu proses demokratisasi. TIK tidak hanya digunakan sebagai alat pengolahan data dalam Pemilu, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara aktor politik dengan konstituen dan juga antarpending aktor politik tertentu. Walaupun secara umum dana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pengadaan TIK pada Pemilu 2009 jauh berkurang dibanding Pemilu 2004, penggunaan TIK untuk penghitungan suara dalam pemilihan legislatif 2009 memang menjanjikan adanya transparansi. Hal itu dilakukan melalui metode pengolahan data yang sederhana, yaitu mengirimkan data Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke pusat tabulasi nasional melalui *scanning* data yang dilakukan di KPUD tingkat kota/kabupaten.

Meskipun begitu, harus diakui masih banyak kritik karena adanya beberapa hambatan teknis.

Hal yang paling menarik dalam proses demokratisasi ini adalah penggunaan TIK sebagai alat kontrol, baik dalam proses penghitungan suara maupun klarifikasi identitas dan status hukum caleg. Sebagai contoh, TIK digunakan panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) Yogyakarta untuk menelusuri identitas caleg dalam proses klarifikasi dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagai contoh: apakah caleg tersebut masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), apakah tim suksesnya adalah komisaris Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), status hukum seorang caleg. Sebagai sebuah institusi yang bertugas mengawasi jalannya Pemilu, panwaslu harus bisa menjamin bahwa proses Pemilu tidak cacat hukum. Klarifikasi hal-hal seperti identitas caleg dan tim sukses secara manual memakan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Selain itu, TIK juga digunakan Panwaslu untuk mendapat masukan dari masyarakat melalui *blog* yang dibangunnya. Walaupun interaksi terbanyak masih dilakukan melalui telepon, interaksi melalui TIK sudah mulai berkembang.

Dengan adanya TIK kini politik bukan milik institusi formal saja, melainkan juga milik masyarakat. Masyarakatlah yang sebenarnya berkontribusi di dalam proses tersebut. Proses politik sendiri ditengarai sebagai proses yang berada di dalam struktur yang formal. Padahal, di dalam konteks demokrasi, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban untuk membentuknya. Dalam proses partisipasi masyarakat melalui kelembagaan formal politik, masyarakat mengungkapkannya melalui partisipasi (atau nonpartisipasi) terhadap Pemilu. Oleh karena itu, sebagian dari pemahaman tentang demokratisasi adalah adanya cara atau saluran yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengekspresikan pemikirannya. Untuk menangkap pemikiran dari masyarakat, identifikasi melalui ekspresi politik mereka menjadi sangat berarti karena dapat mengungkap partisipasi individu pada perkembangan pemaknaan politik di Indonesia.

Buku ini hendak menjelaskan peran media baru dalam proses demokratisasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan capres/cawapres pada pemilu 2009. Pada satu sisi, hubungan antara aktor politik, konstituen, dan institusi penyelenggara pemilihan umum pada media baru bersifat egaliter sehingga konstruksi sosial tidak dilakukan oleh institusi besar seperti perusahaan media, tetapi oleh individu yang sulit diidentifikasi identitasnya. Media baru seakan menjadi tempat untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa atau sulit dilakukan di dunia sebenarnya. Pada sisi lain, kemunculan media baru juga merisaukan politisi yang berkompetisi pada pilpres 2009 karena melalui dunia maya konstruksi identitas diri seseorang dapat diciptakan, bahkan dihancurkan.

Kondisi itu memunculkan masalah adanya kesenjangan antara kebermanfaatan media baru dan kenyataan pemanfaatannya dalam kampanye pilpres langsung yang memungkinkan adanya upaya saling menjatuhkan dalam dunia maya dengan menggunakan berbagai wacana kelas, etnisitas, dan gender. Hal yang dijelaskan dalam buku ini adalah sebagai berikut.

- (1) Perbincangan wacana kelas, etnisitas, dan gender dalam ruang maya dalam kampanye pilpres langsung 2009 dan apa maknanya.
- (2) Perbincangan intertekstualitas wacana pengkampanyean diri dan partai, misalnya teks iklan politik.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan penulisan buku ini adalah mengetahui ekspresi politik masyarakat yang disajikan dalam ruang maya melalui perbincangan tentang wacana kelas, etnisitas, dan gender berkaitan dengan kampanye pilpres langsung 2009. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengungkap makna berbagai ungkapan masyarakat yang tertuang dalam FB penolakan terhadap calon presiden RI pada Pemilu 2009.

Data utama kajian ini ialah teks dari dikumpulkan dari FB “*Say No To Megawati*”, “*Say No To Jusuf Kalla*” dan “*Say No To SBY*”. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan akademisi, mahasiswa serta *netter* yang ikut berpartisipasi dalam forum diskusi.

Data teks dikumpulkan sejak munculnya forum diskusi sampai H-1 pemilihan umum yaitu 4 April - 7 Juli 2009.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis wacana model Sara Mills. Adapun fokus kajian ini adalah wacana tentang gender, etnis dan kelas. Mengingat kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah teks yang berhubungan dengan pilpres 2009 maka yang dimaksud dengan wacana etnis di sini adalah bagaimana masyarakat melakukan representasi maupun diskusi tentang kandidat yang dihubungkan dengan etnisitas seperti Jawa-luar Jawa. Untuk kelas fokusnya adalah wacana mengenai kekayaan yang dimiliki calon, latar belakang profesionalitas calon (pengusaha, profesional, orang biasa) serta latar belakang keturunan yang dimiliki calon. Sedangkan analisis gender fokusnya adalah bagaimana perempuan direpresentasikan dalam kedudukannya sebagai pemimpin politik maupun calon presiden.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Yogyakarta dan Bandung. Kota-kota ini merupakan lokus terjadinya beberapa kasus gerakan sosial, merupakan barometer politik nasional serta memiliki aktivitas *cyberpolitik* yang tinggi. Selain itu, kajian ini merupakan kajian lanjutan di mana pada tahun pertama kajian tersebut mengambil lokasi Jakarta, Yogyakarta dan Bandung.

BAB II

ANALISIS WACANA KRITIS DALAM POLITIK INFORMASIONAL

Penelitian ini bertolak dari pemikiran Manuel Castells tentang politik informasional dalam masyarakat jaringan (*network society*) pada abad informasi. Dalam politik informasional, media menjadi ruang politik yang dapat memunculkan skandal politik. Keterkaitan antara masyarakat jaringan, politik informasional, dan analisis wacana kritis dibicarakan pada paparan di bawah ini. Paparan tentang analisis wacana bersandar pada konsep yang dikembangkan Sara Mills (1997) yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Foucault.

2.1 Masyarakat Jaringan dan Politik Informasional

Masyarakat jaringan adalah masyarakat yang hampir seluruh kegiatannya—ekonomi, politik, dan sosial budaya—berputar di sekitar jaringan yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Jika bentuk masyarakat khas pada abad informasi adalah masyarakat jaringan, politik yang menandai zaman ini adalah "politik informasional."¹ Dalam sistem politik yang baru tersebut, media (elektronik) menjadi ruang politik yang utama. Hal itu bukan berarti bahwa media mendominasi politik, tetapi logika dan organisasi media

¹Perlu dibedakan informasi (masyarakat informasi, ekonomi informasi, politik informasi) dan informasional (masyarakat informasional, ekonomi informasional, politik informasional). Istilah *politik informasi* menekankan peran informasi dalam politik. Sementara itu, informasional menandakan atribut dari bentuk tertentu organisasi sosial politik di mana proses menghasilkan, memproses, dan menyiarkan informasi merupakan sumber-sumber mendasar dari produktivitas dan kekuasaan. *Politik informasional* sangat dipengaruhi kondisi-kondisi teknologi yang muncul dalam periode sejarah dewasa ini. Salah satu karakter kunci dari politik informasional adalah logika jaringan pada struktur dasarnya (Castells dalam Adeline, 2004:21, catatan kaki 31).

elektronik menjadi bingkai dan struktur politik (Castells, 2001: 312). Terbingkainya politik dalam ruang media ini berdampak terhadap termodifikasikannya hubungan antara negara dan masyarakat. Sistem politik yang masih berdasar pada bentuk dan strategi politik zaman industri menjadi kuno dan tidak relevan lagi (Adeline, 2004: 68).

Akhirnya, menurut Castells (dalam Adeline, 2004: 68), media menjadi ruang politik. Dalam konteks politik demokrasi, akses ke institusi-institusi negara bergantung pada kemampuan memobilisasi mayoritas penduduk melalui Pemilu. Warga masyarakat mendapat informasi dan membentuk pendapat melalui media. Untuk mendapat dukungan dan memengaruhi masyarakat, partai politik menggunakan media. Agar masuk dalam (peliputan) media-media besar, institusi-institusi politik harus menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan logika media. Maka, media membingkai politik. Begitu politik terperangkap ke dalam ruang media, aktor-aktornya menata tindakan politik mereka di sekitar media, menjadikan media kancah peperangan antara kekuatan-kekuatan politik dan personalitas pelakunya. Dalam praktiknya, politik informasional menjadi "politik skandal." Argumennya, media kian kuat secara teknologi, finansial, dan politis. Partai dan kandidat harus melalui media untuk sampai ke masyarakat. Hal itu tidak disebabkan oleh media sebagai pilar demokrasi keempat, tetapi oleh karena media adalah medan tempur politik.

Berdasar pandangan Castells dalam Adeline, 2004: 72–73, ruang media, termasuk di dalamnya internet dan multimedia, menangkap politik ke dalamnya hingga menjadi semacam ruang publik baru. Akibatnya, logika media menjadi logika dominan dalam sistem politik. Media komunikasi modern yang berupa jaringan interaktif seperti juga teknologi itu sendiri merupakan pisau bermata dua: dapat dipakai sebagai pendukung struktur dominan dan untuk alat pendobraknya. Wacana politik yang terperangkap dalam media, terutama internet, harus dikritisi sebagai bagian dari penguatan komunitas sebagai penyeimbang dengan internet sebagai alat informasi, komunikasi, dan organisasi.

2.2 Wacana

Istilah *wacana* menjadi umum dipakai dewasa ini dalam berbagai disiplin ilmu: teori kritis, sosiologi, linguistik, filsafat, psikologi sosial, dan berbagai bidang lain sehingga seringkali jarang didefinisikan dan secara sederhana dianggap sebagai pengetahuan umum semata. Dalam disiplin ilmu tertentu pun istilah ini begitu cair pemaknaannya. Crystal (1987) mendefinisikan analisis wacana yang dikontraskan dengan analisis teks. Istilah "wacana" seringkala didefinisikan dengan "apa yang bukan wacana", apa yang menjadi oposisi wacana. Wacana seringkali ditandai melalui perbedaannya dengan serangkaian istilah: teks, kalimat, dan ideologi. Benveniste (1971: 110), mengontraskan wacana dengan "sistem bahasa". Kemudian, dia memberikan ciri khusus wacana sebagai ranah komunikasi, tetapi terus mengontraskan wacana dengan sejarah atau cerita. Roger Fowler mengontraskan wacana dengan ideologi.

Berdasar hal itu, Sara Mills (1997: 7) menyatakan bahwa wacana tidak dapat diharapkan memiliki satu makna karena istilah ini digunakan dengan cara yang berbeda oleh para pakar yang berbeda. Foucault dalam Sara Mills (1997) memberikan rentang makna wacana sebagai (i) Semua ranah umum dari semua pernyataan," sehingga semua ujaran atau teks yang memiliki makna dan memiliki pengaruh dalam dunia nyata disebut wacana; (ii) Kelompok pernyataan yang dapat dipisahkan sendiri-sendiri. Definisi ini sering digunakan Foucault ketika mendiskusikan struktur khusus dalam wacana; (iii) Kelompok ujaran yang tampak teratur yang memiliki koherensi dan daya. Hal ini biasanya berkaitan dengan istilah seperti wacana feminitas, wacana imperialisme. Dari sejumlah pengertian itu, satu pengertian yang banyak digunakan para pakar ialah "a regulated practice which accounts for a number of statements."

Menurut Sara Mills (1997), cara terbaik untuk mengkaji istilah *wacana* Foucault ialah melihat bagaimana istilah itu digunakan dalam hubungannya dengan pembahasan kekuasaan, pengetahuan, dan kebenaran karena ketiganya menjadi dasar wacana. Relasi kuasa dengan

ilmu pengetahuan serta relasi kuasa dengan kebenaran dan otoritas memunculkan konsep politik pengetahuan. Kekuasaan secara sederhana merupakan pencegahan seseorang untuk melakukan keinginan mereka dan pembatasan kebebasan seseorang. Analisis Foucault tentang kekuasaan ialah kekuasaan tersebar ke dalam seluruh hubungan sosial yang menghasilkan berbagai kemungkinan bentuk perilaku begitu juga perilaku membatasi.

Salah satu cara paling produktif untuk membahas wacana ialah bukan memahami wacana sebagai tanda-tanda atau serangkaian teks, tetapi sebagai “praktik yang secara sistematis membentuk objek yang mereka bicarakan (Foucault dalam Sara Mills, 1997). Dalam pengertian ini, wacana dipahami sebagai “sesuatu yang menghasilkan sesuatu” juga seperti ujaran, konsep, pengaruh daripada dipahami sebagai “sesuatu yang dapat dianalisis dalam keterisolasian.”

Wacana bukan sesuatu yang membeku atau statis. Foucault justru lebih jauh menyatakan bahwa setiap zaman memiliki dan mendefinisikan wacananya sendiri, memungkinkan definisi-definisi itu dapat berubah secara radikal dari satu periode ke periode lain (terjadi keretakan *episteme* dan diskontinuitas).

2.2.1 Wacana dan Ideologi

Semua pakar teori kritis dan kebudayaan mengalami kesulitan teoretis apakah akan mendekati kerja mereka dengan basis konsep ideologi atau wacana. Hal ini berkaitan dengan situasi politik yang pesimis pada tahun 1990-an yang lebih nyaman bekerja dengan konsep wacana dibanding mengaitkan diri mereka sendiri dengan teori yang terpengaruh faham Marxist melalui penggunaan istilah ideologi.

Menurut Sara Mills (1997), pemikiran Foucault tentang wacana membuka ruang diskusi dan dialog berkaitan dengan istilah ideologi dan dalam beberapa pengertian wacana didefinisikan dalam dialog dengan dan dalam reaksi atas definisi ideologi. Ada sejumlah perbedaan antara wacana dan ideologi. Foucault (dalam Sara Mills, 1997: 32) menyatakan

The notion of ideology appears to me to be difficult to use for three reasons. The first is that, whether one wants it to be or not, it is always in virtual opposition to something like truth..... The second inconvenience is that it refers, necessarily I believe, to something like a subject. Thirdly, ideology is in a secondary position in relation to something which must function as the infra-structure or economic or material determinant for it (Foucault, 1979: 36).

Sara Mills mencoba mengurai satu demi satu pernyataan Foucault tersebut ke dalam tiga bahasan, yaitu ideologi dan kebenaran, subjek, dan determinan wacana.

2.2.1.1 Ideologi dan Kebenaran

Ideologi seringkali dimaknai sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*) atau representasi yang diimajinasikan dari kondisi nyata tentang “ada” (*existence*). Hal itu dikemukakan oleh Marx dalam upayanya untuk menyanggah pemikiran idealistik Hegel. Kesadaran yang salah memahami realitas ini, menurut Marx, bersifat ideologis. Dari sinilah Marx memberi pengertian ideologi sebagai kesadaran tentang yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Konsep dalam ideologi sebagai “kesadaran palsu” itu mempraanggapkan adanya kesadaran yang benar atau kesadaran asli. Bagi Foucault, semua pengetahuan ditentukan oleh kombinasi sosial, institusional, dan tekanan diskursif, serta pengetahuan teoretis bukanlah kekecualian. Beberapa dari pengetahuan akan melawan wacana dominan dan beberapa pengetahuan akan lebur dalam wacana dominan.

2.2.1.2 Subjek

Foucault memusatkan perhatian untuk menulis sejarah gagasan tanpa mengacu pada subjek yang berkuasa-individual. Dia mencoba menjauh dari konsep subjek Cartesian, subjek yang keberadaannya bergantung pada kemampuannya sendiri untuk melihat diri sendiri yang bersifat unik dan mengetahui diri sendiri. Foucault memusatkan diri untuk melihat subjek sebagai sebuah pengaruh kekuasaan dan dalam

pengetian merancang kematian subjek. Daripada melihat subjek atau bahkan subjek dalam krisis sebagai unsur yang memiliki "keberadaan" dan ciri yang dapat direncanakan, Foucault lebih memilih mengesampingkan subjek dalam diri sendiri dan berkonsentrasi pada proses yang dianggap penting dalam pembentukan konsep yang sangat mendasar tentang subjek. Dalam karya berikutnya, Foucault kembali mempertanyakan subjek, tidak menulis subjek dalam sejarah, tetapi menempatkan perubahan sejarah dan dasar-dasar konsep subjek yang tergenderkan.

Analisis ideologis dapat memainkan peran penting tentang subjek karena perhatiannya pada kelompok atau kelas individual dan karena perhatiannya dalam konstruksi subjektivitas individual melalui tindak institusi seperti negara. Namun, analisis ideologis masih tetap memakai konsep subjek individual yang mampu menolak tekanan ideologis dan mengontrol tindakannya. Teori wacana memiliki jauh lebih banyak kesulitan dalam menempatkan, mendeskripsikan, dan bahkan menjelaskan subjek individual yang menentang kekuasaan.

2.2.1.3 Determinan Wacana

Foucault tidak percaya bahwa ada hubungan yang begitu sederhana antara ekonomi dan struktur sosial dengan wacana. Dia tidak percaya seperti yang dilakukan aliran Marxist bahwa dasar ekonomi menentukan apa yang dapat dikatakan dan dipikirkan pada waktu tertentu. Alih-alih, dia melihat hubungan antara ekonomi, struktur sosial, dan wacana sebagai interaksi yang kompleks dengan ketiadaan unsur yang menjadi dominan di antara ketiga istilah tersebut. Dia tidak melihat hubungan ekonomi sebagai yang utama, tetapi sebagai salah satu jenis hubungan dalam rentang hubungan kekuasaan. Foucault juga menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan tidak berbanding lurus dengan hubungan ekonomi. Dia meninggalkan analisis hubungan kekuasaan dalam cara kapitalisme bahwa struktur kekuasaan tertentu dengan kapitalisme adalah sama.

Sara Mills mencoba memaparkan perbedaan konsepsi ideologi dan konsep wacana Foucault, misalnya hubungan wacana dan ideologi dengan konsep kekuasaan. Foucault mencoba meninggalkan konsep kekuasaan jauh dari kesan negatif menuju konsepsi kekuasaan yang menekankan hakikat produktifnya. Dia menentang konsep hipotesis represif karena kekuasaan beredar dalam masyarakat daripada dimiliki oleh satu kelompok. Kekuasaan itu dinegosiasikan dalam tiap interaksi dan tidak pernah tetap dan stabil. Foucault menegaskan bahwa penolakan selalu ada dalam konsep kekuasaan: "di mana ada kekuasaan di situ ada penolakan." Konsep Foucault tentang kekuasaan memungkinkan kita melihat kompleksitas kekuasaan—bahwa kekuasaan secara sederhana bukanlah sekadar sebuah tekanan (*imposition*).

2.2.2 Bahasa, Wacana, dan Ideologi

Konseptualisasi Foucault tentang kekuasaan memaksa kita untuk mengevaluasi kembali peran bahasa/wacana/teks dalam proses pengangkatan subjek dalam hierarki hubungan. Teori Marxist secara sederhana memandang bahasa sebagai wahana untuk memaksa orang mempercayai gagasan yang tidak benar demi kepentingan mereka. Akan tetapi, dalam teori wacana, bahasa merupakan arena tempat perjuangan dilakukan. Contoh yang bagus tentang perbedaan pandangan para pakar yang mendasarkan diri pada konsep ideologi dan yang mendasarkan diri pada teori wacana ialah perdebatan atas seksisme/kebenaran politik. Dalam pandangan ideologis, seksisme dipandang sebagai bentuk kesadaran yang salah, sebuah cara bahwa subjek mengakui mereka sendiri sebagai jenis tertentu dari subjek yang tergenderkan. Perspektif teori wacana memungkinkan kita mempertanyakan apakah seksisme secara sederhana merupakan masalah tekanan dari kepercayaan kepada kelompok subjek. Jadi, dalam pandangan ideologis, seksisme merupakan strategi opresif yang digunakan oleh laki-laki untuk menunjukkan kekuasaan mereka; dalam model teori wacana seksisme merupakan arena kontestasi.

Memang ada beberapa pakar yang tidak memisahkan wacana dan ideologi dan ada pula beberapa pakar yang menggunakan ideologi

sebagai istilah yang ditempatkan dalam kerangka teori wacana, seperti yang dilakukan Fairclough (2003). Bagi sebagian pakar, wacana merupakan istilah yang lebih luas yang di dalamnya terkandung rentang ideologi yang berbeda, sedangkan bagi yang lain ideologi dimanifestasikan melalui berbagai wacana yang berbeda. Dalam tulisan ini, sangat berguna melihat kedua istilah tersebut sebagai maujud yang berbeda.

2.2.3 Struktur Diskursif

Salah satu penegasan penting yang dibuat oleh Foucault dalam *The Archaeology of Knowledge* (1972) ialah bahwa wacana bukanlah pengelompokan ujaran secara sederhana yang dikelompokkan berdasar isu atau tema, juga bukan serangkaian ujaran yang berasal dari latar institusional tertentu, tetapi wacana merupakan pengelompokan ujaran yang diregulasi atau pernyataan dengan aturan internal yang bersifat khusus untuk wacana itu sendiri. Jadi, kajian wacana bukanlah secara sederhana merupakan analisis ujaran dan pernyataan, tetapi juga memusatkan perhatian pada struktur dan aturan wacana. Foucault menamai jenis analisis struktur diskursif ini sebagai arkeologi.

Foucault menekankan bahwa alasan utama melakukan analisis struktur wacana bukanlah menemukan kebenaran atau asal-usul pernyataan, tetapi lebih pada menemukan mekanisme pendukung yang menjaga wacana dalam tempatnya. Mekanisme pendukung ini baik berupa aspek intrinsik atas wacana itu sendiri maupun ekstra diskursif, yakni sosiokultural. Foucault memusatkan perhatian pada serangkaian pernyataan dalam kerangka kerja diskursifnya, yaitu pernyataan yang tidak berada dalam keterisolasian karena ada serangkaian struktur yang membuat pernyataan-pernyataan tersebut bermakna dan memberi daya kepada mereka.

Fokus *The Archaeology of Knowledge* pada hubungan teks dan wacana dengan realitas dan konstruksi realitas oleh struktur diskursif. Realitas ditandai sebagai serangkaian konstruk yang dibentuk melalui wacana. Realitas itu sendiri tidak pernah didefinisikan oleh Foucault

karena baginya kita hanya dapat mengakses pada struktur diskursif yang menentukan persepsi kita tentang realitas. Jadi, Foucault tidak menyangkal keberadaan realitas. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa kita merasa menjadi signifikan, bagaimana kita menginterpretasikan objek dan peristiwa, dan menyusunnya dalam sistem makna bergantung pada struktur diskursif. Bagi Foucault, struktur diskursif adalah apa yang membuat objek dan peristiwa tampak bagi kita menjadi nyata atau material. Meskipun dia melihat realitas sebagai maujud yang dikonstruksi melalui tekanan diskursif, dia juga menyadari dengan baik pengaruh "realitas" pada pikiran dan perilaku.

Bagi Foucault, persepsi kita tentang objek dibentuk dalam batas kendala diskursif: wacana ditandai oleh pembatasan bidang objek, definisi perspektif legitimasi untuk agen pengetahuan, dan ketetapan norma untuk elaborasi konsep atau teori. **Pertama**, wacana menyebabkan penyempitan bidang pandangan seseorang, mengeluarkan rentangan fenomena dari yang dianggap nyata atau sebagai pantas diperhatikan. Jadi, pembatasan bidang merupakan tahap pertama dalam penentuan serangkaian praktik diskursif. Kemudian, masuk ke dalam wacana dipandang berkaitan dengan persoalan otoritas dan legitimasi. Akhirnya, tiap tindakan merencanakan kemungkinan penggunaan yang dapat dibuat pernyataan atau aturan mendatang untuk penggunaannya.

Lebih lanjut Foucault menjelaskan bahwa wacana merupakan objek bagi kita. Tidak ada tatanan intrinsik pada dunia itu sendiri selain peraturan yang kita tentukan pada wacana melalui deskripsi kebahasaan tentang wacana. Sebagai contoh, penetapan objek melalui wacana ialah cara pemberian batas antara hewan dan tumbuhan yang berubah sepanjang periode sejarah.

Wacana tidak hanya mengonstruksi objek material, seperti kelompok tertentu dari tanaman, tetapi juga mengonstruksi peristiwa dan urutan peristiwa tertentu ke dalam naratif yang diakui oleh kebudayaan tertentu sebagai peristiwa nyata atau serius. Sebagai contoh, tiap kebudayaan memandang berbeda tentang peristiwa keguguran kandungan.

Sara Mills (1996: 56) mengkaji struktur yang dikemukakan Foucault, yang merupakan unsur intrinsik terhadap wacana, yakni *episteme*, pernyataan, wacana, dan arsip.

2.2.3.1 *Episteme*

Episteme merupakan serangkaian struktur diskursif sebagai keseluruhan dalam pemikiran kebudayaan. *Episteme* terdiri atas keseluruhan struktur diskursif yang terjadi sebagai hasil dari interaksi rentang perputaran wacana dan disahkan pada waktu tertentu. Jadi, Foucault mengakui adanya *episteme* yang menata pemikiran, tetapi *episteme* itu sendiri dapat berganti dari satu zaman atau tempat dengan zaman atau tempat lain. Dia membedakan tiga zaman *episteme*, yaitu abad Renaisan, abad klasik, dan abad modern.

Foucault menjelaskan ciri *episteme* Renaisan dengan "kemiripan." Pada zaman Renaisan sistem tanda bersifat triganda, yang terdiri atas tanda-tanda, isi yang diacu tanda, serta kemiripan. Kemiripan menjadi ciri sistem pemikiran yang memengaruhi persepsi dan kesadaran orang akan dunia. Di sini tanda menyatu dengan bendanya. Bahasa pada zaman Renaisan bersifat transparan bagi benda-benda karena bahasa dianggap mirip dengan benda-benda itu. Karena bahasa bersifat transparan kata-kata dan benda-benda, keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Teks menghubungkan bahasa dengan benda-benda. Dalam teks itulah benda-benda tersimpan (teori korespondensi). Teks merupakan pemaparan atau pencerminan benda-benda. Pengetahuan adalah "tentang yang sama" karena sistem pemikirannya bersifat menyamakan.

Sistem pemikiran klasik tidak lagi bersifat triganda, melainkan bersifat dwiganda, yaitu hubungan antara yang menandai dan yang ditandai. Hubungan keduanya bersifat representatif. Tanda dan benda terlepas satu sama lain. Tanda didefinisikan secara baru berdasar tiga variabel, yaitu kepastian hubungan (suatu tanda dapat menunjukkan kepastian atau kemungkinan akan sesuatu), tipe hubungan (suatu tanda bisa dinyatakan mencakup keseluruhan atau terpisah dari keseluruhan

yang ditunjukkannya), dan asal mula hubungan (suatu tanda bisa bersifat alamiah atau konvensional). Dunia tidak lagi dilihat sebagai kesatuan yang belum terdiferensiasi (tidak ada lagi kesatuan kata dengan benda-benda). Bahasa bukan lagi pencerminan benda-benda, tetapi pengungkapan suatu pemikiran. Bahasa merupakan sistem tanda-tanda verbal yang mengungkapkan pemikiran tentang benda atau sesuatu. Ciri pemikiran pada zaman klasik ialah membeda-bedakan, membuat tabel tanda-tanda berdasar identitas dan perbedaan melalui tanda-tanda. Pengetahuan didasarkan pada "identitas" dan perbedaan karena didasarkan pada analisis representasi dan sistem tanda.

Episteme abad modern diterangkan dengan signifikasi atau pemaknaan. Sistem tanda bersifat dwiganda dan tidak lagi terpisah satu sama lain seperti pada zaman klasik, tetapi merupakan kesatuan antara yang ditandai dan menandai. Bahasa tidak lagi dilihat fungsinya seperti pada zaman klasik, tetapi bahasa merupakan "suatu yang ada" yang mempunyai struktur organis yang dikuasai hukum-hukum internnya. Bahasa tidak lagi satu dengan pengetahuan. Bahasa pada zaman Renaisan bersifat transparan, pada zaman klasik bahasa kehilangan bentuk aslinya, dan pada zaman modern, bahasa justru menjadi objek pengetahuan. Pada sisi lain, manusia sebagai penemuan baru yang kelak mungkin akan segera berakhir. Bagi Foucault, sejarah merupakan perkembangan sistem pemikiran (*episteme*).

2.2.3.2 Pernyataan (*The Statement*)

Episteme dikonstruksi dari serangkaian pernyataan yang dikelompokkan ke dalam wacana berbeda atau kerangka kerja diskursif (Sara Mills, 1997: 60). Dreyfus dan Rabinow dalam Sara Mills (1997) menyatakan bahwa "pernyataan bukanlah ujaran dan bukan pula proposisi, bukan maujud psikologis dan bukan pula maujud logis, bukan peristiwa dan bukan pula bentuk ideal." Pernyataan bukan sebuah ujaran, dalam arti bahwa satu kalimat secara aktual dapat berfungsi dalam beberapa pernyataan bergantung pada konteks diskursifnya.

Pernyataan tampak memiliki kesamaan dengan tindak tutur (*speech acts*) yang dikemukakan Austin (1962) dan Searle (1969) meskipun kedua pakar tindak tutur itu lebih memusatkan daya ujaran, cara ujaran dipahami dan dilakukan, daripada Foucault. Menurut Foucault, ujaran dan teks yang membuat beberapa bentuk klaim kebenaran dan disahkan sebagai pengetahuan dapat diklasifikasi sebagai pernyataan. Dalam hal ini pernyataan dapat dianggap sebagai "tindak tutur serius."

Analisis arkeologis Foucault memusatkan perhatian pada sistem pendukung yang menguasai produksi dan penataan pernyataan tersebut dan mungkin lebih penting sistem yang memungkinkan ujaran lain dikeluarkan dari posisi "*being in the true*" sehingga diklasifikasi sebagai pernyataan.

2.2.3.3 Wacana

Sara Mills (1997) mencoba membuat jelas pendapat Foucault tentang perbedaan penting antara wacana sebagai keseluruhan, yaitu serangkaian kaidah dan prosedur untuk produksi wacana tertentu dan wacana atau kelompok pernyataan itu sendiri.

Wacana adalah serangkaian pernyataan yang disetujui atau didukung yang memiliki daya terlembagakan, yang berarti bahwa wacana memiliki pengaruh besara terhadap cara individu bertindak atau berpikir. Kita dapat menyatakan bahwa wacana adalah pengelompokan pernyataan yang memiliki daya yang sama, yaitu mereka dikelompokkan bersama karena tekanan institusional, kesamaan asal atau sumber atau konteks atau mereka bertindak dengan cara yang sama. Sebagai contoh, wacana feminitas kelas menengah pada abad ke-19 terdiri atas serangkaian pernyataan heterogen (yaitu ujaran, teks, gestur, perilaku yang diterima sebagai pendeskripsian esensi keperempuanan zaman Victoria: lemah lembut, simpatik, kurang percaya diri) dan itu menjadi parameter perempuan dalam bertindak sebagai identitas diri.

2.2.3.4 Arsip

Arsip merupakan salah satu bagian dari tiga konsep penting yang digunakan Foucault dalam meneliti wacana, yaitu positivitas, apriori historis, dan arsip.

Positivitas suatu wacana atau ilmu pengetahuan adalah apa yang menandai kesatuan wacana dalam suatu periode tertentu sehingga kita dapat membedakan apakah dua orang penulis atau ahli berbicara tentang hal yang sama atau apakah mereka berbicara tentang dua hal yang berbeda. Positivitas merupakan "lingkup komunikasi" antara penulis atau ilmuwan. Dengan demikian, positvitas tidak sama luasnya dengan ilmu yang memiliki perkembangan historis yang panjang (kedokteran misalnya). Positivitas lebih luas daripada kelompok atau mazhab yang memiliki paradigma dan pandangan yang sama. Positivitas itu dimungkinkan oleh "apriori historis," yaitu segala syarat-syarat atau aturan-aturan yang menentukan wacana. Syarat dan aturan itu tidak muncul dari luar, tetapi menentukan wacana dari dalam, menentukan perwujudan wacana itu sendiri.

Struktur diskursif lain yang dipisahkan oleh Foucault ialah arsip. Dia mendeskripsikan arsip dalam istilah berikut. "Saya maksudkan serangkaian kaidah yang pada periode tertentu dan untuk masyarakat tertentu didefinisikan: (1) Batas dan bentuk ekspresibilitas; (2) Batas bentuk konservasi; (3) Batas dan bentuk memori; (4) Batas dan bentuk reaktivasi (pengaktifan kembali) (Foucault dalam Sara Mills, 1997).

Dalam pengertian itu, konsep arsip dapat dipandang bekerja berdampingan dengan konsep *episteme*. Arsip dapat dipandang sebagai seperangkat mekanisme diskursif yang membatasi apa yang dapat dikatakan, dalam bentuk apa, dan apakah dianggap sebagai pengetahuan dan peringatan yang bernilai.

Arsip adalah sistem pernyataan yang dihasilkan oleh berbagai positvitas sesuai dengan apriori historis masing-masing. Oleh Foucault, arsip juga dimaksudkan sebagai sistem pembentukan dan transformasi pernyataan-pernyataan. Jadi, arsip bukan endapan dokumen-dokumen

masa lampau, tetapi sesuatu yang memungkinkan bagi timbulnya pernyataan-pernyataan. Arsip selalu berkembang dan tidak mungkin seseorang melukiskan arsip dari satu kebudayaan atau periode secara lengkap. Selain itu, positivitas, apriori historis, dan arsip berperan menentukan wacana.

2.2.4 Eksklusi dalam Wacana

Dalam *Order of Discourse* Foucault membahas cara wacana diregulasi oleh institusi untuk menghindari atau mencegah bahaya. Dia mendeskripsikan proses eksklusi yang terjadi dalam wacana untuk membatasi apa yang dapat dikatakan dan apa yang dapat dianggap sebagai pengetahuan.

Prosedur pertama dari eksklusi ialah pelarangan (*prohibition*) atau tabu (*taboo*): ada masalah tertentu yang sulit dibahas dalam masyarakat Barat, seperti kematian. Hal ini berbeda dengan masyarakat Sumba, misalnya, yang memandang kematian yang bebas diperbincangkan dengan sarana pendukung: praktik material, upacara ritual, dan artifak yang sangat memungkinkan menjadi bahan pembicaraan.

Prosedur kedua dari eksklusi tentang apa yang dapat dikatakan mengelilingi wacana ialah berdasar siapa yang dianggap gila sehingga tidak rasional. Kita kesulitan menemukan suara orang-orang gila itu. Kita seringkali menemukan pandangan kegilaan berdasar suara-suara orang dari luar diri mereka sendiri. Dia berusaha mengangkat orang-orang yang terpinggirkan yang dianggap tidak pantas untuk pergaulan sosial.

Prosedur ketiga eksklusi berkaitan dengan apa yang dapat dianggap sebagai pernyataan sehingga bagian dari kerangka kerja diskursif merupakan pembagian antara pengetahuan yang dirasakan menjadi kebenaran dan yang dianggap menjadi salah. Akan menjadi kebenaran jika didukung oleh berbagai institusi: lembaga pendidikan, penerbit, institusi legal, perpustakaan, dan sebagainya. Pada dasarnya,

eksklusi secara paradoks merupakan salah satu dari cara paling penting diproduksinya wacana.

2.3 Media dan Rusaknya Ruang Publik

Kajian ini membahas perbincangan politik di internet dengan menggunakan data dari FB, yaitu dengan adanya upaya "Say No To...." Tulisan ini mengambil sudut pandang bahwa media pada umumnya sudah pepad dengan tayangan, ujaran, dan opini politik sehingga tidak terdapat ruang bagi masyarakat umum untuk mengutarakan pendapatnya. Alasannya, media juga merepresentasikan sudut-sudut politik yang sudah jelas, misalnya *Republika* akan menulis sudut yang berbeda dibandingkan dengan *Media Indonesia* karena kepemilikan modalnya berada pada kubu politik tertentu.

Teori media konvensional selalu menyatakan bahwa media adalah pilar dari demokrasi karena media memiliki fungsi cek-recek terhadap proses politik yang ada. Namun, di dalam perkembangan media saat ini, pandangan tadi dibantah oleh kenyataan media sendiri yang cenderung mendasarkan diri pada pandangan politik tertentu. Oleh karena itu, di dalam konteks demokrasi, kemudian muncul keraguan tentang fungsi demokrasinya.

"Media tidak selalu menjadi ruang demokratis tempat bertemunya berbagai kepentingan dalam wujud media publik, yang di dalamnya tidak berlangsung prinsip hegemoni dalam pengertian pertarungan ide yang demokratis, melainkan berbagai bentuk pemaksaan, tekanan, kekerasan simbol dan manipulasi semiotik"²

Di dalam politik Indonesia pascareformasi, bentuk-bentuk yang diangkat sebagai sebuah ide yang penting oleh Piliang, dapat dengan mudah ditemukan. Isu yang sangat pribadi seperti agama bahkan sudah menjadi konteks penting di dalam isu politik. Dalam satu sisi isu partai Islam dapat menjadi sesuatu yang relevan dalam konteks politik di

²Yasraf A. Piliang, 2005, *Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra, hlm. 253.

zaman Orde Baru, tetapi di dalam Orde Reformasi saat ini isu itu berubah bentuknya. Orang tidak lagi berbicara tentang partai Islam karena jumlah partai yang mengangkat isu ini cukup banyak dengan penekanannya yang berbeda-beda. Namun, yang menjadi keprihatinan adalah adanya kontestasi bahwa seseorang yang beragama Islam kemudian akan dipertanyakan keislamannya karena memilih partai yang tidak menjunjung isu ini. Atau ada kesan bahwa terdapat kontestasi partai Islam tertentu lebih Islam daripada partai yang lain.

Konteks seperti ini kemudian memunculkan pergumulan pada tingkat masyarakat untuk membuktikan tampilan religius tertentu. Oleh karena itu, isu religiusitas seperti ini menjadi salah satu berita hangat di media. Media tidak memosisikan dirinya sebagai wadah untuk membahas berbagai kontestasi yang ada di masyarakat. Media justru semakin membuat isu ini menjadi isu politik yang sangat penting, bahkan lebih penting dibanding masalah politik *ansich*. Hal seperti inilah yang diangkat oleh Piliang bahwa media menyemburkan kekerasan simbolik dan kurang berperan di dalam konteks demokrasi dan perkembangan demokrasi yang berproses di Indonesia.

Masih dalam konteks pemikiran Piliang, hal ini menjadi menarik sebagai upaya untuk membahas dan membaca apa yang terjadi di ruang maya. Piliang menunjukkan bahwa ruang publik yang diisi oleh media tidak lain adalah sebuah komodifikasi politik semata, namun sangat kuat sisi kapitalnya. Di dalam isi media, Piliang mengambil dari Lash tentang minimalisme. Minimalisme merupakan konsep seni yang digunakan Lash untuk menjelaskan kedangkalan yang terjadi secara individual dan sosial.

“Disebabkan oleh dorongan hasrat yang sangat kuat untuk tetap *survive* dan eksekusi di dalam kehidupan (politik, sosial, ekonomi) – meskipun kondisi diri dan lingkungan tidak mendukung untuk itu – diri terperangkap dalam kondisi minimalnya perspektif, pandangan, dan wawasan masih tetap ingin mendapatkan kedudukan, status dan penguasaan sosial”³

³ Piliang, *Ibid.*, hlm. 257

Kutipan Piliang dari Lash memperlihatkan juga ciri-ciri dari minimalisme sebagai berikut.⁴

- (1) Pengerdilan visi, yaitu pandangan dan perspektif ke depan yang dikuasai semata oleh strategi bertahan hidup *par excellance*.
- (2) Ekspresi diri minimal, yaitu ekspresi diri (di dalam bingkai sosial) yang menjauh dari konteks atau *subject matter*, dalam pengertian sebuah tindakan tidak lagi dilakukan dalam penghayatan penuh karena kondisi keterpaksaan untuk *survival* semata.
- (3) Impersonalitas dan anonimitas tindakan disebabkan kecenderungan setiap orang untuk menyembunyikan dirinya di balik lembaga, massa, atau kelompok untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab atas sebuah tindakan.
- (4) Kecenderungan sensibilitas minimalis, yaitu minimnya pengetahuan, wawasan, keterampilan, kecakapan, dan kompetensi yang diperlukan di dalam berbagai aktivitas (politik, sosial, seni) sehingga mendorong seseorang untuk menutupi minimalitas itu dengan tampilan citra (terampil, intelek, kompeten, jujur, dan sebagainya).
- (5) Hegemoni citra, yaitu direduksinya dunia kehidupan ke dalam wujud citra.

Kutipan yang diperoleh dari Lash ini merupakan kondisi yang ditampilkan oleh media sehingga dapat digunakan sebagai cara untuk melihat kondisi masa kini. Sebagai ilustrasi, pengerdilan visi di dalam konteks politik di Indonesia dapat dilihat dari berbagai keputusan dan aturan yang diambil tanpa mempertimbangkan dengan apa yang terjadi atau diakibatkan oleh tindakan tersebut. Berita di Indonesia seperti harga beras selalu diikuti oleh jumlah impor beras yang dilakukan untuk menyiapkan kebutuhan beras di dalam negeri. Meskipun kebijakan ini memiliki makna di dalam stabilitas politik di Indonesia, di dalam hal ini tidak terlihat adanya pembahasan yang mendalam terhadap apa yang terjadi pada dunia pertanian pangan.

Konteks seperti di atas memperlihatkan adanya pertanyaan yang besar tentang kondisi ruang publik yang tidak kondusif bagi keberadaan

⁴ Piliang, *Ibid*.

masyarakat madani. Konteks ruang publik seperti inilah yang menjadi dasar untuk menggeluti kondisi sosial budaya dari *cyber demokrasi*. Dalam bahasan Piliang, yang dapat diangkat sebagai konteks yang berkaitan dengan *cyber demokrasi* adalah virtualitas ruang publik⁵. Virtualitas ruang publik, menurut Piliang, dipenuhi oleh hasil teknologi pencitraan yang melakukan manipulasi tentang citra yang ada. Dalam konteks seperti ini kondisi lain yang muncul adalah transparansi ruang publik. Dalam transparansi ruang publik yang terjadi adalah sesuatu yang “dahulu” adalah masalah *private* ‘masalah pribadi’, pada saat ini sudah menjadi masalah umum sehingga tidak ada lagi yang dapat disembunyikan.

2.4 Masyarakat Virtual dan Internet

Di dalam pengertian sosiologi secara umum, masyarakat dicirikan oleh adanya interaksi tatap muka dan adanya emosi yang dikembangkan dengan hidup bersama. Di dalam masyarakat ini, individu tidak memiliki kebebasan mutlak dan perlu beradaptasi, baik untuk dirinya berinteraksi di dalam masyarakat maupun untuk masyarakat itu agar mampu *survive*⁶.

Masyarakat virtual yang mengisi ruang maya tidaklah persis seperti masyarakat yang didefinisikan secara sosiologis. Individu yang berkontribusi di dalam ruang maya ditentukan oleh adanya perkembangan teknologi yang terjadi pada masyarakat. Kemudian, di dalam penggunaan teknologi tersebut, individu mengembangkan masyarakatnya berdasar kepentingan atau kesamaan yang mereka miliki sehingga ruang yang diciptakan oleh perkembangan teknologi ini, menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk mengembangkan masyarakat “jenis baru”. Konteks seperti ini pula yang membuat orang

⁵Piliang, *Ibid.*, hlm. 261-262.

⁶Serge Proulx, Guillaume Latzko-Toth, 2005, “Mapping the Virtual in Social sciences, on the Category of “Virtual Community” dalam *The Journal of Community Informatics*, (2005) Vol. 2, Issue 1.

menjadi skeptis di dalam melihat perkembangan ini atau menjadi kurang memperhatikan perkembangan ini.

Tulisan ini tidak akan mempermasalahkan adanya perbedaan pemaknaan virtual yang ada melainkan melakukan kajian tentang apa yang terjadi ketika teknologi memungkinkan adanya “masyarakat baru” ini. Di dalam kajian ini pun bahan yang diangkat belum sepenuhnya menggarap masyarakat virtual *an sich*, melainkan sebuah hubungan sosial antara masyarakat dalam pengertian umum dengan adanya masyarakat yang berinteraksi secara *interface* ini. Seperti dikatakan Serge Proulx, Guillaume Latzko-Toth, bahwa batas keduanya

*The boundaries are blurred, and so, in a certain sense, their reality may be considered virtual. But let us not fool ourselves: virtuality should not be understood as a distortion of the social, but as one of its aspects, an optical effect of its growing complexity, amplified by its own technological artifacts*⁷.

Kajian seperti ini akan mendorong tumbuhnya perhatian dan pemaknaan yang semakin baik terhadap dunia maya dan demokratisasi di Indonesia.

2.5 Analisis Wacana Kritis dan Hubungan Kekuasaan

Analisis wacana kritis menurut Dedy Nur Hidayar (dalam kata pengantar, Eriyanto, 2001) merupakan dasar dari *critical cultural studies* yang melihat produksi, distribusi dan distribusi budaya yang biasanya dalam bentuk dominasi dan subordinasi. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah hubungan kekuasaan yang tidak setara dalam tiga bentuk yaitu kelas, ras/etnis, dan gender.

⁷Serge Proulx, Guillaume Latzko-Toth, 2005, “Mapping the Virtual in Social sciences, on the Category of “Virtual Community” dalam *The Journal of Community Informatics*, (2005) Vol. 2, Issue 1.

Wacana Klasisme

Ideologi kelas pada umumnya merepresentasikan kelas atas dan merendahkan kelas pekerja (bawah). Pada media konvensional aksesibilitas kelas yang di atas terhadap media lebih tinggi daripada yang di bawah. Oleh karena itu, masyarakat kelas atas lebih banyak hadir sebagai narator dalam media. Kelas bawah bisa saja bukan diartikan sebagai kelas pekerja tetapi orang biasa (*ordinary people*), sedangkan kelas atas bisa diartikan sebagai orang yang memiliki penghasilan tinggi seperti profesional dan pengusaha ataupun seseorang yang memiliki kelas sosial tinggi seperti kaum bangsawan.

Wacana Etnisitas dan Rasisme

Van Dijk et al. (1999) melihat perbedaan budaya seperti perbedaan etnis dan ras dalam masyarakat seringkali dituangkan dalam bahasa atau wacana dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dipahami mengingat antarkelompok yang berbeda, baik etnis maupun ras tersebut saling berinteraksi. Masing-masing kelompok memiliki norma, nilai, dan bahasa sendiri, karena harus berinteraksi masing-masing kelompok harus saling memahami antarkelompok satu dengan kelompok lain. Tetapi terkadang interaksi antarkelompok dalam masyarakat tidaklah semulus itu, perbedaan budaya dapat menimbulkan salah pengertian antarkelompok yang pada akhirnya menimbulkan konflik etnis, syak wasangka, xenophobia, etnosentrisme, antisemitisme, dan rasisme.

Wacana Feminisme

Wacana feminisme merupakan sebuah analisis yang melihat bagaimana perempuan ditampilkan dalam teks. Teks pada umumnya mengandung bias. Penggambaran perempuan dalam teks seringkali mengandung unsur yang memarginalkan perempuan. Dalam model analisis Mills, perempuan seringkali hanya ditampilkan sebagai objek penceritaan dan bukan sebagai subjek. Karena posisinya sebagai objek maka representasi perempuan dalam teks diwakili oleh orang lain (dalam hal ini pada umumnya oleh laki-laki).

Hal tersebut bisa terjadi apabila satu kelompok memiliki kekuasaan lebih atas kelompok lain memiliki hak lebih atas sumber daya dibanding dengan kelompok lain. Perbedaan ini akan melegitimasi dominasi atas satu kelompok terhadap kelompok lain. Wacana antarkelompok dalam masyarakat dapat dikategorikan dalam tiga bentuk:

- Wacana dalam kelompok: yaitu wacana yang ditandai satu kelompok etnis.
- Wacana antarkelompok: yaitu wacana antarbudaya antarkelompok yang berbeda.
- Wacana dalam kelompok tentang kelompok lain: yaitu bagaimana anggota dari kelompok yang dominan berbicara tentang kelompok lain (minoritas).

Perbedaan budaya dapat meningkatkan kesalahpahaman yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Penyebabnya lebih banyak karena adanya perbedaan konteks, seperti pemahaman terhadap budaya, ideologi, norma, nilai, hubungan kekuasaan atau peran antaranggota kelompok dan situasi sosial. Konflik antarkelompok (mayoritas-minoritas) memerlukan penjelasan dalam konteks yang luas seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, bisa dipahami bagaimana kelompok mayoritas membicarakan kelompok minoritas dan mereproduksi pola-pola syak wasangka dan rasisme. Teks intra dan antarbudaya didukung oleh institusi yang dominan seperti negara, media massa, dan sekolah.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Wacana Kelas Sosial dalam Dunia Maya pada Pilpres Indonesia Tahun 2009

3.1.1 Pengantar

Penggunaan internet sebagai medium politik alternatif sebetulnya menjadi umum dalam konteks perlawanan terhadap rezim. Keutamaan alat ini ialah tidak bisa dijangkau oleh kekuasaan politik karena wataknya yang virtual (Patria, 2010: 27). Lantas, dia melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan: apakah yang bisa dipetik dari gejala berpengaruhnya jejaring sosial dalam politik Indonesia? Fakta yang bisa dikedepankan dari peran internet dalam politik di Indonesia, terutama dalam konteks gerakan sosial, adalah terbukanya ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas akibat menguatnya infrastruktur teknologi. Indonesia benar-benar sedang berada di pintu revolusi digital.

Proses politik dan makna demokrasi di Indonesia pada zaman reformasi ini tentu berbeda jauh dibanding zaman Orde Baru. Media, baik cetak, elektronik, maupun ruang *cyber* menjadi wahana tersendiri untuk kondisi kekinian. Wahana itu mengubah proses politik di Indonesia yang tidak bisa lagi bertumpu pada cara-cara konvensional karena semua bisa dilakukan dalam ruang-ruang *cyber*, jalur-jalur *on-line*, *teleconference*, *Net Meeting* atau *Talk Show* di televisi dan siaran langsung radio. Ada beberapa keuntungan atas munculnya tren seperti itu meskipun tidak dapat disangkal bahwa sejumlah kekurangan, bahkan kejelekan juga muncul dari wahana seperti itu.

Salah satu keuntungan yang bisa ditangguk dari pemanfaatan pesatnya perkembangan media ialah wahana itu dapat menjadi tempat persemaian peran warga negara dalam proses demokrasi. Artinya, partisipasi masyarakat dalam membicarakan politik di negaranya sendiri tersalurkan melalui wahana tersebut, apalagi didukung oleh kebebasan

berekspresi dalam batas-batas tertentu. Meskipun begitu, partisipasi masyarakat dalam proses politik melalui wahana media, terutama internet memang tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena pengguna internet di Indonesia diperkirakan baru sekitar 10% dari jumlah penduduk. Hal itu berdampak terhadap munculnya disparitas sosial maupun disparitas politik. Disparitas itu muncul karena adanya perbedaan kelas di Indonesia. Bagian ini memaparkan wacana “kelas” dalam ruang maya yang hadir di *blog* atau *web* pada pilpres di Indonesia 2009.

Tulisan ini akan dimulai dengan paparan betapa sulitnya mendefinisikan “kelas sosial” meskipun setiap masyarakat secara sadar maupun tidak sadar membuat klasifikasi kelas sosial dalam struktur sosial mereka. Setelah itu, tulisan ini beranjak pada pembahasan hasil analisis *blog* dalam bentuk interterkstualitas sehingga dapat terhubungkan pemaknaannya dengan iklan yang terkait. Bahasan mencakup aspek kelas bawah dalam kaitannya dengan BLT dan kemiskinan, klasifikasi desa vs kota, dan klasifikasi orang pintar vs orang bodoh dalam dunia maya.

3.1.2 Kelas Sosial: Masalah dalam Pendefinisian

Setakat ini banyak orang menggunakan istilah kelas sosial yang seakan-akan konsep itu begitu mudah didefinisikan. Namun, sebenarnya mendefinisikan kelas sosial untuk kepentingan kajian tidak semudah mendefinisikan kelas sosial dalam percakapan keseharian.

Adanya istilah kelas sosial mengandaikan bahwa masyarakat dapat dikelompokkan atau dibagi-bagi berdasar kelasnya karena sering kita dengar adanya pengelompokan kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Andaian itu mempraanggapkan bahwa orang yang masuk pada tingkat tertentu, katakanlah kelas sosial atas, memiliki kesamaan satu sama lain dan mereka akan memandang satu sama lain memiliki posisi yang setara dan mereka juga akan memiliki kesamaan pandangan ciri seperti apa dari kelompok yang berbeda dengan kelompok mereka sebagai orang kelas atas.

Biasanya kita kalau diminta untuk megelompokkan masyarakat ke dalam kelas, kita akan membedakannya menjadi kelas “atas,” “menengah,” dan “bawah.” Namun, ketika kita diminta untuk menjelaskan apa tepatnya yang membedakan antarkelas tersebut, muncul masalah pendefinisian yang kompleks. Beberapa penelitian survei telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor sosial tertentu yang menentukan kelas sosial. Sebagai contoh sebuah survei yang dilakukan pada tahun 1997 di London (dalam Jones, 1999: 209). Laporan dari survei itu menunjukkan bahwa ada hubungan antara kawasan tempat tinggal dengan peluang untuk masuk ke kampus tertentu dan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa untuk mengetahui kelas sosial seseorang, kita dapat mengetahui dengan melihat alamatnya.

Kriteria lain yang bisa digunakan untuk mendefinikan kelas sosial adalah kekayaan. Ini kriteria yang langsung muncul dalam benak sebagian besar orang ketika ditanya masalah kelas sosial. Pandangan yang menyamakan antara kelas sosial dengan kekayaan adalah pandangan populer (Jones, 1999: 210). Tetapi, benarkah demikian? Kesulitan yang muncul kalau kelas menengah dianggap semata-mata sebagai kelas berduit adalah bahwa bukan kelas menengah saja yang punya banyak duit. Sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 1997 mengusulkan sebuah skema klasifikasi baru untuk pembagian kelas sosial di Inggris. Skema ini membagi kelas sosial berdasar jenis pekerjaan. Berbeda dengan skema-skema sebelumnya, skema ini memasukkan golongan baru ke dalam skema, yaitu golongan pengangguran. Skema baru itu dapat dikemukakan sebagai berikut.

- Kelas 1 : Profesional dan manajer senior, seperti dokter, pengacara, guru, manajer lembaga keuangan, direktur eksekutif, profesor, editor, manajer yang membawahi lebih dari 25 staf, dan pejabat tinggi pemerintahan.
- Kelas 2 : Asisten profesional dan manajer junior, seperti perawat, pekerja sosial, agen real estat, teknisi laboratorium, supervisor, manajer yang membawahi kurang dari 25 staf, wartawan, selebritas dalam dunia hiburan, dan aktor.

- Kelas 3 : Pekerjaan-pekerjaan level menengah, seperti manajer penjualan, sekretaris, perawat di tempat penitipan anak, operator komputer, dan asisten panggung.
- Kelas 4 : Nonprofesional dan wiraswasta, seperti instruktur kelas mengemudi, dan mandor bangunan.
- Kelas 5 : Pekerjaan supervisi lain dan kerajinan: mandor bawahan, tukang ledeng, dan tukang reparasi telepon.
- Kelas 6 : Pekerjaan-pekerjaan rutin, seperti supir truk, dan pekerja di bagian perakitan.
- Kelas 7 : Pekerjaan-pekerjaan sederhana: buruh, pelayan, dan tukang bersih-bersih.
- Kelas 8 : Pengangguran.

Satu hal yang bisa diperhatikan dari daftar jenis pekerjaan tersebut di Inggris ialah makin rendah kelasnya, makin rendah gajinya. Secara sekilas tampak bahwa semakin besar gajinya, semakin tinggi kelas sosialnya. Akan tetapi, sebenarnya beberapa pekerjaan tertentu di kelas bawah dalam klasifikasi di atas menghasilkan gaji yang lumayan besar. Demikian pula sebaliknya. Seorang tukang ledeng, misalnya, termasuk ke dalam kelas sosial rendah, tetapi gajinya lumayan tinggi. Sementara itu, pekerjaan yang termasuk kelas tinggi seperti perawat atau pekerja sosial, gajinya tidak tinggi. Oleh karena itu, jika kekayaan dianggap sebagai faktor utama untuk menentukan kelas sosial, akan terjadi kerancuan. Laporan tersebut mengakui adanya kerancuan ini sehingga klasifikasi kelas sosial yang diusulkannya didasarkan pada level tanggung jawab dari pekerjaan, yaitu apakah orang “memberi perintah atau diperintah” dan bukan diukur berdasar gajinya.

Memang sulit menentukan kelas sosial hanya dengan mengandalkan satu kriteria saja karena beberapa kriteria di atas memiliki hubungan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, kawasan tempat tinggal seseorang memiliki hubungan dengan tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan. Sementara itu, jenis pekerjaan memiliki hubungan dengan tingkat pendidikan, dan tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang seringkali dipertimbangkan dalam mendefinisikan kelas

sosial. Semua faktor tersebut memiliki hubungan sendiri-sendiri dengan gender dan etnisitas.

Menarik untuk mencermati hubungan kelas sosial dengan status, kekuasaan, dan pembuatan keputusan seperti dikemukakan Wolfram dan Schilling-Estes dalam Jones (1999: 213).

Pada akhirnya, pembedaan kelas sosial akan didasarkan pada status dan kekuasaan, di mana status adalah besarnya rasa hormat yang diberikan kepada orang dan kekuasaan adalah besarnya sumber daya sosial dan sumber daya material yang bisa dikendalikan oleh seseorang dan sekaligus kemampuan untuk membuat keputusan dan memengaruhi kejadian.

Penjelasan itu menunjukkan adanya hubungan politis antara kelas sosial dengan kekuasaan. Oleh karena itu, wacana kelas sosial dapat dibahas berkaitan dengan bagaimana sebuah partai menganggap diri dan dianggap oleh kalangan lain dalam hubungannya dengan kelas sosial tersebut.

3.1.3 BLT, Kemiskinan, dan Masyarakat Kelas Bawah

BLT menjadi objek diskusi yang menarik di ruang maya karena adanya tarik ulur BLT oleh SBY sebagai pelaksana dan kubu Megawati. BLT diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang identik dengan wong cilik, padahal wong cilik diidentikkan dan diklaim sebagai basis pendukung kubu Megawati melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu tampak dalam komentar pada *blog* “*Say No To Megawati.*”

Bener sekali.. gak ada alasan kita untuk memilih ibu itu. Kegagalannya udah tergambar jelas.. nyata dan bukan rekayasa. kalau memang dia mau menyumbang hasil pemikiran, jangan cuma menjelek2an pak SBY dong. **BLT lagi BLT lagi.**

Haa...ha...kena batunya tuh Mega, soalnya di tempat gue yang dapat BLT justru orang-2 PDIP. Trus gimana kata-2 Mega

kemarin: “Penerima BLT telah kehilangan harga diri....!”
Sama dengan ngatain anak buahnya sendiri dong.

Partisipan dalam *blog* di atas mengamati bahwa Megawati secara tidak langsung menyudutkan pendukungnya. Megawati dalam berbagai iklannya mengatakan bahwa “Penerima BLT telah kehilangan harga diri.” Para penerima BLT yang pasti adalah kelas bawah alias wong cilik yang diklaim sebagai pendukung terbesar PDIP. Dengan mengatakan seperti itu, berarti para pendukung PDIP yang menerima BLT tidak memiliki harga diri. Namun, dalam iklan-iklan belakangan berbeda dengan komentar-komentar pedas terhadap kebijakan pemberian BLT kepada masyarakat. Hal itu tampak pada contoh iklan PDIP sebagai berikut.

3.1.3.1 Teks Iklan PDIP

- (1) PDIP turun ke lapangan
- (2) Berbaur dengan rakyat, mendengar keluhan
- (3) Menyerap aspirasi dan memastikan bahwa Bantuan Langsung Tunai diterima oleh yang berhak
- (4) A: Alhamdulillah BLT telah saya terima
- (5) B: PDIP memang partainya *wong cilik*

Secara sintaktis, subjek pada keseluruhan iklan ini tampak selalu berhadapan dengan predikat yang menyatakan peran atau makna *perbuatan* seperti *turun*, *berbaur*, *mendengar*, *menyerap*, dan *memastikan*. Perbuatan tersebut dilakukan seluruhnya untuk rakyat (objek). Hasil dari perbuatan tersebut adalah dihadapkannya subjek pada predikat yang bermakna *pengenal*, yang menjawab “apa dan siapa” subjek ini (partainya *wong cilik*). Kata penghubung *bahwa* digunakan untuk menguatkan isi atau uraian kalimat yang berada di depannya, yakni penerimaan dana BLT akan terus dijaga dan diawasi distribusinya sehingga sampai kepada mereka yang berhak.

Secara semantik, pada masa kampanye partai politik berlomba-lomba merangkul simpati rakyat. Simpati tersebut tidak mungkin diraih dengan adanya “jarak” antara mereka dengan rakyat. Karenanya, bahasa

iklan yang dipakai pun tidak urung turut merepresentasikan “kedekatan” tersebut, tidak terkecuali iklan ini. Klausa *turun ke lapangan* pada kalimat (1) adalah personifikasi dari konsep “bergerak ke arah bawah” atau “bergerak ke tempat yang lebih rendah dari tempat semula”. Artinya, dalam hal ini pemerintah sebagai *elit* politik yang menempati hierarki atas dalam lapisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara *turun ke lapisan bawahnya* (rakyat). Klausa *turun ke lapangan* merupakan konotasi dari masuknya *elit-elit politik* PDIP tersebut ke dalam hidup masyarakat/medan kehidupan yang sesungguhnya. Klausa tersebut didukung oleh kata *berbaur* yang terdapat pada kalimat kedua, yang berarti kader PDIP berusaha masuk ke dalam lingkungan pergaulan masyarakat untuk menyelami kesulitan hidup masyarakat, menyesuaikan diri, dan berdifusi dengan meniadakan sifat-sifat eksklusif tadi.

Tidak hanya itu, pembauran yang dilakukan PDIP memiliki misi untuk *mendengar keluhan, menyerap aspirasi rakyat, dan memastikan* bahwa BLT diterima oleh yang berhak. *Mendengar keluhan* merupakan konotasi dari mengindahkan, memperhatikan (untuk kemudian dituruti dan dilaksanakan) keluhan rakyat atas permasalahan-permasalahan hidupnya. *Menyerap aspirasi* merupakan tindak lanjut dari *mendengar keluhan*, yakni mengendapkan dalam diri, harapan, tujuan, cita-cita, hasrat, dan keinginan rakyat atas keberhasilan hidup di masa yang akan datang (tentu saja untuk kemudian harus diupayakan agar cita-cita tersebut dapat terwujud).

Kedua misi tersebut masih berupa tindakan moral. Di akhir kalimat iklan ini akhirnya disebutkan tindakan riil yang dilakukan PDIP, yakni *memastikan* bahwa BLT diterima oleh yang *berhak*. Artinya, menjaga distribusi (menjanjikan ketegasan dengan sepenuh hati) penerimaan BLT kepada mereka yang *berhak* (mereka yang memiliki hak, pemilihan, dan pewenangan untuk menerima itu, dalam hal ini adalah masyarakat miskin) agar tidak sampai kepada orang-orang yang salah, tidak berwenang, tidak berkeperluan, dan rakah.

Sejak awal, tampak Megawati Soekarnoputri adalah salah satu yang paling frontal mengkritik kebijakan BLT di samping Prabowo

Subianto. Mega menyebut program BLT hanya akan membuat rakyat menjadi malas dan mendidik rakyat menjadi penggemar. Semestinya, menurut Mega, dana yang ada tidak diberikan secara langsung kepada rakyat, melainkan disalurkan melalui proyek-proyek pembangunan yang dapat memberdayakan masyarakat secara berkesinambungan. Namun demikian, pada realitasnya rakyat yang miskin tentulah akan menyambut dengan “gembira” program BLT dan menganggap pemerintahan SBY sangat pemurah karena membagi-bagikan uang. Terlepas dari transparan tidaknya proses distribusi yang dilakukan, program ini menempatkan SBY beserta partai Demokratnya sebagai partai yang pro rakyat di mata masyarakat yang tidak memahami persoalan dengan sebenarnya.

Khawatir kebijakan bagi-bagi uang melalui BLT yang dilakukan pemerintah SBY dapat mendongkrak citra partai Demokrat dan SBY dan melemahkan suara partainya, PDIP akhirnya berubah sikap terhadap program BLT. Melalui iklannya, PDIP justru melancarkan klaim bahwa kesuksesan pembagian BLT tidak lepas dari kerja keras mereka dan (turut) menyatakan bahwa PDIP sebagai partai yang memiliki fraksi di DPR juga ikut terlibat dalam memproses pembahasan dan pembentukan inisiatif BLT tersebut.

Yang terjadi dalam iklan ini, tidak lain adalah salah satu upaya PDIP meraih simpati rakyat dengan menjadi *polisi distribusi* terhadap pembagian BLT dengan dalih bahwa uang negara adalah uang rakyat sehingga harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat serta hendaknya kesulitan rakyat tidak dimanipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek. Semua yang diusung dalam iklan tersebut tentu saja untuk menyugestikan tidak adanya jarak antara *elit-elit* politik partai (subjek) dengan rakyatnya (objek).

Berdasar apa yang telah dilakukan PDIP di atas, kalimat (5) merupakan simpulan yang membenarkan bahwa PDIP berhak diklaim sebagai partai *wong cilik* (orang kecil/rakyat kecil). Hal itu ditunjukkan dengan kata *memang*. Frasa idiomatis *wong cilik* tersebut tidak berarti PDIP adalah partai kecil, melainkan sebuah konotasi untuk menyebut diri sebagai partai yang mengerti kebutuhan dan hajat hidup rakyat kecil

(masyarakat ekonomi kalangan bawah). Penggunaan frasa *wong cilik* tidak lain adalah strategi PDIP (dan tentu saja partai lain) untuk membidik pasar suara “masyarakat desa” sebagai jumlah pemilih terbesar karena kemiskinan terbesar diderita oleh orang desa. Kata ini juga dipilih untuk mempersempit “jarak” antara *elit* politik sebagai subjek pemerintahan dan rakyat sebagai objeknya dalam rangka meraih sebanyak-banyaknya suara pada Pemilu nanti.

Dalam kajian simbol dan indeks, iklan PDIP yang mengawasi pemberian BLT menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- *Turun ke lapangan* (1) adalah simbol dari pendekatan elit-elit parpol terhadap rakyat.
- *Berbaur dengan rakyat* (2) adalah simbol dari bersatunya elit partai PDIP dengan masyarakat.
- *Wong cilik* (5) adalah indeksikal dari sikap politik PDIP yang turun ke lapangan, berbaur dengan rakyat, mendengar keluhan, dan menyerap aspirasi rakyat.

Melihat iklan yang dimunculkan kubu Megawati itu, para partisipan dalam *blog Say No To Megawati* berkomentar sebagai berikut.

Saya *Say No To Mega* karena: “Bu Mega dengan keras menolak adanya BLT di setiap kampanyenya karena dianggap memberikan ikan bukan pancing ke rakyat”,TAPI FAKTANYA...

Sekarang malahan mengawasi distribusi BLT, itu kan sama saja menyetujui??? yg konkrit dunk . . .

“Udah gitu bikin iklan mengawasi BLT rakyat dan bilang: “terima kasih PDIP”, emang yang ngasih BLT itu PDIP ya? bukannya pemerintah??”,TANYA KENAPA??

Wah iklannya gak sinkron nih ma faktanya, yg bener: ”TERIMA KASIH PEMERINTAH ATAS BLT-nya.” Bener ga????? Tiap kali PEMERINTAH naikin harga BBM selalu dihujat, tapi tiap kali BBM turun ga ada yg mau bilang TERIMA KASIH... Mari budayakan bilang TERIMA KASIH PEMERINTAH...

Partisipan lain dalam *blog* itu mengomentari bahwa PDIP dan Megawati plin-plan karena semula menolak BLT, namun pada akhirnya menganggap diri berjasa atas penyaluran BLT. Hal itu tampak dalam komentar berikut.

Begitulah kalo orang yg ga' berpendidikan ngomong ^_^
dulu BLT dianggapnya pembodohan masyarakat...
sekarang...lihat aja iklannya ! bener-bener plin-plan...
gimana mo ngatur negara kalo pemimpinnya plin-plan ?

Komentar lainnya ialah

Ia lucu memang, di satu pihak ia menentang BLT, tapi akhirnya justru ikut menyukkseskan, dasar politikussss.... kayaknya itu petanda klo seandainya Mega nanti yang jadi presiden, BLT dihapus, kasian donk org tua yang dapat BLT sekarang.

Sebenarnya BLT ini juga tidak hanya menjadi "balas pantun" antara SBY dan Megawati, tetapi juga Jusuf Kalla (JK). Hal itu tampak dalam salah satu iklan politik JK yang ditayangkan di berbagai media televisi dan juga tersebar di internet.

3.1.3.2 Teks Iklan Golkar

- (1) A: Jadi *masih tetap* pilih Golkar Mas?
- (2) B: Ya pilih Golkar
- (3) A: *Alasannya* apa?
- (4) B: Karena Golkar punya *cara nurunin* harga sembako. *Makanya* pilih Golkar
- (5) C: *Yo* pantes dipilih. *Kulo yo melu* Golkar. *Makanya* pilih Golkar. Golkar serius menggandeng Bulog. *Nek* biaya Bulog turun, harga sembako *dadi* murah. Dapat BLT lagi.
- (6) *Lha*, yang *nggagas* BLT kan Pak Yusuf Kalla
- (7) *Aja lali* ya, contreng caleg dari Golkar

Analisis secara sintaktis pada iklan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

- (1) Jadi masih tetap pilih Golkar (P) Mas?
- (2) *Karena* Golkar (S) punya cara *nurunin* (P) harga sembako (O).
Makanya pilih (P) Golkar (O)
- (3) *Makanya* pilih (P) Golkar (O). Golkar (S) serius menggandeng (P) Bulog (O). *Nek* biaya Bulog (S) turun (P), harga sembako (S) *dadi* murah (P). Dapat (P) BLT (O) lagi.
- (4) *Lha, yang nggagas* BLT (S) kan Pak Yusuf Kalla (P)
- (5) *Aja lali ya, contreng* (P) caleg dari Golkar (O)

Kalimat aktif transitif berpola Subjek-predikat-objek (S-P-O) menunjukkan dengan jelas siapa melakukan apa dan apa yang dilakukannya seperti yang terdapat pada kalimat (2) dan (3). Pola ini penting digunakan untuk menjelaskan jasa dan prestasi Golongan Karya (Golkar). Hal serupa juga terdapat pada kalimat (4) verba yang ditempatkan pada *slot* subjek dan nomina pada *slot* predikat, digunakan untuk menunjukkan dengan tegas siapa aktor sebenarnya.

Secara semantis kalimat pertama dalam iklan ini berupa stimulus Golkar yang dilontarkan pada masa-masa ‘penyembuhan’ mereka dari sakit masa lalu. Klausula masih pilih seolah ingin memastikan masyarakat bahwa apapun yang telah terjadi di waktu lampau tidak memengaruhi kepercayaan rakyat terhadap Golkar yang sudah berkiprah di dunia perpolitikan selama 44 tahun lamanya dan menanam banyak jasa. Klausula masih pilih menunjukan bahwa pilihan masyarakat masih berada pada tempatnya, tidak beranjak dan berpindah pada partai politik lain (JK menyebut para pemilih ini sebagai pemilih tradisional Golkar).

Mengapa demikian? Atas dasar apakah sehingga rakyat masih harus percaya pada Golkar? Dalam hal ini disebutkan satu alasan, karena Golkar memiliki sebuah jalan keluar dari suatu masalah, yakni mahalnnya harga sembako. Sebagaimana kita ketahui, isu sembako ini dimanfaatkan oleh sebagian besar partai dalam kampanye mereka. Dalam iklan ini disebutkan, bahwa Golkar memang pantas dipilih karena Golkar serius menggandeng Badan Urusan Logistik (Bulog) sehingga ketika biaya Bulog turun, harga sembako pun jadi murah.

Seperti yang dikatakan oleh beberapa media, Bulog memang paling berperan dalam pencapaian swasembada beras. Bulog tidak terlibat langsung dalam bisnis pertanian, melainkan hanya dalam urusan pengelolaan pasokan dan harga pada tingkat nasional. Bulog sengaja diciptakan untuk mendistorsi mekanisme harga beras dengan manipulasi untuk memelihara pasar yang lebih kuat.

Tampak isu Bulog dan swasembada beras tersebut sengaja digulirkan untuk mengimbangi isu yang sama dengan yang diusung oleh partai lawan. Dalam iklannya, partai Demokrat mengusung keberhasilan pemerintahan SBY dalam swasembada beras yang dilakukan Indonesia di tengah-tengah situasi ekonomi dunia yang sedang morat-marit. SBY dan Demokrat menyebutkan bahwa pada tahun 2008 Indonesia mencapai surplus beras hingga 3,1 ton. Prestasi tersebut adalah yang pertama kalinya sejak runtuhnya rezim Orde Baru.

Hal serupa juga tampak pada kalimat (6) yang menyebut bahwa BLT adalah gagasan JK. Dalam peluncurannya, program ini menuai banyak kritikan dan kecaman. Namun demikian, setelah program pro rakyat ini dinilai berhasil, masing-masing partai berebut nama baik atas isu ini untuk meraih simpati dan suara rakyat, tidak terkecuali JK. Sebagai penggagas dari program ini, JK merasa dikesampingkan oleh SBY dengan citra partai Demokrat yang lahir pascaprogram ini. Padahal di balik itu semua, JK merasa bahwa ialah penggagasnya. Demi mendongkrak nama partai dan citra dirinya di muka publik, JK pun menyuarakan hal ini pada kalimat (6) *lha, yang nggagas BLT kan pak Jusuf Kalla*. Saran dan himbauan dengan tendensi kuat tersebut ditunjukkan di akhir kalimat sebagai simpulan dari iklan ini, yang dipresentasikan dengan penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan akibat, *makanya*.

Partisipan dalam *blog Say No To Megawati* juga tidak semuanya setuju dengan BLT yang diberikan kepada masyarakat kelas bawah. Hal itu terbukti dengan komentar mereka sebagai berikut.

Ya iya... SBY dan Budiono tuh yg nipu rakyat... kasih BLT.....tp semua harga di naekkan...ngasih nya 100rb utk 1

keluarga miskin utk satu bulan..tp dinaekan biaya hidup standar masryakat Indonesia seharga 100rb utk 1 hari...e..ga tau nya...wakil nya skrng dan malah meteri nya...di suruh ngambil uang rakyat

Berbagai komentar dan iklan serta pembahasan di internet seperti di atas menunjukkan bahwa program BLT untuk kelas bawah sempat menjadi bahan polemik dalam kampanye pilpres 2009 lalu seperti layaknya orang Melayu yang berbalas pantun. Mega-Prabowo mengkritik kebijakan pemberian BLT oleh pemerintah saat itu sebagai sekadar praktik bagi-bagi hadiah atau oleh-oleh yang sama sekali tidak diperlukan, apalagi menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

Polemik dan “balas pantun” tentang BLT sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintahan SBY mengundang banyak diskusi di antara para pakar ekonomi yang mengulasnya melalui media. Wahyu Prasetyawan (2009: 11), salah seorang ekonom, menyatakan sebenarnya BLT bukanlah isu pokok dalam ekonomi. Akan jauh lebih melenceng lagi jika para calon presiden tersebut hanya mengandalkan BLT sebagai indikator ekonomi yang membela kepentingan rakyat miskin (*pro-poor*). Lalu muncul pertanyaan: apakah BLT dapat dikatakan sebagai kebijakan ekonomi yang membela kepentingan rakyat miskin? Jawabannya hampr pasti: tidak. Alasannya, BLT hanya merupakan salah satu bagian kecil dari kebijakan ekonomi yang mungkin saja membela kepentingan rakyat miskin. BLT masih jauh untuk dapat dikatakan sebagai kebijakan ekonomi yang memihak rakyat miskin.

Prasetyawan (2009) menyarankan kepada para calon presiden agar harus lebih serius lagi memikirkan program ekonominya jika memang ingin merumuskan suatu kebijakan ekonomi yang memihak rakyat miskin. Perdebatan mengenai BLT, apalagi jika itu dimaksudkan sebagai cara untuk membela rakyat miskin, jelas menyesatkan karena beberapa hal. **Pertama**, dengan BLT rakyat tdak secara langsung terlibat dalam kegiatan ekonomi. **Kedua**, BLT hanya dimaksudkan sebagai kebijakan *ad hock* yang bertujuan memperkuat daya beli rakyat miskin untuk jangka waktu tertentu. **Ketiga**, BLT tidak bersifat permanen.

Singkatnya, BLT memang bukan kebijakan ekonomi. Ia hanya merupakan implementasi kebijakan ekonomi dan kebijakan ekonomi tersebut bisa saja tidak berpihak kepada rakyat miskin.

Khudori (2009: 10) menyatakan bahwa pemberian BLT kepada rakyat miskin merupakan salah satu program antikemiskinan untuk kelompok pertama karena pada era pemerintahan SBY yang pertama, program antikemiskinan dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama berupa bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu. Sebagai contoh, penyediaan beras untuk rakyat miskin (raskin), Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Operasional Sekolah. Selain itu, ada bantuan bagi lanjut usia dan cacat ganda terlantar, bantuan bencana alam, **BLT** sebagai kompensasi kenaikan harga BBM serta beasiswa untuk anak dari rumah tangga kelompok sasaran.

Makna di balik perdebatan melalui media dan *blog* di atas ialah BLT sebagai program kebijakan pemerintah SBY dan sekaligus calon presiden untuk kedua kali pada Pemilu 2009 merupakan kebijakan yang “mempolitisasi kemiskinan.” Upaya itu ditanggapi dengan serius oleh kompetitornya pada Pemilu 2009, baik melalui iklan politik, diskusi di ruang maya, dan juga dalam kampanye terbuka.

3.1.4 Desa vs Kota

Partisipan dalam *blog Say No To Megawati* juga membuka perdebatan tentang desa versus kota. Partisipan ini mempraanggapkan bahwa pendukung dan pemilih Megawati dan PDIP adalah orang-orang desa yang di pelosok. Hal itu tampak dalam komentar berikut ini.

Pemilih Megawati adalah kebanyakan orang2 yang masih di pelosok yang masih sedikit terbelakang dalam pengetahuan politik (Jawa Tengah dan Bali adalah lumbung suara Mega). Kebanyakan mereka melihat Megawati karena sosok Bapaknya Ir. Soekarno !!!!
Tetapi, di kota besar yang masyarakatnya sudah berpendidikan nama Megawati gak bakal laku.

Komentar itu menunjukkan adanya wacana kelas sosial yang mempraanggapkan bahwa orang desa tidak berpendidikan sehingga tidak mengetahui perkembangan politik. Akibatnya, mereka memilih Megawati karena tidak mengetahui ada kandidat lain. Partisipan dalam *blog* ini mengontraskan orang desa dengan orang kota yang berpendidikan. Barangkali, partisipan *blog* ini tidak menyadari bahwa jumlah penduduk Indonesia terbesar justru berada di perdesaan dan bukan diperkotaan. Oleh sebab itu, orang desa dan lingkup perdesaan menjadi objek perebutan suara dalam Pemilu oleh sejumlah partai politik. Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, gencar mengampanyekan pentingnya pembangunan di perdesaan karena PAN menyadari besarnya potensi suara dari perdesaan. Hal itu tampak dalam salah satu iklannya sebagai berikut.

3.1.4.1 Teks Iklan PAN

- (1) Partai Amanat Nasional akan memperjuangkan *anggaran 1 miliar rupiah per tahun untuk tiap desa*
- (2) Mari kita bangun Indonesia *dari desa*
- (3) Kita dapat mewujudkan karena kita *mampu*
- (4) Untuk *Indonesia baru* pilih PAN nomor 9

Analisis sintaktis dari iklan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

- (1) Partai Amanat Nasional (**S**) akan memperjuangkan (**P**) anggaran 1 miliar rupiah per tahun (**O**) untuk tiap desa (**K**)
- (2) Mari kita (**S**) bangun (**P**) Indonesia (**O**) dari desa (**K**)
- (3) Kita (**S**) dapat mewujudkan (**P**) *karena* kita mampu (**K**)
- (4) Untuk Indonesia baru (**K**) pilih (**P**) PAN nomor 9 (**O**)

Kalimat aktif transitif berpola S-P-O tampak memegang banyak fungsi pada kalimat di iklan ini seperti kalimat (1) dan (2) yang bermakna aktor melakukan suatu perbuatan terhadap objeknya. Namun, hal menarik justru terdapat pada *slot* keterangan yang memegang peranan penting bagi predikatnya. Dalam hal ini, *desa* menempati keterangan yang menyatakan makna tujuan pada kalimat (1) dan makna

tempat pada kalimat (2). Hal ini digunakan untuk membuat predikat menjadi lebih spesifik agar program-program PAN dinilai memiliki kekhasan.

Analisis semantis iklan tersebut menunjukkan bahwa PAN berjanji akan mengupayakan dengan sepenuh hati susunan rencana keuangan sebesar *1 miliar rupiah per tahun untuk setiap desa*. Penggunaan partikel *per* menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara kontinyu dan terus menerus. *Untuk setiap desa* bermakna masing-masing desa pasti memperolehnya. Kalimat ini memiliki sugesti besar, sebab angka yang disebut di atas tampak sangat dramatis terhadap sebuah kesatuan wilayah kecil yang berkonotasi udik/dusun. Lebih lanjut, janji ini akan memenuhi angan-angan kolektif bahwa dengan memilih PAN, kesejahteraan akan sangat mungkin dicapai dari bagian yang paling kecil sekalipun (desa). Selain itu, jika diteliti dengan cermat, tampak bahwa kalimat ini tidak hanya bermakna stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat skala kecil, melainkan diperoleh kesan bahwa jika PAN memenangkan Pemilu akan ada acara bagi-bagi uang 1 miliar di desa-desa dalam setiap tahunnya. Pertanyaannya, benarkah subsidi infrastruktur merupakan satu-satunya yang dibutuhkan masyarakat desa di negara kita?

Kebijakan ini, akan ditempuh oleh PAN jika mereka memenangkan Pemilu legislatif dengan meraih 100 kursi di DPR atau sekitar 15% suara. PAN menyebutkan bahwa jika target tersebut tercapai, mereka akan mengupayakan agar anggaran tersebut bertambah setiap tahunnya. Program ini dilakukan guna mengentaskan kemiskinan di desa-desa dengan cara mendidik pemuda pemudi desa agar memiliki keterampilan membangun desa sehingga perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk mencari pekerjaan lambat laun akan terhenti. Selanjutnya, jika pembangunan infrastruktur desa telah baik, diharapkan para pemuda kota akan kembali ke desanya untuk membangun kampung halamannya.

Sesungguhnya, kebijakan ini merupakan kritik terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya yang memberikan stimulus Rp70

triliun rupiah terhadap segelintir perusahaan swasta yang nyaris bangkrut. Bagi PAN ini dinilai tidak adil, sebab sekitar 90% peredaran uang di Indonesia terjadi di kota-kota besar khususnya Jakarta sedangkan 65% penduduk negeri ini berada di perdesaan.

Rencananya, PAN akan mengambil 10% dari APBN yang dikhususkan untuk membangun desa atau Rp100 triliun per tahunnya. Pembangunan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk bank desa yang berfungsi sebagai pengelola anggaran pemerintah guna menghidupkan kegiatan perekonomian masyarakat. Bank desa ini dipandang berpotensi untuk menjadi pintu utama yang mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh tingkatan wilayah.

Memulai sesuatu dari bagian kecil ini juga ditunjukkan pada kalimat (2) *dari desa* yang berupa kata depan yang menyatakan tempat permulaan atau asal kedatangan, maksudnya adalah desa merupakan soko guru keberlangsungan sebuah negara. Tampak di sini PAN berusaha merangkul sudut terkecil dan lapisan terbawah masyarakat sebagai pasar suara terbanyak dari keseluruhan penduduk Indonesia, sebab desa, hingga saat ini masih bermakna sebuah kesatuan wilayah kecil, masyarakat tradisional, dan kalangan kelas bawah.

Bangun Indonesia dari desa yang terdapat pada kalimat (2) menggunakan *totem pro parte* untuk mewakili sebagian yang kecil dalam keseluruhan atau kesatuan yang besar. Tentu dengan demikian, efek yang dihasilkan pun akan lain. Membangun Indonesia dari desa akan terdengar sebagai suatu simplifikasi upaya terhadap hal yang besar, apalagi di sana juga disebutkan bahwa pembangunan hal besar tersebut bukan tidak mungkin dilakukan dari sesuatu yang kecil (desa).

Di akhir iklan PAN meyakinkan agar rakyat tidak pesimis terhadap mimpi itu, karena sesungguhnya kita bisa, kita sanggup, dan kita memiliki kuasa untuk mewujudkannya (kita *mampu*). Sebagai partai yang reformis, PAN pun mengusung frasa *Indonesia baru* yang mempresentasikan perubahan (tentu saja perubahan menuju Indonesia yang lebih baik).

Iklan PAN di atas secara simbolik dan indeks menunjukkan hal bahwa *dari desa* adalah simbol sentralisasi pada Era Orde Baru di mana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di kota-kota besar. Oleh karena itu, di era ini PAN akan lebih memperhatikan desa sebagai soko guru bangsa.

3.1.5 Petani dan Wong Cilik VS Kelas Menengah ke Atas

Petani menjadi objek pembahasan menarik dalam *facebook* atau *blog* di internet. Hal itu dapat dipahami karena petani dapat digunakan sebagai lumbung suara bagi partai dan kandidat presiden mengingat jumlah terbesar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani di perdesaan. Hal itu tampak dalam komentar salah satu partisipan dalam *blog*.

Denger2 bliau nya terpengaruh juga sama koment2 di *blog* ini..hahaha.. takut nih yee? Kenapa takut kalo memang dia gak cuma ngumbar janji.. Sembako murah... mimpi kalee... dikira rakyat bodoh apa..bisa mnurunkan sembako begitu saja..lantas siapa yg mau dikorbankan..PETANI???

Meninjau pasar juga ngacir..karena diajak salaman sama WONG CILIK. Takut tangannya kotor ya Bu Mega???

Komentar lainnya sebagai berikut.

Memperjuangkan sembako murah utk rakyat kecil ????
kalau sembako murah yg tetep menderita para petani, pelaut, dll Bu.

kita tidak perlu sembako murah tapi harganya yg wajar, itu saja. petani, pelaut, dll menjerit BU, kalau harga beras, ikan, dll murah.

Komentar itu menunjukkan sinisme partisipan dalam *blog* kepada Megawati karena ada keterkaitan erat antara turunnya harga sembako, terutama harga beras dengan petani. Alasannya, penentuan harga beras sangat bersifat politis. Jika harga beras rendah, petani akan terpukul dengan sendirinya karena biaya produksi tidak akan sebanding dengan harga jual. Jika harga beras dinaikkan, belum tentu masyarakat Indonesia dan kelompok petani sendiri mampu membeli beras karena

kategori “petani” di Indonesia termasuk petani gurem dan petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri untuk bertani. Sayangnya, penghargaan kepada petani sangatlah kecil. Hal itu bisa kita lihat pada iklan-iklan politik antarkandidat presiden dan partai politik, salah satunya iklan SBY dan partai Demokrat di bawah ini.

3.1.5.1 Teks Iklan Partai Demokrat

- (1) SBY: Untuk pertama kalinya sejak Orde Baru produksi beras nasional lebih tinggi dari konsumsi beras kita.
- (2) Petani A: **Penghasilan kami membaik (suara petani)**
- (3) Petani B: Siapa dulu presidennya?
- (4) Petani A dan B: SBY
- (5) MVO: **Partai Demokrat terus mendukung kebijakan pemerintahan Presiden SBY yang mendukung kebijakan swasembada beras**
Pilih Partai Demokrat Nomor 31
Mari kita dukung terus! Lanjutkan!
Ket. MVO: Male Voice

Mitos yang diciptakan melalui iklan ini adalah Partai Demokrat sebagai partai yang memperhatikan dunia pertanian, termasuk para petaninya.

Kalimat (1) tentulah dipahami sebagai klaim prestasi SBY dan Partai Demokrat di era pemerintahannya lima tahun ke belakang, berupa kebijakan swasembada beras. Sejak dahulu, Indonesia terkenal dengan swasembada berasnya hingga mampu mengekspor beras ke kawasan Asia Tenggara. Namun, pascakrisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, ekspor beras dari Indonesia ke luar negeri sudah tidak dapat dilakukan lagi. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia mengimpor beras dari Vietnam dan negara lain. Itulah maksud penggalan iklan “untuk pertama kalinya sejak Orde Baru produksi beras nasional lebih tinggi dari konsumsi beras kita” pada kalimat (1).

Di tengah-tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, saat dunia internasional dan badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan pangan Food and Agriculture Organization (FAO) kebingungan terhadap ancaman krisis pangan sebagai dampak dari

adanya perubahan iklim, Indonesia justru tengah berbangga dengan adanya surplus produksi beras. Klaim SBY terhadap kebijakan ini "diamini" oleh Menteri Pertanian Anton Aprianto, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2008 produksi beras nasional mencapai 3,1 juta ton. Bagi sebagian orang, keberhasilan ini bahkan dianggap jauh lebih sukses dibanding 1984 karena pada 1984 swasembada beras masih dibarengi oleh impor. Dengan kalimat (1) dalam iklan tersebut, tampak upaya Partai Demokrat mencari penghargaan massa dengan seolah-olah menjadi bengkel dari kerusakan pemerintahan Orde Baru dalam hal produksi beras ini.

Klaim atas keberhasilan kebijakan ini dikemas sedemikian rupa agar prestasi yang terjadi tidak sebatas menaikkan angka produksi atas konsumsi beras, tetapi juga berupa pemulihan secara menyeluruh terhadap sektor pertanian Indonesia. Hal itu ditunjukkan pada kalimat (2) ketika petani mengaku bahwa penghasilan mereka "membaik". Secara tidak langsung iklan ini hendak menyatakan bahwa nasib petani di era pemerintahan sebelumnya (pemerintahan Megawati dari PDIP) sungguh buruk sehingga lagi-lagi tampak di sini SBY dan Partai Demokrat seolah menjadi dokter bagi penyembuhan penyakit.

Melalui klaim atas semua perubahan dan prestasi yang baik itu, Partai Demokrat mengingatkan masyarakat agar tidak lupa sosok yang berada di balik semua kebanggaan ini. Ungkapan *siapa dulu presidennya* pada kalimat (3) seolah menunjukkan bahwa semua prestasi tersebut adalah berkat satu orang pemimpin negara yang tangguh, sedangkan pihak lain terpinggirkan dari segi gagasan dan kontribusi.

Menjelang Pemilu tidak sedikit partai yang turut mengklaim kebijakan swasembada beras sebagai prestasi mereka. Sebagian masyarakat menilai bahwa hal tersebut sudah berada pada kapasitas pejabat negara yang membuat kebijakan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan kelompok. Kebijakan tersebut tidak perlu diperebutkan dan dibesar-besarkan hanya untuk memperoleh simpati dan menggelembungkan suara partai pada Pemilu nanti.

Pada kalimat (5) disebutkan bahwa *Partai Demokrat terus mendukung kebijakan pemerintahan Presiden SBY yang mendukung kebijakan swasembada beras*. Ungkapan itu ingin menunjukkan bahwa swasembada beras adalah murni kebijakan SBY semata meskipun tidak benar juga jika dinyatakan bahwa capaian swasembada beras itu murni hasil kerja keras Partai Demokrat dan SBY.

Iklan Demokrat tentang swasembada beras ini oleh sebagian kalangan dianggap kurang arif sehingga banyak menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan karena iklan itu mengklaim keberhasilan pemerintah sebagai keberhasilan Partai Demokrat, padahal Partai Demokrat hanya salah satu pendukung pemerintahan SBY-JK periode 2004–2009, yang hanya memiliki sekitar 7% perolehan suara. Salah satu keberatan itu dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P3I), Daniel Hutapea, dengan menyatakan bahwa

”SBY itu kan sudah mengatakan bahwa dirinya dipilih oleh rakyat, tetapi ternyata SBY mengiklankan dirinya atas nama negara untuk kepentingan partainya. Waktu dia mengeluarkan kebijakan itu, mobilnya punya pemerintah, bajunya dari pemerintah, *nggak* boleh diklaim itu sebagai keberhasilan kelompoknya. Kenapa SBY menerima ketika gambarnya digunakan oleh Demokrat membuat iklan yang sebenarnya kebijakan pemerintah? Badan pengawas Pemilu (bawaslu) seharusnya segera memproses kasus-kasus iklan ini. ”Ini sudah menyalahi aturan, ada kerja sama saling memanfaatkan. bawaslu harus mengadakan SBY ke POLRI seperti PKS untuk pidana Pemilu,”

<http://www.berita8.com/news.php?cat=1&id=8893>.

Iklan swasembada beras itu langsung disambut oleh Partai Golkar. Dalam salah satu iklannya Partai Golkar mengklaim bahwa kadernya di pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhasil membuat Indonesia berswasembada beras pada tahun 2008. Dalam iklan itu dinyatakan bahwa pada tahun 2007 kita masih mengimpor beras, sedangkan pada tahun 2009 kita bahkan akan mengekspor beras. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak kalah klaim karena Menteri Pertanian,

Anton Apriyantono, adalah kader PKS. PKS meluncurkan iklan serupa bahwa keberhasilan swasembada beras di Indonesia berkat Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, salah satu kader PKS.

Sehubungan dengan hal itu, Busyairi (*Tempo* 25 Februari 2009) menyatakan bahwa banyak faktor yang menyumbang peningkatan produksi padi pada tahun 2008. **Pertama**, selama dua tahun terakhir (2007-2008), kondisi iklim amat bersahabat; tidak ada kemarau berkepanjangan atau banjir yang meluas, yang berujung pada padi yang puso. **Kedua**, sumbangan dari aneka kebijakan pemerintah berdasar permintaan DPR. Sejak tahun 2007 digulirkan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN), yang bertumpu pada lima program: subsidi benih, pengembangan tata air mikro, rehabilitasi jaringan tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa, pencetakan sawah baru, serta pengendalian organisme pengganggu. Seluruh anggota Komisi IV setuju dan mendorong kuat program tersebut. Komisi IV juga meminta pemerintah menyubsidi pupuk dan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah/beras. Pada tahun 2008 Komisi IV DPR kembali meminta pemerintah menaikkan HPP. **Ketiga**, prestasi swasembada beras juga tidak lepas dari para pekerja di lapangan, seperti yang diemban para penyuluh pertanian dan pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka menularkan inovasi-inovasi, temuan, dan pengetahuan baru kepada para petani.

Dalam banyak hal, justru pemerintah yang lalai menunaikan tugasnya. Oleh karena itu, bagi pemerintah yang berkuasa (*incumbent* pada Pemilu 2009), klaim yang berlebihan jelas bukan pada tempatnya karena pada saat prestasi swasembada beras diraih, dalam banyak hal, justru petanilah yang menjadi korban dan menanggung beban-derita paling banyak. Jadi, berterima kasihlah kepada petani dan bukan kepada penguasa yang hanya menanamkan mitos swasembada melalui sepenggal iklan. Lebih lanjut, Capres JK dan Partai Golkar pun mengklaim mengangkat harkat petani karena keberhasilan ekspor beras. Hal itu tampak dalam iklan berikut.

3.1.5.2 Teks Iklan Golkar 1

- (1) A: Saya punya *tebak-tebakan nih*. Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. **Ingat** Golkar?
- (2) B: **Ingat** kerja?
- (3) A: Betul. **Ingat** Golkar?
- (4) **C: Ingat ekspor beras?**
- (5) A: Betul. **Ingat** Golkar?
- (6) D: Ingat mutu pendidikan?
- (7) A: Betul
- (8) Contreng nomor 28. Maju bersama Golkar

Secara keseluruhan, sangat mungkin terjadi, kata **ingat** dalam iklan ini adalah juga curahan hati (curhat) JK atas marginalitas eksistensinya dalam duet SBY-JK lima tahun yang lalu, di mana pada saat itu JK menilai bahwa posisinya sebagai wakil presiden tidak lebih dari sekedar bayang-bayang SBY. Adapun menurut JK, banyak dari program-program pro rakyat yang dinilai berhasil adalah murni berangkat dari ide dan gagasan-gagasannya, namun citra baik dari masyarakat malah turun pada sosok SBY. Dengan demikian, prinsip balas budi ala Orde Baru dalam iklan ini tampak sekali pada kata **ingat**.

Pada baris keempat dan kelima iklan JK dan Golkar di atas tampak bahwa keberhasilan swasembada beras hingga berhasil mengekspor beras itu merupakan kerja keras JK dan Golkar. Hal itu menunjukkan bahwa swasembada beras dan langkah ekspor beras yang diklaim sebagai ide dan gagasan JK yang menjadi indikasi suksesnya pembangunan pertanian dalam lima tahun terakhir (walaupun data-data terhadap keberhasilan isu tersebut masih perlu dipertanyakan lagi kebenarannya). Sebagaimana yang juga dilakukan banyak partai lain, para petani sebagai masyarakat kelas bawah yang merangkap sebagai pasar suara potensial dari keseluruhan penduduk Indonesia, kembali diberdayakan dalam hal ini guna menggelembungkan suara Golkar pada Pemilu legislatif dan presiden 2009.

Petani dan beras tidak hanya diperebutkan oleh PDIP, Demokrat, dan Golkar dalam iklan-iklan partai maupun iklan capres.

PKS pun turut memperebutkan suara petani melalui iklan swasembada beras yang diklaim sebagai keberhasilan Menteri Pertanian, salah seorang kader PKS.

3.1.6 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan juga menjadi objek bahasan yang sangat banyak di *blog Say No To Megawati*. Hal itu tampak dalam tiga komentar para partisipan dalam *blog* ini.

- (1) Bagaimana seorang lulusan SMA dapat memimpin sebagian sarjana dan magister dan doktor??
bisa dihajar kiri kanan dia...
masih banyak kan yang lebih pantas??
- (2) Tebakkan saya setelah PDIP ndak dapat suara banyak:
 1. Menyalahkan KPU tentang DPT bermasalah n banyak yg ndak nyoblos. (pertanyaan saya: emang yang ndak bisa nyoblos tu pasti milih PDIP? Kalo milih partai lain gimana? Dasar sombong!!!!)
 2. Menggugat keabsahan PEMILU lewat MK. Ndak percaya? tunggu tanggal mainnya.
 3. Mengatakan bahwa PEMILU ini adalah tidak LUBERJURDIL. (Dasar Picik, ndak bisa menerima kekalahan, ngarit aja sana, ato jualan jamu!!!)
 4. Nyalon lagi tahun 2014. (Ndak kapok, maklum, ndak punya malu, eh...lulusan SMA emang ndak bisa mikir panjang n bijak!!!)
- (3) Pilih capres-cawapres Pintar: Doktor SBY & Profesor Boediono....Calon Yang laen gak pernah sekolah

Tiga komentar di atas dapat dimaknai bahwa seorang Presiden RI tidak pantas kalau dijabat oleh orang yang hanya lulusan SMA. Komentar itu tidak hanya untuk menjatuhkan Megawati, tetapi juga JK yang dianggap "nggak pernah sekolah" dalam komentar *blog* ini. Memang masalah tingkat pendidikan ini menjadi perdebatan menarik dalam pembuatan kriteria capres-cawapres 2009. Ada partai yang menginginkan syarat capres-cawapres Presiden RI pada Pemilu 2009 adalah lulusan S1. Usulan itu dianggap sebagai salah satu strategi

menjatuhkan Megawati. Dalam hal ini, SBY dianggap sebagai pemain yang takut berlaga di gelanggang terbuka dengan memanfaatkan regulasi yang dibuat partainya dengan sekutu-sekutunya. Oleh sebab itu, tidak semua orang setuju bahwa kriteria capres-cawapres harus lulusan S1 seperti tampak pada komentar di *blog Say No To Megawati* ini.

Jangan sama-ratakan tingkat pendidikan SMU dengan tingkat intelegensi dan kedewasaan berpikir seseorang dong. **Emang yang sudah sarjana apa jaminan pasti lebih baik dari orang yang cuman lulusan SMU, SMP dll? BELUM TENTU!!!** Jadi nilailah orang dari cara berpikirnya, bukan tingkat pendidikannya! dalam kasus Bu Mega.... beliau memang kurang bijaksana dalam bersikap dan kurang berpikir panjang (apalagi kalo udah di atas podium kampanye, ngomong nya menggebu-gebu sampai termakan ucapan sendiri..... weleh).

Berkaitan dengan pembahasan tingkat pendidikan ini, Partai Golkar mengedepankan diri sebagai partai yang memiliki kader berpendidikan baik, yakni sebagian besar berpendidikan S1 seperti tampak dalam iklan yang mereka tayangkan untuk mengusung JK ini.

3.1.6.1 Teks Iklan Golkar 2

- (1) Pemimpin-pemimpin bangsa masa depan
- (2) Ia harus mencontoh Rasulullah
- (3) Pertama, sidqiq, ia jujur
- (4) Tabligh, ia dapat menjelaskan program-programnya
- (5) Amanah, ia dapat dipercaya
- (6) Fatonah, cerdas
- (7) Karena itu, caleg-caleg Golkar sembilan puluh persen S1
- (8) Mari kita selalu bersyukur dan bekerja untuk Indonesia lebih baik
- (9) Maju bersama Golkar

Hasil analisis sintaktis iklan ini menunjukkan bahwa subjek menempati peran sebagai sesuatu *yang dikenal* untuk berhadapan dengan predikat yang menyatakan makna atau peran *keadaan*. Hal ini digunakan

tidak hanya untuk menunjukkan *siapa* subjek, melainkan juga menunjukkan *bagaimana subjek*.

Secara semantik, iklan ini menunjukkan bahwa perceraian SBY-JK pada pilpres 2009 ini bukan tanpa sebab. Secara profesional, JK memandang lawan politiknya (SBY) sebagai sosok yang lamban dan tidak tegas dalam bertindak. Oleh karena itu, pada iklan ini, JK mengusung sebuah tipe kepemimpinan ideal yang tentu saja diamankan oleh hampir sebagian besar rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, yakni kepemimpinan Muhammad (Rasulullah) sebagai patokan dari kriteria ideal pemimpin Indonesia pada Pemilu nanti. Tentu saja hal di atas tidak terlepas dari adanya pemanfaatan sumber-sumber agama yang dilakukan Golkar guna meningkatkan daya jualnya di mata masyarakat Indonesia (yang mayoritas Islam).

Empat sifat yang dimiliki Rasulullah dalam memimpin tersebut seolah juga dimiliki JK sebagai calon pemimpin bangsa ini. Yang **pertama jujur** (*siddiq*), yang secara harfiah berarti lurus hati, tidak berdusta, tidak curang, tulus dan ikhlas dalam memimpin (jauh dari tindak korupsi). **Kedua** (*tabligh*), *dapat menjelaskan* program-programnya, maksudnya berkompetensi, mampu, dan sanggup memberi keterangan yang terang, nyata, gamblang, dan tegas terhadap rencana pemerintahan ke depan (tidak membohongi rakyat). **Ketiga** (*amanah*), *dapat dipercaya*, maksudnya dapat menjadi sandaran aspirasi rakyat karena diakui jujur dan benar. **Keempat cerdas** (*fatonah*), maksudnya sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir dan mengerti, tajam pikiran serta cermat dalam membangun. Keempat sifat kepemimpinan yang dimiliki Rasulullah tersebut, digunakan sebagai parameter untuk menunjukkan bahwa caleg-caleg dari Golkar sudah mumpuni untuk memimpin karena 90% dari mereka sudah mengenyam bangku pendidikan hingga sarjana (strata 1). Meskipun demikian, pada kenyataannya seseorang yang telah S1 belum tentu memiliki keempat hal yang disebutkan di atas. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa caleg-caleg dari Golkar adalah orang-orang yang berpendidikan.

Klausa *mari kita selalu bersyukur* yang terdapat pada kalimat (8) lagi-lagi adalah isyarat yang menghimbau agar rakyat tidak lupa dan berterima kasih atas jasa-jasa yang telah dilakukan Golkar. *Selalu bersyukur* mengindikasikan adanya makna capaian, raih, dan sesuatu yang baik yang telah didapatkan. Dalam hal ini tampak ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada Tuhan, namun makna yang lebih jauh menunjukkan agar rakyat berterima kasih akan jasa-jasa yang telah Golkar perjuangkan. Setelah itu, mari secara *real* bersama-sama membangun kembali kehidupan Indonesia yang lebih layak dari sekarang ini.

Pembahasan tingkat pendidikan ini juga berkaitan dengan klasifikasi kelas: *orang pintar* vs orang bodoh. Megawati oleh para partisipan dalam *blog Say No To Megawati* dianggap sebagai orang bodoh dan pendukungnya pun dianggap juga orang bodoh. Hal itu tampak pada dua komentar berikut.

- (1) Tau kenapa? karena semua penghuni dunia maya pintar2...kan orang pintar musuh "Bu Mega"...! Hehehe.
Jadi kesimpulannya yang milih Bu Mega adalah orang b*d*h
- (2) *SAY NO TO MEGAWATI*, karena cuman ORANG BODOH yang masuk lubang yang sama dua kali & cuman ORANG BODOH juga yang memilih presiden yang pernah memimpin dan GAGAL!

Lalu, komentar itu dibalas oleh partisipan lain dalam *blog* ini dengan komentar sebagai berikut.

Kamu yang bodoh... soal pilihan, itu hak demokrasi setiap orang. Dasar munafik, sok benar, sok suci. Tak mampu menghargai orang lain, siapa bilang kamu orang pintar hanya kamu bisa main internet atau buat grup yang menghujat orang lain. Dasar bodoh!

Hal ini menunjukkan adanya ruang terbuka bagi yang "menganggap diri sebagai orang pintar" sehingga tidak mendukung Megawati" dan bagi orang yang "dianggap bodoh karena mendukung Megawati."

3.1.7 Penutup

Blog dan berbagai jejaring sosial di internet merupakan salah satu media yang dapat digunakan oleh para politisi untuk memaparkan visi dan misinya dalam upaya meraih kekuasaan. Pada sisi lain, *blog* dan berbagai jejaring sosial juga digunakan oleh para kompetitor lain yang ingin menjatuhkan politisi yang sedang berkompetisi dalam gelanggang politik. Hal itu tampak dalam perdebatan yang berlangsung di dunia maya, baik oleh para pendukung maupun penentang masing-masing capres-cawapres seperti terurai di atas.

Bagi para penentang SBY—yang dalam Pemilu 2009 dia adalah *incumbent*—*blog* digunakan sebagai media perjuangan dan perlawanan dalam bentuk tulisan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak prorakyat seperti kenaikan harga BBM, BLT untuk kelas bawah yang disinyalir hanya untuk “menyogok” suara rakyat waktu Pemilu, manipulasi angka kemiskinan, dan sebagainya. Itu berarti bahwa di Indonesia dukungan dan tantangan kepada capres-cawapres memasuki era baru, yaitu era demokrasi-*cyber*. Demokrasi seperti ini memungkinkan orang berpartisipasi seekspresif mungkin melalui komentar-komentarnya atas suatu pernyataan atau kebijakan penguasa dan penantangannya.

Dalam kajian ini komentar dalam salah satu *blog* dihubungkan dengan komentar dalam *blog* lain dan kadangkala dihubungkan dengan iklan salah satu capres-cawapres pilpres 2009 karena adanya konsep intertekstualitas. Teks yang satu berkaitan dengan teks lain dan begitu pula pemaknaannya.

Hasil kajian kelas sosial dalam berbagai komentar para partisipan dalam *blog* dan juga iklan politik capres-cawapres menunjukkan adanya pencitraan oleh kelompok tertentu kepada calon dan pendukung calon. Sebagai contoh, Megawati dan pendukungnya dicitrakan sebagai orang bodoh, tidak berpendidikan, kelas bawah, penerima BLT, dan orang desa yang berprofesi sebagai petani, yang tidak mengetahui perkembangan politik. Sementara itu, SBY dan pendukungnya mencitrakan diri dan dicitrakan oleh kelompoknya

sebagai orang yang pintar, berpendidikan, dan orang kota. Sulitnya ialah menempatkan capres JK dalam kutub ini.

3.2 Identitas Entis, Agama Dan Dukungan Kelompok Tertentu?

3.2.1 Pengantar

Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan *facebookers* dalam forum diskusi "Say No To...." banyak mengandung unsur rasis/syak wasangka etnis. Calon presiden yang paling banyak mendapat label yang berkaitan dengan etnis adalah JK. Label etnis yang diberikan terhadap JK disebabkan oleh beberapa hal, **pertama** JK merupakan satu-satunya presiden yang berasal dari luar Jawa. Selain itu, JK yang berpasangan dengan Wiranto yang berasal dari Jawa mengusung slogan 'pasangan nusantara'. Slogan ini mengandung konotasi etnis

Isu etnis yang menimpa JK disebabkan oleh faktor kesejarahan di mana sejak zaman orde lama sampai kini presiden Indonesia pada umumnya berasal dari Jawa. Sejak Republik Indonesia merdeka Indonesia telah memiliki 6 presiden yaitu Soekarno, Soeharto, B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Soesilo Bambang Yudhoyono. Dari enam presiden tersebut hanya terdapat seorang presiden yang berasal dari luar Jawa yaitu B.J. Habibie yang berasal dari Makassar. Namun demikian kepemimpinan Habibie tidak sampai satu periode karena tidak dipilih melalui pemilihan umum. Pada saat Presiden Soeharto lengser Habibie menjabat sebagai wakil presiden. Oleh karena itu, pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1998 maka Wakil Presiden BJ Habibie menggantikannya. Faktor kesejarahan ini membuat masyarakat Indonesia belum biasa dengan menerima hal baru yaitu menerima calon presiden yang berasal dari luar Jawa yang secara eksplisit mendeklarasikan dirinya sebagai tokoh luar Jawa. Melalui slogan 'pasangan nusantara' JK ingin menyampaikan pesan secara eksplisit bahwa dirinya yang berasal dari luar Jawa (Makassar), sedangkan pasangannya yaitu calon wakil presiden Wiranto berasal dari Jawa. Pada

tahun 2004 terdapat juga seorang calon presiden dari luar Jawa yaitu Hamzah Haz, namun dalam kampanyenya Hamzah Haz tidak pernah mendeklarasikan secara eksplisit dari mana asalnya.

Penggunaan isu etnis dalam dunia politik bukanlah merupakan hal yang baru dan bukan pula hanya terjadi di Indonesia. Penggunaan isu etnis dalam dunia politik banyak terjadi terutama apabila calon presiden berasal dari ras/etnis minoritas. Di negara yang sangat demokratis sekalipun seperti Amerika Serikat isu etnis juga berkembang. Ketika Obama mencalonkan diri sebagai presiden Amerika isu yang sifatnya rasial juga dikembangkan oleh lawan politiknya.

Isu etnis juga berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Stuart Hall (1996: 27) menceritakan pengalamannya ketika tinggal di Inggris selama 30 tahun, di mana masyarakat biasa memanggil seseorang berdasarkan warna kulit seperti *West Indian, Negro, Black, immigrant*. Panggilan tersebut kadang dilakukan dengan cukup ramah, namun kadang dilakukan dengan cukup kejam. Hal yang sama juga dilakukan ketika Hall tinggal di Jamaica. Penggunaan label ras atau etnis dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Hall merupakan cara di mana terminologi diartikulasikan dengan terminologi lain selain sintaksis ras dan etnisitas untuk memproduksi makna yang berbeda dengan makna aslinya. Sebagai contoh, 'hitam' memiliki makna 'rakyat biasa'. Dalam sistem Inggris diterapkan dikotomi putih dan bukan putih. Pengkategorian tersebut memiliki makna sebagai sistem referensi yang mengklasifikasikan kedudukan kelompok masyarakat.

Di Indonesia kategorisasi ras/etnis juga sering terjadi. Beberapa istilah yang dipakai sehari-hari juga memiliki konotasi pengkategorian kelompok. Kata pribumi dan nonpribumi merupakan salah satu contoh dari penggunaan istilah yang menunjukkan pengkategorian. Sejak peristiwa 1998 yang sering disebut sebagai konflik etnis maka penggunaan istilah nonpribumi atau biasa disingkat dengan nonpri untuk menyebut etnis Tionghoa tidak banyak digunakan. Pada Pemilu 2009 terdapat penggunaan istilah yang memiliki konotasi pengkategorian yaitu Jawa dan luar Jawa.

3.2.2 Hegemoni Jawa dan Terhadap Non-Jawa

Subbab ini akan membahas wacana yang muncul dalam FB dalam proses pilpres 2009 yang berkaitan dengan etnisitas/agama. Wacana tentang etnisitas paling banyak ditujukan untuk JK, sebagai contoh:

HIDUP JK

hidup Putra Kelahiran Sulawesi

Ahmad Ham I LOVE JK....JK...JK...JK...untuk persiden Indonesia 2014,,,saya putra Indonesia timur segaligus tim memenangkan JK 2010... km sosok ya persiden IRAN Abu Nejad

Apabila dilihat dari teks di atas, nampaknya terjadi hegemoni kelompok dominan (Jawa) dalam memproduksi simbol rasis terhadap masyarakat minoritas (non-Jawa). Pernyataan ‘Hidup JK’, “Hidup Putra Kelahiran Sulawesi’ menjadi semacam perjuangan kelas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kulit hitam terhadap masyarakat kulit putih. Namun demikian terdapat makna lain yang dapat disimpulkan secara implisit yaitu adanya dikotomi antara masyarakat kelompok Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat, serta Sulawesi dan non-Sulawesi.

Dalam teorinya, Gramsci selain memperkenalkan konsep hegemoni juga memperkenalkan konsep *counter* hegemoni. *Counter* hegemoni merupakan analisis hegemonik tentang dominasi tekanan sosial budaya dan mencari tekanan *counter hegemonic* dalam resistensi dan perjuangan. Ketika kelas yang terhegemoni yaitu etnis-etnis non-Jawa ingin melakukan negosiasi, namun kesepakatan tersebut sulit dicapai. Hal ini karena hegemoni budaya bisa dicapai apabila kelas tersebut mencapai kekuasaan politik. Ketika negosiasi tidak bisa berjalan, kelompok minoritas non-Jawa yang selama ini merasa kurang mendapat kesempatan sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Etnis non-Jawa yang selama ini sebagai kelompok yang terpinggirkan oleh negara dan oleh kelompok dominan yaitu Jawa mulai menyuarakan haknya. Negosiasi yang pertama kali dituntut adalah adanya persamaan hak dengan

masyarakat Jawa. Hal ini diwujudkan dalam dukungan terhadap calon non-Jawa sebagaimana ditunjukkan oleh *facebookers* di atas.

Terdapat juga personifikasi JK dengan tokoh tertentu yaitu Obama dan Hitler. Di satu pihak terdapat pendukung JK yang membela JK yang mengagumi Obama di mana sistem ekonomi Obama mengarah pada kapitalisme humanistik. Personifikasi semacam ini secara implisit diartikan bahwa sebagai pengagum Obama bisa saja JK akan mengadaptasi sistem ekonomi Obama. Namun demikian seorang peserta diskusi lain yang tidak pro JK mengkritik personifikasi JK pada Obama karena menganggap Obama adalah simbol kapitalis. Diskusi tersebut bisa dilihat sebagai berikut.

Ferdianto Hutomo Saya ini GOLPUT & idola sama Obama..... Bapak SYAHRUL Q. TERSERAH, ngomong tentang Obama jangan asal NGOMONG DOANG!!! Ngomong kayak penjual obat, tidak berdasarkan bukti!!....Tau ndak, Obama baru menjabat < 5 bulan. Kok sudah bilang Obama tdk bisa menyelesaikan TIMTENG. Sekarang Israel mendapat tekanan berat dari Obama ...dalam hal: menggusur pemukiman Israel di perbatasan dan mengakui negara Palestina untk menciptakan perdamaian di TIMTENG. Masalah Obamanomic, Bapak Syahrul...ketahuan tidak tahu sama sekali alias NGOMONG DOANG!! Obamanomic mengarah ke KAPITALISTIK LAISSE FAIRE bukan SOSIALIS. Dengan demikian, ekonomi dunia akan menjadi lebih humanis dan tidak menghancurkan negara berkembang...

Kalau misalnya Anda pengagum Obama, yaaa silahkan, tp Yg sy harapkan betul adalah, Indonesia berdiri sendiri, tanpa ketergantungan asing.... Lihat Selengkapnya Persoalan Obamanomic, itu mengandung sisi sosialis. Mungkin sy tidak terlalu faham dengan ekonomi, tp sy faham betul, apa itu sosialisme. Jika Obama mampu mendamaikan Timteng, sy sangat bersyukur. itu adalah tujuan kita bersama, bukan?

Syahrul Q. Terserah yg namanya pendukung kan selalu memuja dukungannya. Kalo gak salah, banyak yg bilang juga, JK meniru-niru gaya Obama, dan Obama adalah pujaannya, smpe2 hal kecil sperti BB. Kenyataanya, Obama tidak bisa

menyelesaikan masalah Timteng. Obama dengan kebijakan obamanomic-nya juga akan semakin menghancurkan ekonomi negara be...rkembang, krena di AS sendiri sudah diberlakukannya sistem sosialis, namun untuk negara2 yg bernaung di bawah AS, dipaksa untuk Kapitalism.

Sementara itu, seseorang peserta diskusi melemparkan isu yang mempersonifikasi JK seperti Hitler tidak mendapat tanggapan. Sebenarnya isu tersebut datang dari anggota DPR RI Marissa Haque, namun isu tersebut tidak spesifik dan tidak didukung oleh fakta yang cukup. Oleh karena itu, hal tersebut tidak merangsang peserta diskusi lain untuk menanggapi. Apabila dilihat dari contoh pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh *facebookers* nampaknya peserta forum diskusi cukup kritis dalam menanggapi sebuah isu. Apabila isu tersebut tidak mendasar mereka juga tidak terpancing untuk menanggapi. Teks tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Aditya

Marissa Menuding, Kalla Seperti Hitler - 22/03/2005, 16:47
WIB - KOMPAS *Cyber Media* - Hiburan
www2.kompas.com

Artis film yang kini menjadi anggota Fraksi PDIP (FPDIP) DPR, Marissa Haque, kemarin tampak gusar saat berbicara tentang sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dinilai arogan. Marissa menganggap Kalla bak pemimpin Nazi, Adolf Hitler.

Top of Form

Isu lain yang didiskusikan dalam *facebook* 'Say No To JK' adalah masalah rasisme secara umum. Teks tersebut adalah sebagai berikut.

Waw... mengerikan.... ntar RASISME dan kekerasan kembali lagi wkwkwkwkw...

@Say No: Kalo kasus Adi, masih perlu penyelidikan untuk menyimpulkan siapa yg menfitnah dan siapa yang difitnah, adi kan lagi tersangka, secara hukum tim SBY (Rizal) tdk boleh membawa Adi ke jakarta untuk konfrensi pers, apalagi tanpa didampingi pengara. Apa bisa dijamin pernyataan Adi bukan merupakan sebuah rekayasa

Asmuddin As

@say no: Kalo kasus Adi kan masih perlu penyelidikan, trus mana yang lebih berbahaya dengan ungkapan rasis alfian mallarangen waktu kampanye di makassar ????????

Say No To Yusuf Kalla Fintah yang beredar dalam nuansa pilpres kali ini, ternyata yang paling kejam adalah fitnah dari kubu JK-WIN, yang berbau SARA. Adi Zein sudah mengakui hal itu, dan sekarang tinggal mencari Syukri (Buron). Ini adalah fitnah yang sangat mengerikan!

Wahyudi Apriyanto

susah memastikan siapa yang fitnah, siapa yang di fitnah, gua rasa semua melakukan kecurangan, yang beda kadarnya aja, tapi biasanya semakin besar kekuasaannya, semakin banyak faktor yang bisa diakses, makin besar peluang untuk melakukan kecurangan...bobrok.

Kenapa isu rasisme menjadi isu yang paling gencar dilontarkan dalam forum diskusi di FB "*Say No To* JK?" Nampak selama ini hegemoni Jawa terhadap non-Jawa berkembang dalam kesadaran palsu. Apabila bicara presiden adalah Jawa tidak SARA, namun apabila bicara presiden adalah luar Jawa maka seolah-olah menjadi isu SARA. Hegemoni merupakan kontrol intelektual dari masyarakat melalui makna budaya. Dalam pandangan Gramsci, setiap kelas mencoba mengamankan posisi institusi publik maupun dalam pendapat. Kelas yang mendapat keistimewaan pada waktu tersebut mengamankan posisi dari hegemoni dalam ruang intelektual dan politik. Kelas yang berkuasa dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang dekat dengan kekuasaan yaitu elit politik Orde Baru (dalam hal ini diposisikan setara dengan kaum borjuis). Kelas ini menundukkan kelas yang tersubordinasi melalui supremasi intelektual. Kelas yang ingin ditundukkan adalah kelas etnis luar Jawa (yang dalam hal ini diposisikan setara dengan kelas pekerja) yang jumlahnya mayoritas tetapi tidak menguasai sumber daya ekonomi. Tujuannya adalah kekuasaan politik.

Menurut Gramsci praktik kultural dan ideologis dapat dipahami dan dievaluasi ketika memfungsikan hubungan antagonistik antara borjuis dan kelas pekerja. Hubungan antagonistik ini pada akhirnya

menentukan pandangan di mana analisis kultural dan ideologis harus diletakkan pada teori Marxist mengenai ideologi. Dari hubungan antara hegemon yaitu elit politik Orde Baru dan kelompok yang terhegemoni yaitu etnis luar Jawa, maka hubungannya dibaca sebagai berikut. Kelas yang berkuasa (Jawa) mempertahankan ideologi kekuasaan, sedangkan kelas yang tidak berkuasa (luar Jawa) memperjuangkan ideologi keadilan. Sebenarnya sulit menempatkan JK dalam hubungan antagonistik ini. Sebenarnya secara kultural masyarakat Bugis/Luar Jawa merupakan kelompok yang ter subordinasi. Akan tetapi, dalam kekuasaan ekonomi JK memiliki kekuasaan ekonomi yang besar. Dengan demikian, Ideologi yang diperjuangkan oleh kelas etnis luar Jawa adalah ideologi pemerataan kekuasaan.

Pendukung JK menjawab tuduhan etnisitas ini dengan identitas etnis dan (organisasi) agama yang cukup menarik. Mereka mengatakan bahwa: 'kami memang kalah tp kita masih punya SIRI': Di sini nampak bahwa hasil akhir bukanlah hal yang terpenting dari wacana ini namun perjuangan kelas melawan hegemoni Jawa dan perjuangan akan pemerataan kekuasaan merupakan faktor yang paling penting. Kata-kata 'anti kemapanan' yang dilontarkan *facebookers* ini sudah menunjukkan hubungan dominasi-subordinasi yang terjadi selama ini antara Jawa-luar Jawa atau SBY – JK? Lebih lanjut secara implisit *facebookers* ingin menyampaikan pesan bahwa JK adalah pemikir besar, penganut demokrasi yang baik, cerdas, pemimpin yang didukung rakyat pada umumnya serta HMI pada khususnya. Diskusi tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

kami memang kalah tp kita masih punya SIRI
Nawawi Dg Sibali yg membuat *blog* ini adlh orang yg sirik terhadap JK, pemerintahan yg lalu kuat karena wapresx JK yg selalu pasang badan setiap ada masalah dan tdk pernah menyerah sebelum menyelesaikan masalah tsb, beda dgn sekarang justru membawa masalah yg tak kunjung selesai..... para blogger hati2 dgn org yg membuat *blog* ini dia adalah orang yg sirik dan anti kemapanan....

Ahmad Saufi pak yusuf kalla yang saya hormati, saya telah belajar tentang tulisan2 serta pengamatan saya selama ini tentang pemikiran bapak terhadap pandangan demokrasi indonesia yang mencerahkan. Saya bangga terhadap bapak. Tokoh bangsa yang cerdas. salam dari kader HMI Cabang Pontianak, Kami menghrapkan Kedatangan Bapak di bumi Khatulistiwa
Viali Dwiputra PAK Jangan putus asa mudah 2x BAPa jadi wapres

Menarik untuk disimak adalah kalimat pendek yang ditulis oleh Mochammad Aelfwian Noer Razak. Identitas yang digunakan oleh *blogger* tersebut bukan identitas Jawa namun kalimat pendek yang ditulis sangat rasis mengandung dominasi etnisitas yang luar biasa. Plesetan sudahlah menjadi sundala adalah plesetan yang cerdas. Apabila Mochammad Aelfwian Noer Razak bukan orang Jawa konstelasinya menjadi perjuangan kelas antarsiaapa dengan siapa? Teks tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Mochammad Aelfwian Noer Razak
sundala yang buat ini...appa mau nuntut....silahkan ke makassar...

3.2.3 Identitas Agama untuk Mencari Dukungan atau Penolakan

Penggunaan identitas agama dalam kampanye JK ternyata membawa dua konsekuensi, yaitu dukungan dan penolakan. Bagi pendukung JK proximity atau kesamaan sebagai 'sesama muslim'. Idola sebagai pemimpin yang saleh dan terbaik di antara yang terburuk nampaknya dukungan semacam ini kurang berkembang dibanding dengan mereka yang menolak. Teks tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Idham Munandar : saya seorang muslim di antara semua capres yang ada hanya haji mohammad yusuf kalla lah yang rukun islam nya paling lengkap maka saya akan pilih dia sebagai

presiden ri semoga allah meridhoi, kalo semua capres buruk
maka dialah yang terbaik dari yang terburuk

Teks yang berkembang adalah kecurigaan *facebookers* akan penggunaan simbol-simbol agama oleh JK. Kunjungan JK ke pesantren bukan disambut baik oleh *blogger* namun dicurigai sebagai ‘nakut-nakuti’, ‘membeli suara’. Teks tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Mulyono pesantren itu sebanarnya tidak butuh disambangi JK, cuman pesantren juga secara normatif tidak pernah menolak kedatangan orang, makanya biarkan saja JK blusak blusuk pesantren asal tidak menakut-nakuti. ...mlebu pesantren kok nek ono butuhe.

Say No To Yusuf Kalla Yusuf Kalla yang diagung2kan menjadi orang muslim sejati oleh para pendukungnya, pernah melakukan kecurigaan yang sangat menyedihkan terhadap Pesantren. Ia pernah menyuruh mengumpulkan semua detail informasi tentang santri2 di seluruh Indonesia hingga ke.

Situasi lain yang dibangun oleh *facebookers* adalah adanya dukungan oleh kelompok Islam tertentu yang memiliki konotasi menakutkan, pemaarah, dan pendendam. Selain didukung oleh kelompok Islam tertentu, forum ini juga mendiskusikan bahwa JK didukung oleh seorang raja judi. Teks tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Sang Mantan terus ngapa didukung FUI...takut yah mas sarang penyamunnya di bongkar...

takut sama orang2 jahil di FUI, pemaarah mendendam, dll

Say No To Yusuf Kalla Hati-hati, JK-WIN itu didukung oleh FPI/FUI, dan raja Judi. Makanya fitnah soal RAS dan Agama itu selalu berasal dari kubu JK-WIN.

Media merupakan institusi yang ikut bertanggung jawab dalam memproduksi wacana rasis/etnisitas. Wacana yang dibangun oleh kelompok dominan (Jawa) hanya orang Jawa yang berhak menjadi Presiden RI. Wacana tersebut berhadapan dengan wacana yang merepresentasikan bahwa setiap warga negara Indonesia asli berhak untuk menjadi Presiden RI sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Representasi yang berbeda terhadap kelompok lain ini menimbulkan ketegangan.

Mengutip Althusser, ideologi adalah sistem representasi yang disusun dari konsep, ide, mitos, dan citra yang dihubungkan dengan kenyataan. Sistem representasi merupakan sistem makna yang merepresentasikan dunia kita dengan dunia orang lain. Dalam forum diskusi tersebut pemimpin luar Jawa dicitrakan sebagai pemimpin yang memiliki sifat rasis. Adapun pemimpin Jawa dicitrakan sebagai pemimpin yang tidak rasis dan tidak curang. Oleh karena itu, pencitraan tersebut diikuti oleh produksi wacana yang memiliki makna bahwa sebenarnya luar Jawa adalah mensubordinasikan Jawa.

Representasi tentang luar Jawa ini merupakan reproduksi dari makna yang diproduksi dalam wilayah superstruktur, dalam institusi seperti keluarga, sekolah, mesia, partai politik. Secara teoritis, representasi tentang etnis luar Jawa tersebut bisa berakibat pada kerugian politik/ekonomi sebagaimana dialami oleh migran berkulit hitam dalam studi-studi di negara barat. Di sini media memang tidak berhubungan langsung dalam proses produksi, tetapi dalam melakukan proses reproduksi media bekerja melalui ideologi yang diyakini. Dengan kata lain, pencitraan media telah melewati transformasi wilayah representasi ideologis. Sistem representasi tersebut dibentuk dalam struktur ketidak-sadaran melalui ideologi. Ideologi dioperasionalkan dalam jaringan diskursif melalui wilayah semantik. Dalam diskusi *Say No To JK*, kata ganti untuk etnis luar Jawa antara lain Indonesia Timur' yang secara dikotomis berbeda dengan Indonesia Barat. Kata Indonesia Timuri memiliki makna bahwa luar Jawa merupakan '*the others*'. Demikian juga pada sebutan 'orang Makassar' yang memiliki makna bahwa orang Makassar tidak memiliki akar sosial budaya. Kata Indonesia Timur sebenarnya bisa dianalogikan dengan terminologi '*black*' yang memiliki berbagai makna antara lain imigran, rakyat biasa, dan miskin. Kata Indonesia Timur juga memiliki konotasi rasis. Di sini terdapat sistem nilai yang telah dimodifikasi pada kelas berkuasa dalam bernegosiasi dengan kelas subordinat dalam menanamkan sistem nilai.

Sebagaimana terminologi ‘black’ yang mengandung arti perjuangan terminologi ‘Indonesia Timuri’ juga memiliki makna perjuangan kelas. Dibalik kata Indonesia Timur ada makna yang dibangun yaitu ketidak setaraan. Oleh karena itu, untuk menjadi setara orang Indonesia Timur harus berjuang. Berjuang untuk menjadi setara orang Indonesia Barat tentunya tidak mungkin, karena persoalan ras adalah persoalan yang melekat pada ciri biologis seseorang. Kata Indonesia Timur, Makassar yang dipasang oleh *facebookers* pendukung JK menunjukkan bahwa negara telah menguasai ide serta kesadaran masyarakat bahwa kesempatan hanya diberikan untuk kelangan Indonesia Barat. Artinya, etnis Indonesia Timur tidak memiliki kesempatan yang sama dalam bidang politik. Dipakainya simbol keagamaan oleh *facebookers* membangun makna bahwa jaminan keamanan bisa diberikan apabila seseorang memiliki identitas yang sama dengan mayoritas penduduk yaitu Islam. Kelompok yang ke-Islamannya dianggap baik boleh mendapatkan dukungan, sedangkan kelompok yang ke-Islamannya dianggap krang baik tidak boleh mendapat dukungan dari kalangan Islam.

Merujuk pada proposisi kedua Althusser yang isinya menjelaskan bahwa ideologi adalah praktik. Praktik yang diletakkan dalam ritual dari aparatus tertentu antara lain medaa. Ritual yang dilakukan oleh media dalam diskusi *Say No To JK* berpengaruh terhadap kerangka pemikiran tentang dunia yang merupakan landasan orang bertindak. Althusser menjelaskan bahwa ada perbedaan antara aparatus represi negara seperti tentara dan polisi dengan *ideological state apparatuses* seperti media. Media tidak secara langsung diorganisasi oleh pemerintah.

Ritual dilakukan secara rutin antara lain dengan memakai istilah-istilah yang bermakna meminggirkan seperti penggunaan istilah Indonesia Timur. Dalam memproduksi representasi ideologis ada perbedaan dengan praktik memproduksi komoditi lain. Pekerja media tidak hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan upah, tetapi memproduksi, mereproduksi, dan mentransformasi wilayah representasi ideologi. Dalam meliput sebuah kejadian, misalnya pekerja media tidak

bisa lepas dari ideologi yang diyakini selama ini (dalam media baru *facebookers* adalah jurnalis dalam konteks jurnalisme kewargaan). Kedekatan atau *proximity* memengaruhi pandangan pekerja media. *Blogger* yang pro JK, SBY atau Mega akan bersuara berbeda.

3.2.4 Identity or Denigrate?

Dalam forum diskusi ‘*Say No To Megawati*’ halamannya dihiasi dengan peraturan sebagai berikut.

Peraturan forum diskusi:

1. No SARA
2. Tidak membicarakan capres/tokoh lainnya...
3. JUNK dan OOT kalau bisa dikurangi. Stay away from one-liners and short replies.
4. Stay on the track...

Berbeda dengan peraturan diskusi, kenyataannya forum ini penuh dengan nuansa suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Nuansa SARA yang paling mencolok adalah penggunaan leksikon “*MBOK JAMU*” pilihan kara ini tidak hanya sekedar mengandung unsur SARA tetapi juga *denigrate* (merendahkan) karena mbok jamu memiliki konotasi Jawa kelas bawah. Berikut adalah teks diskusi.

sebenarnya saya takut, ikutan komentar, (takut dituntut) tp gimana ya..?!?!! saya jg gak respek & gak bangeet...!!!
1001% “Say ‘NO!!!’ to MBOK JAMU”

Identitas yang sifatnya *denigrate* lain adalah menganggap Megawati bodoh. Personifikasi lain adalah Megawati yang selalu mengatas namakan wong cilik kenyataannya memiliki jarak terhadap wong cilik. Oleh karena itu, *facebooker* tersebut menggambarkan bahwa Megawati akan berjarak apabila berhubungan dengan orang kecil, jadi orang kecil hanyalah retorika. Diskusi tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Denger2 bliau nya terpengaruh juga sama koment2 di blog ini..hahaha.. takut nih yee? Kenapa takut kalo memang dia gak cuma ngumbar janji.. Sembako murah... mimpi kalee...

dikira rakyat bodoh apa...bisa mnurunkan sembako begitu saja..lantas siapa yg mau dikorbankan..PETANI???

Meninjau pasar juga ngacir...karena diajak salaman sama WONG CILIK. Takut tangannya kotor ya Bu Mega???"

"pemilih Megawati adalah kebanyakan orang2 yang masih di pelosok yang masih sedikit terbelakang dalam pengetahuan politik (Jawa Tengah dan Bali adalah lumbung suara Mega). Kebanyakan mereka melihat Megawati karena sosok Bapaknya Ir. Soekarno !!!!"

sampayan butuh emansipasi wanita mbak?? udah dikasih kesempatan gitu lho. tapi kok buktinya, banyak banget hal-hal bodoh yang dilakukan...bukankah seharusnya presiden itu bisa berpikir lebih intelektual daripada kami-kami masyarakat dunia maya 😊

percayalah kalo negara dipimpin seorang wanita niscaya negara tersebut akan menuju kehancuran...dikutip dari sabda rasulullah.

Tema agama yang berkembang dalam diskusi sifatnya juga *denigrate*. Penggunaan terminologi 'mendem agama', 'budaknya orang arab', serta 'menghina agama minoritas' merupakan tema diskusi yang bisa dilihat berikut.

1. **Bambang** | 7 April, 2009 19:40

Ternyata setelah dicek anggotanya, kebanyakan diisi oleh orang-orang yang termasuk "mendem agama", budaknya orang arab

Mas Bambang mo nanya dong, mendem agama artinya apa ya? trus yang cek anggotanya siapa? koq tau2an orang2nya mendem agam? ciri2nya apa? Mas Bambang rasis ya! Jangan frustrasi gitu dong, ini negara demokrasi, bukan negara preman, lagipula semua kritikan2 untuk Bu Mega seharusnya bisa diterima sebagai bahan introspeksi. Karena semua kritikan itu datangnya dari RAKYAT, dan semuanya emang benar2 kenyataan.

Semoga Allah SWT memaafkan pembuat Group ini, bermaksud tidak menyebarkan Kebencian, Namun jadinya sebagai penyebar kebencian baru.

Sebagai Kepala negara tidak pantas ibu secara sangat ekspresif menunjukkan dendam kepada lawan politik yg nota bene dulu adalah pembantu Ibu. saya (dan temen2 yg lain yg pernah komentar) sangat tidak respek dengan caraini.

Belum lagi Ibu mencla-mencle soal BLT. Dibenak saya saya punya persepsi sekeliling ibu adalah para preman dalam arti sesungguhnya.(semoga saya salah) Semoga Ibu kalah dan dapat memanfaatkan sis usia untuk berbakti & beribadah dengan cara yg biasa sesuai tuntunan agama Ibu. Salam

Horee... No Mega! anaknya aja sudah menghina agama minoritas. apa lagi ibunya jadi presiden, agama yang pengikutnya beda dengan dia akan jadi penghuni bar.....

NO Mega dan No Sutiyoso.

Ibu Mega tuh layaknya Misca di CINTRA FITRI, kalo gabung sama Prabowo Jadi Misca Dan Fais Doonggg.... aduh serem banget deh negara Dipimpin sama orang yang rakus.. dan SBY seperti Farrel yang selalu di Zhalimi dan terakhirnya pasti menang doong.. yuuk marrii..

Identitas yang melekat pada “*Say No To Prabowo*” sifatnya juga *denigrate*. Diskusi mengenai Prabowo dan Wiranto lebih banyak disajikan dalam gambar yang akan dianalisis lebih lanjut. Diskusi tersebut dimuat dalam *Say No To Prabowo* dan *Say No To SBY Putu Wiatnata Hidup Prabowo....the Hero of chaos....army*:

3.2.5 Penutup

Media merupakan institusi yang ikut bertanggung jawab atas pencitraan calon presiden pada pilpres 2009. Salah satu proses pencitraan adalah adanya produksi wacana yang dibangun oleh kelompok dominan yaitu kandidat asal Jawa adalah kelompok masyarakat yang berhak menjadi Presiden RI. Wacana tersebut berhadapan dengan wacana yang merepresentasikan bahwa calon dari luar Jawa kurang berhak menjadi Presiden RI.

Di sini media memang tidak berhubungan langsung dalam proses produksi, tetapi dalam melakukan proses reproduksi media bekerja melalui ideologi yang diyakini. Dengan kata lain, pencitraan media telah melewati transformasi wilayah representasi ideologis. Sistem representasi tersebut dibentuk dalam struktur ketidak sadaran melalui ideologi. Ideologi dioperasionalkan dalam jaringan diskursif melalui wilayah semantik. Dalam diskusi *facebookers* menyebut daerah di mana JK berasal dengan kata ganti 'luar Jawa' yang secara dikotomis berbeda dengan "Jawa". Kata luar Jawa memiliki makna bahwa mereka merupakan 'the others'.

Sebagaimana terminologi '*black*' yang mengandung arti perjuangan terminologi 'luar Jawa' juga memiliki makna perjuangan kelas. Dibalik kata luar Jawa ada makna yang dibangun yang ketidaksetaraan. Oleh karena itu, untuk menjadi setara orang luar Jawa harus berjuang. Berjuang untuk menjadi Jawa tentunya tidak mungkin, karena persoalan ras adalah persoalan yang melekat pada ciri biologis seseorang.

3.3 Say No To Kandidat Presiden 2009 (Analisis Gender)

3.3.1 Pengantar

Analisis tentang gender dimulai dengan pertanyaan besar dalam FB "Say No To Megawati" = *black campaign* bukan yah ?? Berbeda dari dua tulisan sebelumnya, fokus dari tulisan ini adalah pada FB *Say No To Megawati*, karena FB ini secara khusus membicarakan tentang Megawati. Pertanyaan tersebut dijawab oleh seorang *facebooker* dengan mendefinisikan partisipasi rakyat Indonesia seperti di bawah ini.

Say No To Megawati (clean)

Global Basic Info Type: Just for Fun-Totally Random
Description: patah tumbuh hilang berganti, ini bukan *black campaign*, tapi murni aspirasi rakyat analisis yang tidak rela negeri ini dipimpin oleh orang yang tidak kompeten & bukan negarawan

yang mendukung di sini adalah:

- * warga negara analisis yang tidak berafiliasi dengan partai politik/capres manapun serta tidak mempunyai kepentingan politik atas hasil dukungan grup ini
- * user *facebook* yg mempunyai *account* asli (bukan fiktif) berbeda dengan grup sebelumnya, komentar yang termuat di *wall* haruslah dengan bahasa santun dan dapat dipertanggung jawabkan

Tulisan ini merupakan upaya untuk meneliti apa yang diungkapkan oleh individu di dalam internet. Sebagai media yang disebut sebagai media baru, internet diasumsikan merupakan mekanisme bagi individu dan masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya yang berbeda dari wacana yang diberitakan di media massa. Seperti telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa di dalam proses mengangkat hal-hal yang penting di dalam internet, tulisan ini menggunakan kerangka dari Sara Mills. Metode penelitian yang diajukan oleh Mills yaitu analisis wacana diterapkannya pada masalah gender. Akan tetapi, di dalam tulisannya Mills juga menggarap ide lain.

Kerangka Mills memberikan waktu dan ruang yang cukup sebagai awal proses analisis teks yaitu dengan menyarikan struktur diskursif yang muncul di dalam internet. Dalam kenyataannya, informasi yang diperoleh dari internet sangat banyak dan beragam sehingga perlu dilakukan sebuah pemilihan. Berdasar pertimbangan ini yang digarap adalah 'gerakan' *Say No To Megawati*. Pertimbangan lainnya adalah tulisan ini memang memfokuskan pada isu perempuan.

Dalam pandangan teoritiknya, internet merupakan tempat di mana interaksi dilakukan secara *interface*, bukan *face to face* seperti interaksi pada umumnya. Dalam hal ini belum banyak diketahui apakah diskriminasi yang dialami perempuan di ruang publik pada umumnya, juga ditemukan di dalam internet. Kajian ini masih melihat konteks politik yang ada di dunia maya dan belum melihat karakter sosial politik yang berkembang di ruang maya. Berdasarkan pandangan dari Mark Poster ternyata perempuan mengalami diskriminasi seperti juga yang diamalinya di dunia nyata.

The disadvantages suffered by women in society carries over into "the virtual communities" on the Internet: women are underrepresented in these electronic places and they are subject to various forms of harassment and sexual abuse⁸.

Termasuk di dalamnya adalah konteks kekerasan terhadap perempuan yang berbentuk pelecehan seksual. Menyadari hal ini tentu menarik untuk melihat apa yang terjadi pada konteks *Say No To Megawati* (selanjutnya disebut dengan SNTM), yang memang ditujukan pada seorang perempuan (atau siapapun dia?).

Di dalam konteks gerakan perempuan, menarik untuk melihat konteks gelombang feminis yang ketiga. Menurut Sara Mills gerakan ini merupakan kelanjutan dari gelombang pemikiran perempuan. Dasar pemikiran dari gelombang pemikiran feminis yang ketiga adalah perempuan bersifat heterogen. Gerakan seperti ini muncul karena banyak kenyataan perempuan tidak dapat dilihat dengan pemikiran feminis gelombang kedua yang sudah tersedia. Justru karena perempuan bersifat heterogen, karenanya penjelasannya juga akan beragam. Pemikiran feminis gelombang ketiga yang sesuai dengan kajian ini adalah pemahaman bahwa pemaknaan gender tidak hanya ditentukan oleh perempuan atau laki-laki saja, melainkan laki-laki dan perempuan ber'*co-construct*' saling bekerja sama memaknai kondisi perempuan.

Rather than meanings being imposed on women, Third Wave feminists consider meanings to be co-constructed. Thus within particular contexts, women and men engage in the contestation and affirmation of particular types of practices and interpretations. What something means in a particular context is the result of the actions of all of the individuals concerned, negotiating with the institutional constraints of status and institutionalised linguistic routines⁹.

⁸Mark Poster, *CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere*, University of California, Irvine, Copyright(c) Mark Poster 1995

⁹Sara Mills, (tanpa tahun), *Third Wave Feminist Linguistics and the Analysis of Sexism* School of Cultural Studies, Sheffield Hallam University,

Dengan demikian, menarik untuk melihat bagaimana laki-laki dan perempuan memberi pemaknaan terhadap perempuan dan politik, dalam kasus ini adalah komentar terhadap Megawati di dalam FB. Beberapa dari komentar yang muncul di dalam data adalah komentar terhadap kebiasaan Megawati ketika menjabat sebagai presiden. Meskipun masih dalam taraf awal, tulisan ini mencoba untuk melihat konteks kebiasaan politik Megawati sebagai konteks perempuan di dalam politik. Pada kenyataannya tidak mudah melakukan hal ini karena belum ada lagi perempuan dalam tingkat yang sama yang dapat dipersandingkan dengan kebiasaan dari tindakan politik Megawati.

Pemikiran Sara Mills menjadi sangat menarik untuk digunakan menganalisis gender di dalam FB justru karena ada masalah di dalam identitas pemilik akunnya. Identitas akun individual dapat dengan mudah di' manipulasi' baik karena gender, umur maupun karakteristik lainnya. Kutipan yang digunakan oleh Mills ini menyatakan bahwa identitas bisa menjadi tidak terlalu penting karena yang akan sangat berpengaruh adalah ideologi 'gender' yang dimiliki oleh pemosting.

Mary Bucholtz characterises the concerns of Third Wave feminism within the following themes: 'that language users' identities are not essential to their natures but are produced through contingent social interactions; that those identities are inflected by ideologies of gender and other social constructs; that speakers, writers and signers respond to these ideologies through practices that sometimes challenge and sometimes reproduce dominant beliefs; and that as new social resources become available, language users enact and produce new identities, themselves temporary and historical, that assign new meanings to gender' (Bucholtz, 1999: 20).¹⁰

Collegiate Crescent, Sheffield S10 2BP, <http://www.shu.ac.uk/schools/cs/teaching/slm/index.html>, diakses 5 Juni 2010.

¹⁰Diambil dari Sara Mills, (tanpa tahun), Third Wave Feminist Linguistics and the Analysis of Sexism School of Cultural Studies, Sheffield Hallam University, Collegiate Crescent, Sheffield S10 2BP, <http://www.shu.ac.uk/schools/cs/teaching/slm/index.html>, diakses 5 Juni 2010

Dalam tulisan itu Mills menggunakan analisis bahasa seksis dengan menggunakan pendekatan pemikiran feminis gelombang ketiga. Konteks pemikiran feminis gelombang kedua mengangkat bahasa yang seksis dan bahkan memiliki kelompok yang menggarap isu ini di dalam masyarakat. Akan tetapi, konteks perempuan gelombang ketiga yang heterogen itu kurang menguntungkan analisis bahasa yang seksis. Perkembangan ini kemudian menghasilkan adanya perbedaan antara bahasa yang seksis dan bahasa seksis yang terjadi secara tidak langsung (*indirect*).

... that is, sexism which manifests itself at the level of presupposition, and also through innuendo, irony and humour, or which is prefaced by disclaimers or hesitation (Mills, 1998)¹¹

Dalam tulisan ini pendekatan belum secara lugas menggunakan bahasa yang seksis walau tidak langsung sekalipun, namun pemikiran Mills sangat membantu mengkategorikan data yang ada.

Data dalam tulisan ini diambil dari FB SNTM dan beberapa *blog*. Hal ini disebabkan karena di dalam dunia maya semua hal ber-*link* dengan hal lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan dengan pasti. Tetapi di dalam kasus ini yang ditekankan adalah suara tentang masalah gender di dalam proses pilpres yang ada. Gender menjadi pilihan yang menarik karena salah satu calon adalah perempuan, dan di dalam FB maupun *blog* terdapat sebutan, opini, dan pandangan politik yang disampaikan dengan ringan yang berkaitan dengan gender. Dalam kaitannya dengan metode penelitian Mills, ungkapan yang diperoleh di dalam FB dalam kategori gender merupakan upaya untuk mengangkat struktur diskursifnya. Pada proses ini analisis dilakukan pada teks dan belum memasukkan elemen pengirimnya, khususnya dalam kasus ini adalah apakah pengirim adalah perempuan atau laki-laki. Salah satu masalah yang membuat elemen ini belum dapat dilakukan adalah adanya

¹¹*Ibid Sara Mills, (tanpa tahun), Third Wave Feminist Linguistics and the Analysis of Sexism School of Cultural Studies, Sheffield Hallam University, Collegiate Crescent, Sheffield S10 2BP, <http://www.shu.ac.uk/schools/cs/teaching/slm/index.html>, diakses 5 Juni 2010.*

kemungkinan bahwa individu dapat memasukkan elemen gender yang sesuai dengan keinginannya tetapi bukan yang sesungguhnya.

Pada awalnya gerakan ini dinamakan *Say No To Megawati* yang mencapai jumlah *hit* yang spektakuler. Akan tetapi, FB itu dianggap menyebarkan kejelekan dengan bahasa yang dianggap kasar. Sehubungan dengan itu, FB tersebut ditutup sebelum tim sempat melakukan pengunduhan. Untuk mengatasi ini gerakan tersebut mengganti namanya, dan berdasarkan informasi tersebutlah tulisan ini dibuat.

facebook Home Profile Friends Inbox 4

Pages are now more like profiles.
Pages have been updated to behave more like your friends' profiles. Now they feature a Wall, where you can start to see posts by Pages in your News Feed.

Say "NO!!!" to Megawati [Become a Supporter](#)

Wall Info Photos Boxes

 **Diarhadi Warsito hamam firdaus** : bukan kok seperti sebuah skenario, namanya juga politik, t masih di angka 7000 an, dan orang2 yang bergi dengan kampanye BLT mega dan ke pilpilan ni lainnya page ini dibuat spontan tanpa maksud m ming banyak yg memanfaatkan,, terima kasih
2 seconds ago · Report

 **Lilis Maesarohi oh...** ternyata yang membuat bu to..djambut.
2 seconds ago · Report

 **Diarhadi Warsito hamam firdaus** : bukan kok seperti sebuah skenario, namanya juga politik, t masih di angka 7000 an, dan orang2 yang bergi dengan kampanye BLT mega dan ke pilpilan ni lainnya page ini dibuat spontan tanpa maksud m ming banyak yg memanfaatkan,, terima kasih

Information

Country:
Indonesia

Current Office
Party:
PDI Perjuangan

Komentar terhadap Megawati sangat banyak sehingga situs tersebut ditutup. Berdasarkan informasi dari Detiknet¹², ternyata kelompok ini tidak mati dan muncul dengan nama lain dan dengan penekanan pada bahasa dan tidak mengangkat masalah SARA. Kelompok komentator tentang Megawati memiliki nama lain seperti 'Say No To Megawati (clean)' dan 'Katakan Tidak untuk Megawati Sukarno Putri'. Berdasarkan informasi dari Detiknet, *Say No To Megawati* mampu mendapatkan peserta hingga 97 ribu orang, namun ketika ada petisi untuk tidak memilih Megawati yang berpatokan pada angka 1 juta tanda tangan, hanya mampu mendapatkan pengikut sebesar 644 tanda tangan pada 7/4/2009.

Siapa orang di dunia maya, salah satu *posting* menyatakan dirinya seperti ini.

tau kenapa? karena semua penghuni dunia maya pinter2..kan orang pinter musuh "Bu MegA"...! hehehe

Masyarakat dunia maya jika dilihat dari kelas sosial adalah mereka yang sudah memiliki akses dan kemampuan untuk berinteraksi di dunia maya. Mereka adalah generasi muda yang masih bersemangat, dan tentu saja memiliki keinginan untuk keluar dari kemelut ekonomi. Mereka adalah musuh Mega karena tidak dapat dipengaruhi mereka.

Aktivitas SNTM ini memiliki banyak pendukung, dan di dalam *posting* yang ada terdapat himbauan bagi pro Mega untuk membuat laman yang serupa.

Ayo dong...mana pendukung Ibu Mega...? Buat group yang bisa meng-counter dong...misalnya "Say Yes To Ibu Mega" gitu..

Dengan cara sebagaimana diutarakan *facebooker* di atas maka Megawati tidak perlu bersikap antipati terhadap kelompok ini.

¹²Selasa, 07/04/2009 13:01 WIB Grup 'Say No To Megawati' Tak Mau Mati, **Wicak Hidayat** – detiknet, diakses 25 Mei 2010.

Berdasarkan penyisiran terhadap isi dari FB *Say No To Megawati (clean)* terdapat beberapa kategori yang ditemukan. Pembuatan kategori ini berdasarkan pernyataan dari komentar FB tersebut. Di bawah ini adalah paparannya:

3.3.2 Sebutan

Kategori sebutan merupakan label yang diberikan oleh mereka yang berkomentar terhadap Megawati sebagai satu-satunya calon presiden perempuan. Sebutan yang berhubungan dengan kecenderungan tindakan politik yang pernah atau yang sedang dilakukan oleh Megawati. Seperti di bawah ini

MEGAWATI SI RATU "PLIN-PLAN INDONESIA"?

Megawati....tukang bikin sensasi....

perempuan tidak tau malu!!!!

Megawati itu sedang melakukan gambling dan political suicide...

no to Mega... >>> udh ra'yatnya mlarat, Presidennya Tidak Pintar lagi...

Jika melihat *posting* yang dapat dikategorikan sebagai sebutan ini, *facebooker* menjuluki Megawati berdasarkan pada tindakan politiknya. Sebutan yang secara langsung mengacu pada perempuan adalah sebutan ratu. Itu pun karena tindakan PDIP yang awalnya tidak setuju pada BLT, namun pada akhirnya menyatakan diri sebagai partai yang mengawasi BLT.

Dari komentar yang masuk ada pula yang masih memperhitungkan dan menghormati Megawati. *Posting* seperti di bawah ini memperlihatkan beberapa simpati pada beliau.

dari apa yg saya rasakan sejak pemerintahan Suharto hanya pemerintahan Ibu Megawati yang mampu menurunkan nilai tukar dolar kpada rupiah apakah anda akan menutup mata dr kenyataan saya bukan membela atopun kampanye saya di sini hanya ingin berbagi cerita dr hasil kerja Ibu Megawati yg di diskrimisasi kaum selamat berjuang Ibu Mega

Mereka yang tidak simpati pada Megawati melihat sisi yang negatif berdasarkan pandangan mereka, padahal Megawati juga pernah menghasilkan prestasinya sendiri. Sebuah pencapaian yang sesuai dengan situasi di mana dia berada.

Salah satu komentar menyatakan ketidaksetujuannya terhadap situs yang berisi komentar yang dapat dikategorikan sebagai komentar yang menjelekkan Megawati.

bukannya gw dukung Ibu Mega ya, tapi seharusnya situs yang menjamur ky gini bs di kurangi dikit lah... kita boleh benci orang tapi kita jangan nebar benih kebencian ama orang lain. kita tau kalau aset negara dan ketidakkonsistenan pemimpin jatuh pada Ibu Mega pada kepemimpinannya tapi bkn berarti itu jadi tolakan kita bwt mencerca pemimpin... itu gunanya kita sebagai warga negara. kita harusnya lebih resolusier lah... apa yang terjadi jangan biarkan membuat kita kalah am keadaan, siapa pun pemimpin kita punya kebebasan atas apa yang kita pilih untuk hidup, jangan terlalu bergantung. jangan tanya apa yang kita negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang kita berikan kepada negara... ud pada join *Say No To Megawati* ga d fb???? gw ud join tuh... rame looh!!!

Dalam konteks penggunaan sebutan, beberapa dari sebutan memperlihatkan bahasa yang seksis yang menyudutkan perempuan. Sebutan tersebut muncul dari sikap Megawati sendiri di dalam mengambil tindakan politik yang dinilai tidak konsisten. Sementara itu, ada pula bahasa yang seksis yang mengacu pada tubuh seperti bentuk bibir ataupun umur.

3.3.3 Kemiskinan

Komentar yang berhubungan dengan isu kemiskinan diangkat oleh PDIP. Menarik untuk melihat bahwa isu yang diangkat oleh PDIP diangkat sebagai isu yang memberikan mimpi pada masyarakat.

Denger2 bliau nya terpengaruh juga sama koment2 di *blog* ini...hahaha... takut nih yee? Kenapa takut kalo memang dia gak cuma ngumbar janji... Sembako murah... mimpi kalee...

dikira rakyat bodoh apa..bisa mnurunkan sembako begitu saja...lantas siapa yg mau dikorbankan...

PETANI??? Meninjau pasar juga ngacir... karena diajak salaman sama wong cilik. Takut tangannya kotor ya Bu Mega???

Kemiskinan dalam konteks *posting* seperti ini terlihat memiliki dimensi yang beragam, di mana permintaan sembako murah berkaitan dengan kemiskinan pada bidang pertanian secara umum. Dalam hal ini PDIP belum melihat dimensi ini secara khusus sehingga batasan tentang kemiskinan yang disajungkannya kurang memperhatikan realitas bidang pertanian. Selain itu, sorotan media televisi membuat masyarakat dapat mengamati perilaku yang dilakukan oleh para capres termasuk Megawati. Salah satu yang terlihat dengan jelas adalah sikap Megawati terhadap ‘wong cilik’ itu sendiri, di mana dia terlihat kurang tulus.

Kemiskinan muncul di dalam beberapa konteks, salah satunya berkaitan dengan wong miskin yang selalu menjadi isu kampanye PDIP.

Gak takut ketularan wong miskin tapi takut NULARI “Plitat2ya”

Kemiskinan dalam hal ini merupakan sesuatu yang ditakuti dan dilihat sebagai sebuah penyakit. Namun demikian kemiskinan tidak terlalu menakutkan jika dibandingkan dengan tindakan politik Megawati yang terlihat tidak jelas.

Para pemosting dalam hal ini bereaksi terhadap kemiskinan sebagai komoditas politik yang diangkat baik oleh Megawati maupun oleh partai penunjangnya. Pemosting juga menyadari tentang sikap yang ditampilkan oleh Megawati dan pendukungnya terhadap kemiskinan. dalam hal ini terlihat adanya kesenjangan dari tokoh politik yang cenderung elit politik dengan pendukungnya yang menamakan diri kelas bawah. Dalam hal ini baik tokoh maupun dari partai pendukung belum menggarap isu ‘wong cilik’ dalam konteks perkembangan saat ini yang berbeda situasinya dari kata yang sama pada dekade generasi sebelumnya. ‘Wong cilik’ sudah tidak memiliki konsep sosialis yang mendukungnya seperti pada zaman generasi sebelumnya, sekarang

konsep ini sangat berkaitan dengan kemiskinan yang menjadi bagian dari masalah Indonesia.

3.3.4 Demokrasi

Di dalam komentar di FB terdapat pula pembahasan tentang demokrasi meskipun tidak banyak. Komentar ini berkaitan dengan *posting* yang sudah dikutip pada bagian awal di mana dinyatakan bahwa dunia maya adalah orang pandai yang tidak disukai Mega. *Posting* tersebut kemudian menyatakan juga bahwa pendukung Mega adalah

Jadi kesimpulannya yang milih Bu Mega adalah orang b*d*h

Komentar seperti ini kemudian mencuat menjadi salah satu topik yang muncul. Simpatisan Mega tidak menerima sebutan seperti itu;

kamu yang bodoh... soal pilihan, itu hak demokrasi setiap orang. dasar munafik, sok benar, sok suci. Tak mampu menghargai orang lain, siapa bilang kamu orang pintar hanya kamu bisa main internet atau buat grup yang menghujat orang lain. dsar bodoh..

Sebutan kemudian beralih pada pembahasan tentang sikap group ini yang dianggap tidak mampu menghargai orang lain.

Tindakan seperti ini kemudian memunculkan sebuah pernyataan bahwa yang disebut demokrasi adalah sebuah pikiran semata. Dalam konteks FB apa yang dinyatakan merupakan bagian dari pikiran yang dimiliki mereka.

Hehehhe kebebasan itu cuma ada di alam berpikir 😊

Kebebasan seperti ini hanya dimungkinkan dan barangkali ada di dalam laman seperti FB. Pada kehidupan keseharian interaksi manusia, sikap seperti ini mungkin sudah memicu sebuah konflik terbuka.

Ketika konsep demokrasi menjadi bagian yang dibahas, demokrasi yang didiskusikan adalah demokrasi yang berkaitan dengan dunia maya. Di dunia maya konteks demokrasi mendapatkan bentuk lain yaitu adanya pemahaman tentang demokrasi di dalam pikir. Dalam hal

ini mempertanyakan demokrasi dalam pikiran yang dikomentari sebagai ‘bukan demokrasi’ sehingga demokrasi yang hidup dalam keseharian adalah demokrasi dalam konteks ekspresi langsung. Mereka yang bergiat di FB pada umumnya adalah masyarakat umum yang kecenderungan untuk turut dalam ekspresi politik secara langsung juga terbatas. Di sini terlihat adanya ‘kelas’ yang berbeda dan terkait pula pada perbedaan pemahaman tentang demokrasi.

Sebutan juga berhubungan dengan tampilan fisik dan juga karena tindakan politiknya. Seperti bibir yang diacu oleh salah satu pemosting. Hal ini barangkali muncul karena di dalam media Indonesia bibir perempuan menjadi salah satu komoditas yang bisa dijual, seperti yang dilakukan oleh Mpok Ati. Mpok Ati mendapatkan banyak rezeki karena dia menggunakan bibirnya di dalam penampilan.

Memang jelek.. sejelek plintat plintut bibir dia ... hehehe...
maaf... nyinggung fisik neh

Ada juga yang masih netral dengan memberikan komentar terhadap beberapa capres lainnya

SBY: Presiden Look
Megawati: Pesinden look
Jusuf Kalla: Cemen Look

Komentar seperti ini dapat dilihat sebagai komentar yang berasal dari mereka yang memiliki simpati pada SBY. Akan tetapi, dalam konteks Megawati, dia disandingkan dengan pesinden. Pesinden sebenarnya bukan sebutan yang buruk, karena di dalam panggung wayang, pesinden adalah bintang yang cantik dan menawan. Akan tetapi, gambaran seperti ini kurang dikenal oleh generasi muda yang cenderung mengetahui cara berpakaian yang modern saja.

Komentar yang juga berhubungan dengan perempuan adalah sebutan ‘mbok’ dan ‘nenek’ Mega untuk memperlihatkan posisinya yang kurang menguntungkan. Konteks fisik ternyata muncul dengan cukup nyata, apalagi dipadankan dengan figur seperti SBY yang dianggap secara fisik sebagai figur yang menarik.

Masih mau milih si mbok ini dan antek2nya bserta org yg g sportif???

gk bakal maju lagi 2014 soal na kita manggil na udah bukan Bu Mega tp nenek Mega^^

Adapun sebutan ‘nenek’ muncul, karena spekulasi yang dilakukan orang jika Mega akan mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2014. Penggambaran di atas memperlihatkan bahasa seksis yang muncul di dalam komentar pemosting.

Kategori lainnya adalah komentar orang terhadap tindakan politiknya. Komentar di sini mengumpulkan pernyataan orang yang cukup rinci tentang dasar mereka menilai perilaku politik. Komentar yang paling riuh rendah adalah komentar terhadap tindakan politik yang dilakukan Megawati pada proses pilpres yang berjalan

Udah kalah mah kalah aja.
Pake nuntut lg skrg !
Cuihh.

Kebetulan karena bersanding dengan Gerindra, PDIP mengajukan protes karena data pemilih yang tidak transparan. Tindakan seperti ini ternyata menuai komentar yang tidak simpatik karena dianggap bahwa Megawati hanya mencari sensasi saja dan tidak bersikap sportif.

iiiiiiiiiiiihhhhhhh...ni ibu, waduh deh, udah kalah g mau ngaku kalah, gmn kalo negara kita di pimpin ma org yg tidak sportif. Udah jelas2 kalah, tp malahan menghimpun partai2 kecil supaya boikot pilpres... piye toh ndo'...???

masih mau milih pemimpin yg g sportif... g legowo.... suka jual2 pulau.jgn2 ntar bisa2 sertifikatnya pulau jawa di gadein buat dapeet uang ke amrik ato imf...hufh!!!

Tindakan protes yang dilakukan Megawati ternyata membuat kesan yang tidak baik tentang dirinya yang kelihatan tidak mau kalah. Selain itu, terdapat kesan bahwa pasangan capres-cawapres PDIP-Gerinda tidak memiliki sikap legowo karena tidak memenangkan pilpres ini.

Adanya kecenderungan untuk mengomentari Megawati dalam konteks bahasa yang seksis. Akan tetapi, hal ini juga disebabkan pilihan tindakan politik Megawati. Dalam hal ini para pemosting merupakan kelompok yang cenderung terpengaruh oleh tindakan yang diambil oleh Megawati, mereka memiliki pandangan nasionalisme yang tidak disadari oleh elit politik. Para elit politik yang mengatasnamakan rakyat di dalam mengambil keputusan ternyata tidak disetujui oleh sebagian dari mereka. Namun tidak memiliki cara untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan politik tersebut. Akibatnya, tidak aneh melihat komentar terhadap tindakan politik Megawati yang tidak disukai mereka. Kelas sosial ini adalah kelas yang memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan yang membuat mereka juga memahami detail yang terlepas dari pandangan masyarakat Indonesia yang tampil di ruang publik politik pada umumnya.

Sikap seperti ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan Megawati, namun komentar terhadap sikap tersebut muncul menjadi salah satu isu dari SNTM.

wah hati-hati nih mengingat sifat Megawati yang ngambekan kaya anak-anak dan banyaknya anggota PDIP yang dengan begonya mau nurut aja apa kata Megawati seandainya nanti Mega ngga kepilih jadi presiden lagi dia pasti bakal ngga terima, dan masa pendukungnya Mega – bisa-bisa memincu kerusuhan

Sikap tersebut dianggap sebagai sikap yang kekanak-kanakan, tidak dewasa. Namun karena pendukung Megawati dianggap dapat membuat kerusuhan karena mereka tidak terima terhadap sikap yang berbeda dari kebiasaan mereka.

Komentar yang berhubungan dengan kemampuan politik juga menjadi isu yang menarik untuk diperhatikan. Salah satunya adalah *posting* yang membandingkan dengan istrinya. Tentu saja perbandingan ini adalah pada kemampuan keduanya di dalam ruang sosial dan kemampuan pribadi.

Menurut saya, Megawati tidak mengeluarkan kebijakan atau pun pemikiran, karena Megawati tidak mampu berpikir apa-apa & saya yakin istri saya jauh lebih pandai daripada beliau dalam hal berpikir, baik secara teknis maupun *soft skills*.

Sikap Megawati juga dianggap tidak memperlihatkan sikap yang baik karena masyarakat dapat menilai sikap seperti ini. FB menjadi lahan yang subur untuk komentar yang tidak terkatakan dan tidak tersampaikan sebelumnya.

Bener muna memang ibu qta yg satu ini. Kelihatan banget membodohi masyarakat. Tidak legowo, setiap 17 Agustus tidak mau hadir di istana negara, malah bikin acara sendiri, itu namanya lebh mementingkan golongan. Sudah gitu balibonya besar2 dipasang di istana batutulis bogor, itu kan milik negara, apa mau diprivatisasi juga? bisa2 nanti kalo jadi presiden lagi semua aset negara dialihkan jadi aset pribadi neh. Arogan banget..katanya memihak wong cilik????

Pendapat yang masuk juga berupa himbauan terhadap keterlibatan Mega di politik. Pada umumnya berisi himbauan untuk tidak mencalonkan diri menjadi capres lagi.

Megawati bagus...tetapi lebih bagus lagi kalo:

1. ga usah maju lagi karena msh bnyak yg lbh baguusss
2. harus mau dikritik jgn cuma kritik terus
3. jangan plintat – plintut kemarin kritik BLT tapi iklannya meng-klaim mengawal BLT

Himbauan yang ada adalah himbauan yang muncul karena sikap Megawati juga. Seperti sikap tidak sportif ternyata sangat membekas pada para *facebooker* ini.

kasian... yang sabar nak... belajar yang giat, jangan ngambek kalo kalah... masa ngga mau silaturahmi... ibadahnya ngga diterima kalo masih marahan ama pak esBeye... (bilang pak esBeye kaya anak kecil, tp malah Bu Mega yang kaya anak kecil, ambekan)

belajarlah berdemokrasi seperti HILARY CLINTON !!!
setelah kalah dalam pilpres langsung mendukung BARACK

OBAMA sekalipun tidak diperhitungkan sebelumnya karena dari golongan minoritas kulit hitam.
kapan ibu mengucapkan selamat kepada BAPA SBY ???
rakyat menunggu kelogowoan hati ibu !!!
JANGAN TERULANG TAHUN 2004

Salah satu komentar menyinggung tingkat pendidikan, namun komentarnya adalah untuk membedakan tingkat pendidikan dengan kemampuan. Ada kemungkinan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang biasa saja, namun memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Jangan sama-ratakan tingkat pendidikan SMU dengan tingkat intelegensi dan kedewasaan berpikir seseorang dong. Emang yang sudah sarjana apa Jaminan pasti lebih baik dari orang yang cuman lulusan SMU, SMP dll? BELUM TENTU!!!
Jadi nilailah orang dari cara berpikirnya, bukan tingkat pendidikannya! dalam kasus Bu Mega.... beliau memang kurang bijaksana dalam bersikap dan kurang berpikir panjang (apalagi kalo udah di atas podium kampanye, ngomong nya menggebu-gebu sampai termakan ucapan sendiri..... weleh).

Sebagai pemimpin yang perempuan, padanan yang dijadikan contoh adalah pemipin kelas dunia seperti Hillary Clinton yang sepanjang kehidupannya sudah mendapatkan pendidikan politik yang baik. Dalam konteks perbandingan seperti ini keberadaan Mega menjadi sebuah harapan bagi sebagian orang untuk menghasilkan sesuatu yang sangat hebat. Namun di sisi lain, Megawati juga berhadapan dengan kenyataan adanya masalah generasi dalam regenerasi pemimpin di Indonesia. Megawati juga berhadapan dengan beberapa laki-laki yang tampak menonjol di dalam politik Indonesia. Padanannya dengan SBY dalam konteks tubuh memperlihatkan kecenderungan masyarakat Indonesia untuk melihat laki-laki sebagai pemimpin. Tidak hanya sebagai pemimpin, laki-laki yang cocok sebagai pemimpin adalah orang dengan tubuh yang secara rata-rata lebih besar dibandingkan dengan rata-rata orang Indonesia.

Pada dasarnya himbauan yang ada adalah agar Mega tidak lagi mencalonkan diri sebagai capres 2009 dengan berbagai alasan seperti di bawah ini.

Bu tolong disikapi dengan arif. 3 hari hampir 40 ribu lebih. Kalau 1 atau 2 minggu, berapa banyakkkkkk. Kalau semuanya menyatakan SNTM, berarti Bu, harus legowo untuk mundur. Dari pada kalah dalam pilpres nanti, malah makin memalukan.

Mega for president? walah bu piye iki ngaca apa. emang apa yang sudah diperbuat dulu waktu diberi kesempatan jadi president..apa ?? nggak ada bu..sekarang malah menghujat kanan kiri apa gak malu

Ada pula yang menghimbau supaya Megawati memfokuskan diri menjadi panutan masyarakat. Salah satunya adalah dengan menghentikan komentarnya terhadap lawan politiknya.

Bu Mega. Kita jangan menghina orang yang sudah terhina, walau bagaimanapun hinanya orang tersebut. Seburuk buruknya beliau, ia pernah memimpin negari ini. Tidak setiap orang bisa melakukan itu, walaupun banyak hasil kepemimpinannya yang dihina, janganlah kita menambah kehinaannya. Bu Mega sadarlah surga di bawah telapak kaki ibu, langkah-langkah ibu yang sholehah akan membawa anaknya ke surga, ibu hendak mencari apa dengan berpolitik? Sebaiknya ibu menjadi penasehat bangsa dengan kata-kata yang bijak, sehingga kita bangga, bahwa negara pernah dipimpin oleh ibu yang memiliki ayah yang terhormat, janganlah langkah ibu mencelakakan umat/bangsa dan menghinakan langkah yang telah ditorehkan ayah ibu. semoga ibu insaf dan sadar. Masih ada tugas yang lebih mulia dari sekedar menjadi presiden.

Himbauan seperti ini merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat Indonesia yang butuh panutan yang bijaksana mengatasi gejolak sosial politik yang sangat tinggi.

Komentar yang muncul adalah kecenderungan pribadi Megawati di dalam bertindak yang menjadi perhatian dari pemosting. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa tindakan politik tokoh politik perempuan juga menyangkut kecenderungannya secara pribadi dan dalam tindakan kesehariannya. Hal yang kurang menjadi perhatian dari masyarakat terhadap tokoh politik laki-laki. Artinya, di dalam menilai sebuah tindakan maka tokoh politik perempuan masih membawa beban tradisional perempuan yaitu dinilai tidak hanya pada domain publik tetapi juga pada domain privat.

Komentar yang berhubungan dengan NKRI merupakan komentar yang menarik karena PDIP selalu menyatakan dirinya pro NKRI. Akan tetapi, pandangan para *facebooker* ini bisa berbeda dari apa yang dikembangkan oleh PDIP.

Dan saya yakin sampai sekarang Megawati tidak tahu kalau dirinya dimanfaatkan oleh orang2 sekelilingnya, & itu disebabkan karena kebodohnya yang luar biasa. Entah kekuatan external apa yang telah menghambat keluarga & sahabat Megawati untuk mengkritiknya Saya yakin musuh Indonesia sangat mendukung terpilihnya Megawati karena di tangan Megawati, Indonesia akan luruh & terpecah, & itu tentu menguntungkan pihak2 lawan. Semua sumber daya akan sirna termasuk minyak & gas, kayu, & hasil laut, & Indonesia akan berubah menjadi negara sangat miskin seperti di Afrika.

Ternyata kepentingan politik sangat memainkan peran di mana kelompok yang menginginkan Megawati mewakili kelompok yang ingin Indonesia terpisah dan miskin. Analisis seperti ini yang menarik karena memperlihatkan kepedulian penulisnya terhadap kondisi Indonesia.

Kepercayaan yang berkembang di masyarakat memiliki dimensi yang berbeda dari apa yang biasa diketemukan di masyarakat. Salah satunya adalah pendapat orang yang dianggap ‘memiliki ilmu’ yang dapat melihat masa depan.

klo Mega kepilih lagi, itu sama aja dapet musibah, jadi inegt komentar kiyai saya wkt gusdur kepilih, dia bilang “Indonesia

kecelakaan” taunya benar gusdur kepilih Indonesia hancur...
yang jelas kita ga boleh sembarangan pilih, banyak pilihan ko,
pokoknya jangan smp bangsa Indonesia malu klo presidennya
lagi orasi, pidato, dialoge, kunjungan luar negeri, cos ga
pantes... justru sebaliknya slm damai....

Pendapat seperti ini merupakan gosip yang di'*share*' di antara kelompok kecil. Sekarang pendapat tersebut tersebar dengan caranya yang berbeda dari pendapat yang muncul di ruang publik.

Komentar pemosting terhadap NKRI dan juga kepentingan Indonesia yang kurang terwakili di dalam daftar keputusan politik yang diambil oleh para tokoh politik, dalam hal ini Indonesia, memperlihatkan pandangan nasionalisme mereka. Tidak dalam konteks nasionalisme yang buta melainkan nasionalisme yang menyadari potensi Indonesia, potensi diri mereka dan bagaimana mereka 'dirugikan' paling tidak dalam konteks bahwa mereka diaanggap tidak mengetahui politik. Selain itu, juga pandangan mereka yang menyadari tentang perkembangan dunia global.

Komentar terhadap tindakan politik merupakan reaksi yang diperoleh setelah melihat proses yang terjadi pada saat pilpres 2009. Salah satunya adalah ketika pengikut Megawati meminum air cucian kakinya.

iya sempet ngakak juga pas ada simpatisan Mega yang minum
air basuhan kakinya ... 😊
itu bisa rasa macem-macem kali mas...ada yang rasa kopi, teh,
dll...silahkan mencoba 😊

Ritual ini di beberapa tempat merupakan sesuatu yang biasa saja, seperti yang dilakukan oleh Paus. Namun, perbedaannya terletak pada filsafatnya, di mana Paus meminum air cucian dari kaki orang. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan welas asih dan pengabdian Paus. Barangkali hal ini merupakan tindakan kekuasaan yang biasa saja. Akan tetapi, generasi yang masuk ke dalam FB, adalah generasi muda yang kurang memiliki konteks terhadap pola kekuasaan seperti itu. Akibatnya,

generasi muda kurang dapat menerima ritual kekuasaan seperti itu sebagai sebuah tindakan yang khusus.

Para pemosting yang memiliki kecenderungan umur orang muda tidak memiliki konteks ‘feodal’ seperti yang dimiliki oleh pengikut fanatik. Feodal dalam hal ini adalah tindakan seperti kultus individu. Dalam hal ini tidak ada yang dapat dipersalahkan karena memang terhadap kesenjangan generasi di mana tindakan kultus individu seperti itu tidak pernah dialami oleh mereka yang sekarang mengembangkan sikap individu seperti kemandirian. Meminum air cucian kaki dilakukan oleh pengikut Katolik dalam menghormati kepemimpinan Paus. Akan tetapi, konteks seperti itu terlihat tidak sesuai dengan konteks sosial di Indonesia. Dalam hal ini politik masih dilihat sebagai ranah yang seharusnya demokratis

Perilaku keseharian Megawati merupakan bagian dari berita keseharian yang menarik untuk diperhatikan. Dalam kehidupan keseharian ini, tindakan politik menjadi salah satu elemen yang diperhatikan oleh masyarakat. Akibatnya, kontroversi tindakan politik yang diambilnya menjadi bulan-bulanan percakapan, seperti masalah BLT.

ia lucu memang, di satu pihak ia menentang BLT, tapi akhirnya justru ikut menyukseskan, dasar politikussss.... kayaknya itu petanda klo seandainya Mega nanti yang jadi presiden, BLT dihapus, kasian donk org tua yang dapat BLT sekarang.

Pada awalnya PDIP menolak kebijakan BLT. Akan tetapi, kemudian partai tersebut menganulir pandangan tersebut. Sesungguhnya PDIP seharusnya memperhatikan hal ini karena sebagian dari pemilihnya adalah wong cilik. Akibatnya, tindakan ini dianggap sebagai kesalahan tindakan politik PDIP yang merugikan citra dirinya sendiri.

Para pemosting juga menanggapi kebiasaan Megawati mengomentari para lawan politiknya. Tindakan tersebut dinilai sebagai kebiasaannya untuk menjelekkkan orang lain. Masyarakat dunia maya

merupakan kelompok masyarakat yang bisa menilai tindakan politik yang tidak populer yang dilakukan oleh Megawati.

Ibu Megawati sangat baik dan bagus untuk jadi presiden RI, tetapi dengan catatan kebiasaan menjekan orang lain dibuang, kedua kebiasaan menjual aset-aset negara juga tidak lagi terjadi. Ketiga, beliau tidak usah sok pahlawan dengan mengawal BLT, karena kemaren2 dia sangat anti sekali bahkan menghina.

Kemudian, kebiasaan kampanye yang terlihat banyak memberikan janji, juga menjadi hal yang merugikan Megawati. Ketika Megawati menjadi presiden, harapan masyarakat terhadap kepemimpinan dia sangat besar, bahkan mungkin besar sekali.

Singkat saja..., Bu Mega introspeksilah jangan bilang mampu mengumbar janji mengubah nasib rakyat jika dari lubuk hati yang paling dalam tidak ada kemampuan. Waktu sudah membuktikan ketika berkuasa tidak banyak mengubah nasib rakyat. Contohnya saya yang tidak pernah kebagian jual pulau... Ha.. Ha...

Terutama karena Megawati memiliki karakter yang tidak dimiliki kontestan lain seperti kelas sosialnya, pengalamannya pada masa Orde Baru, dan karena dia perempuan. Namun, ketika dia memerintah harapan tersebut pupus, sehingga jatuhnya harapan ini yang menambah beban terhadap lemahnya dukungan masyarakat terhadap Megawati

Komentar terhadap perempuan pilih perempuan. Perempuan pilih perempuan pernah dicanangkan oleh gerakan perempuan ketika menghadapi Pemilu legislatif. Gerakan ini diajukan karena pemilih cenderung memilih laki-laki padahal kandidat perempuan juga perlu diangkat supaya dapat menduduki posisi pengambil keputusan.

wah...kirain ibu-ibu mendukung Bu Mega.... ternyata ndak semua, ya mbak?

Gerakan ini sendiri lahir dari perhitungan bahwa jumlah pemilih perempuan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih laki-laki. Logikanya adalah jika perempuan memilih perempuan maka representasi

perempuan di legislatif bisa bertambah. Pada kenyataannya gerakan ini juga tidak berjalan dengan baik. Untuk Mega pendekatan ini tidak berlaku, karena ternyata para ibu di dalam FB ternyata tidak membela Megawati.

Di dalam memperhatikan politik perempuan, ternyata kehidupan keseharian perempuan menjadi bagian yang tidak terlepas dari pandangan masyarakat, begitu juga keseharian perilaku Megawati. Kecenderungan ini kurang terlihat pada kontestan laki-laki. Dalam hal ini termasuk juga perhatian masyarakat pada gaya kepemimpinan Megawati itu sendiri, kecenderungannya yang mengkritik orang lain menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kecenderungan ini sendiri merupakan kepanjangan reaksi dari politik generasi yang ada, di mana terdapat kecenderungan elit di dalam politik. Hanya saja situasi yang sekarang ini berkembang sudah mulai keluar dari ciri politik elit.

3.3.5 Generasi

Posting terhadap gaya politik yang dimiliki oleh PDIP dan dalam hal ini Megawati adalah kecenderungan politik generasi. Mereka yang 'setia' pada Megawati merupakan pengikut atau mereka yang mengagumi bapaknya. Kecenderungan ini terdapat pada kantong-kantong pemilih tertentu.

pemilih Megawati adalah kebanyakan orang2 yang masih di pelosok yang masih sedikit terbelakang dalam pengetahuan politik (Jawa Tengah dan Bali adalah lumbung suara Mega). Kebanyakan mereka melihat Megawati karena sosok Bapaknya Ir. Soekarno !!!!

Berdasar pada politik generasi tersebut, posisi Megawati di PDIP cenderung bertahan. Dalam hal ini partai masih memandang politik generasi sebagai sesuatu yang penting, padahal masyarakat sudah berubah dengan pesatnya.

siapapun yang jadi presiden nanti OK-lah asal bukan Mega. sadar ato ga sadar sebenarnya Mega cuma boneka di

partainya. coba Mega bukan anak mantan orang no.1 di RI pasti Mega ga bakalan jadi pentolan partainya.

Politik generasi ini kemudian menjadi wacana yang sakti di mana partai mengharapkan Megawati akan menyamai bapaknya. Untuk kalangan muda yang ada di dunia maya jenis politik semacam ini kurang menarik bagi mereka. Mereka dapat diasumsikan adalah individu yang aktif sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka miliki dengan kerja kerasnya.

Dari Pemilu 2004 saya juga nggak pilih Megawati coz' nama besarnya menurut saya hanya ada sama bapaknya...Harapan rakyat yang memilih dia mungkin hanya karena mengagumi image Bung Karno.. dan berharap Megawati akan "sebesar Bung Karno" seperti di masa lalu..padahal

Bagi gerakan perempuan politik generasi adalah kecenderungan yang tidak diinginkan. Pemimpin dalam konteks gerakan perempuan termasuk juga mereka yang dapat tampil walau tidak diikuti oleh dukungan generasi di belakangnya. Dalam konteks seperti itu, pemimpin yang muncul adalah pemimpin dalam masyarakat yang sehat di mana keunggulan memiliki karakter modern seperti pendidikan, dan latar belakang yang memadai.

Politik generasi mengacu pada kecenderungan kebertahanan dari patriarkhi. Secara kebetulan yang menjadi ilustrasi di sini adalah Megawati. Akan tetapi, di dalam konteks besar politik Indonesia, bahkan kecenderungan seperti ini muncul di dalam pilkada juga, seperti calon adalah istri atau anak dari seorang laki-laki yang pernah memegang kepemimpinan. Kecenderungan ini meski menyeruak kembali di politik Indonesia dan memperlihatkan struktur gender yang berdinamika di dalam politik

3.3.6 Pandangan terhadap Pemimpin

Selain pandangan yang berkaitan dengan Megawati, pada *facebooker* ini juga mengejawantahkan karakter pemimpin yang mereka inginkan. Dalam pemahaman mistis Jawa tentang pemimpin, seorang

pemimpin yang sempurna disebut sebagai Satrio Piningit. Seorang laki-laki yang disembunyikan sehingga keberadaannya di dalam masyarakat tidak kelihatan

sebelum satrio piningit datang, gue gak akan nyontren,,,!!

Kepercayaan ini rupanya sangat membekas sehingga memengaruhi tindakan politik seseorang. Secara tidak langsung, masyarakat masih dipengaruhi oleh pandangan metafisika dari seorang pemimpin. Dapatlah hal ini disebutkan sebagai pengaruh dari mitos tentang pemimpin yang hidup di dalam masyarakat. Mitos ini masih dipengaruhi oleh kepercayaan bahwa *satrio piningit* secara langsung mengacu pada laki-laki, karena kata *satrio* yang dipergunakannya. Dalam hal ini upaya menggebrak mitos ini dapat mengajukan bahwa kata *satrio* mengacu pada kata pemimpin yang netral gender, sehingga termasuk perempuan yang memiliki karisma sebagai pemimpin.

Pada dasarnya ketika membahas tentang pemimpin, Megawati tidak dianggap layak sebagai pemimpin. Ada *posting* yang memberikan alasan, namun ada juga yang tidak memberikan alasan seperti yang ada di bawah ini.

ye.... 1000% no MEGAWATI tidak layak jadi pemimpin bagaimana seorang lulusan sma dapat memimpin sebagian sarjana dan magister dan doktor?? bisa dihajar kiri kanan dia... masih banyak kan yang lebih pantas??

Karakter seorang pemimpin, antara lain.

sekali lagi saya hanya mau memberi saran kepada semuanya bahwa dalam memilih presiden RI adalah orang yang:

Punya kharismatik tinggi...berjiwa pemimpin.

1. Berpendidikan tinggi... untuk mampu menangani segala masalah... gk dikibulin ntarnya
2. Berpendirian yang tinggi akan keputusannya/dapat dipertanggungjawabkan... gk sekarang mo jadi wapres...besok mo jadi presiden...besok mo dukung pemerintah...besoknya dukung pemerintah supaya

menang Pemilu... (bukan upaya nasib rakyat terangkat)...

3. Udah ah.,sebenarnya masih banyak lagi...yang jelas Ibu Megawati gk masuk kriteria deh...

Sebagai pemimpin keberadaan Megawati disandingkan dengan nama besar Soekarno sehingga kelemahannya menjadi bertambah. Kelemahan Megawati tidak hanya karena kelemahan individu melainkan juga kelemahan yang diperbandingkan tersebut.

kalo dulu pak Karno (bukan Rano Karno, tp Soekarno) bisa *buat* negeri ini berdiri tegak, tapi knapa anaknya cuma bisa *buat* adu domba di negeri ini y ??? cela sana sini nyari dukungan...

Dalam kepemimpinan saat ini isu-isu khusus seperti korupsi menjadi perhatian yang besar. Oleh karena itu, masyarakat juga memantau isu-isu yang dilontarkan oleh PDIP atau Megawati sebagai cara mereka membuat penilaian.

Di"kontrak politik"nya Bu Mega knapa ngga ada "pemberantasan korupsi" ?? apa isu itu udah basi ?? makanya ngga ada, atau emang diem" Bu Mega ikut ngedukung KKN??

Masyarakat mempertanyakan isu-isu penting di Indonesia seperti ini karena memiliki kewaspadaan terhadap mereka yang tidak menganggap isu ini sebagai isu penting.

Lanjutkan bro, moga-moga kita bisa mendapat presiden yang cerdas, pantas, emang layak menjadi presiden. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak menyudutkan orang lain

3.3.7 Pemimpin Perempuan

Tema pemimpin perempuan merupakan pandangan yang banyak mewarnai isi *posting* di dalam SNTM. Dalam hal ini keberadaan Mega sebagai satu-satunya tokoh perempuan yang bisa mencapai kursi nomor satu di Indonesia masih merupakan sebuah pencapaian, walaupun

keberadaannya menimbulkan kontroversi. Pendefinisian tentang pemimpin perempuan merupakan gambaran tentang ideologi gender yang hidup di dalam masyarakat. Akan terlihat meskipun mereka yang berpartisipasi melalui FB adalah orang muda dan kemungkinan besar berpendidikan menengah – tinggi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih rancu dalam melihat perempuan sebagai pemimpin.

Kontroversi keberadaan Megawati adalah karena dia adalah seorang perempuan. Di dalam masyarakat masih beredar pandangan bahwa yang menjadi pemimpin adalah laki-laki.

Memang seharusnya yang jadi pemimpin itu laki-laki, bukannya perempuan.

Perempuan memang menjadi tokoh yang kontroversial ketika menjadi pemimpin. *Posting* di bawah ini mengangkat kebiasaan penilaian masyarakat bahwa perempuan diciptakan untuk kepentingan laki-laki.

udah Bu Mega nyerah aja,,,mending duduk manis di rumah nyiapin makanan buat suami kan enak daripada ribet2 cari dukungan sana sini, Ibu itu perempuan gak pantas deh kalo suatu negara dipimpin perempuan. Perempuan kan udah diciptakan buat mengikuti laki-laki dan perempuan itu masih di bawahnya laki-laki,

Adapun *posting*-an di bawah ini mengungkapkan salah satu alasan yang sering diangkat menjadi sebuah argumentasi tentang kepemimpinan perempuan.

percayalah kalo negara dipimpin seorang Wanita niscaya negara tersebut akan menuju kehancuran... dikutip dari sabda rasulullah.

Pandangan seperti ini mendapatkan dukungan berdasarkan pada tataran sejarah Majapahit yang kebetulan dipimpin oleh seorang ratu.

bnr lho swaktu mojopahit di era tri buana tungga dewi jadi hancur. cba googling deh sjarah majapahit. Regards

Posting seperti ini diperkuat lagi oleh pendapat yang berdasar pada pengalaman kepemimpinan Mega

Ah ngeri banget dipimpin sama Megawati.

Cukup sudah sengsara kita 2 tahun efek nya puluhan tahun kita bangun dijual ama si PDIP Aka MEGAWATI.

1. Preman
2. Koruptor
3. Maling rumah dinas (aset negara)
4. Tukang jual murah harta rakyat
5. Yang belain orang idiot semua
6. Capek deh liat muka nya....

Pengalaman kepemimpinan Mega memperlihatkan muka baru di dalam politik Indonesia, namun muka baru tersebut berkaitan dengan hal negatif seperti preman. Menarik untuk melihat bahwa kata rakyat digunakan untuk mendiskreditkan kepemimpinan Megawati. Sebagaimana diketahui membela rakyat adalah jargon yang paling menonjol dari PDIP. Dengan *posting-an* seperti ini PDIP menjadi partai yang kontroversial karena definisi rakyat berdasarkan PDIP berbeda dari pemaknaan masyarakat dunia maya.

Kepemimpinan perempuan memang melekat pada kebiasaan dan tubuh perempuan, sehingga komentarnya adalah

mending mandi kembang ajah

Mandi kembang adalah kebiasaan perempuan yang ingin dilihat cantik dan menawan. Dalam konteks kegiatan paranormal mandi kembang adalah aktifitas untuk membuat perempuan tampak sangat menarik bagi laki-laki dan digunakan untuk menarik perhatian. Mandi kembang juga ada pada beberapa ritual penting di dalam kehidupan seperti prosesi 'siraman' pada budaya Jawa yang dilakukan sebelum seorang perempuan menikah.

Selain itu, kepemimpinan perempuan dikaitkan dengan kebiasaan perempuan seperti memasak. Dalam konteks ini kepemimpinan perempuan digambarkan sebagai proses membuat kue yang tampak mudah dilakukan.

Udah..beri kesempatan Mega 1 kali lagi, dia kan sekarang sudah tambah ilmunya...sekarang sudah bisa bahasa

ngenggris, sudah bisa bikin kue donat kayak di cempaka mas (kegemaran si taupik), sudah bisa bikin kue pencong (kegemaran si puang)... makanya beri dia kesempatan jadi presiden lagi...visi nya jelas ...negara ini butuh adonan kayak bikin donat ...kwak kak..kak..kak..., cageur pisan maneh....

Tentu saja karena sudah pernah menjadi presiden maka Megawati mampu menambah keterampilannya.

Konteks peran dan tubuh perempuan yang melekat pada seorang tokoh juga muncul dengan mengambil salah satu ikon di dalam film. Sebutan maknyak adalah sebutan yang digunakan keluarga Doel Anak Betawi di dalam sinetron. Adapun mak lampir adalah nama hantu yang muncul di dalam beberapa film layar lebar.

maknyak cocoknya jd peran mak lampir aja... pasti lebih siip...dan banyak penggemarnya... DRPD jadi politisi..

Namun ada juga yang tidak setuju dengan pandangan di atas, di mana beberapa perempuan ternyata memperlihatkan posisi yang sangat bagus seperti Sri Mulyani.

Saya gak setuju sama mas buJaNG.... kalau menurut mas begitu buat apa ada Sri Mulyani? As we can't deny how she stimulate Indonesian Economy...

Sri Mulyani dianggap mampu dan dapat mengembangkan perekonomian Indonesia. Akan tetapi, sikap negatif juga ada karena keberadaan Sri Mulyani dinilai berkaitan dengan IMF yang membuat Indonesia berhutang terus.

~pikir2 dulu mas kalau ngomong Sri Mulyani kan buat ngebantu IMF untuk menghancurkan ekonomi Indonesia agar terus menerus ngutang, supaya pemimpin-pemimpinnya tetap jadi babu mereka (amerika cs)

Kepemimpinan perempuan juga tidak lepas dari pandangan terhadap penampilan, baik fisik maupun nonfisik. Perempuan di sini dinilai sebagai tokoh yang dekat dengan kehidupan di mana perempuan

menjadi tokoh di dalam rumah tangga. Penampilan fisik antara lain menghasilkan komentar ringan seperti ini.

KoQ NgG4k aDA caL0n pREsidEN Y9 C4ntiK SiiiH??!!!

Pandangan di bawah ini merupakan ekspresi dari perilaku dan penampilan tokoh perempuan.

ah Mega...?! enggak lah yau...
emangnya ga da yg lebih cakepan toh?!
cakepan tampangnya...
cakepan akhlaknya...
cakepan kecakapannya...
cakepan ilmunya...

Pandangan yang penuh kritik ini juga muncul karena perilaku dari suaminya. Dalam hal ini perilaku suami merupakan kredit buruk bagi Megawati.

wah hebat juga. bener tuh istrinya mimpin bojanya korup dll

Kepemimpinan perempuan juga dinilai berdasarkan kebiasaan para ibu. Kutipan ini memperlihatkan kebijakan yang diambil ketika Megawati menjadi presiden. Kebijakan yang diacu adalah kebijakan privatisasi dengan menjual beberapa aset Indonesia.

Kita menilik ke belakang, sewaktu Beliau (Megawati) menjadi presiden, apa yang telah dikerjakannya? Aset penting Indonesia dijual keluar negeri, padahal BUMN melambangkan kekuatan perekonomian Indonesia, kalau sampai dijual berarti bangsa luar sudah bisa mengetahui kondisi perekonomian Indonesia. Saya maklum kalo dijual, lha wong Ibu-2 kalo dah bingung ya jual perabotan....hehehe

Pengalaman memimpin ini menjadi patokan untuk melakukan penilaian. Masyarakat Indonesia masih memiliki nasionalisme Indonesia yang terlihat dari dampak penjualan pasir yang ditudingkan pada suami Megawati. Ungkapan seperti ini adalah ungkapan keprihatinan masyarakat terhadap kebijakan politik yang diambil oleh pemimpinnya.

itu si Ibu Mega...lakinya malahjualin pasir ke Singapura ...untuk memperluas pantai singapura, kan jadinya daerah Singapura makin menjorok ke laut mengambil wilayah RI...titik pangkal pengukuran wilayah teritorial singapura meluas drastis...pada saat sebelum Mega jadi pres dg setelah jadi pres...entah sudah berapa banyak duit yg didapat lakinya dari bisnis menjual negara ini.... jadi pegawai rendahan saja sekarang sudah standar harus S1...masa lulusan sma mo jadi presiden...ntar dikasih masalah tentang ekonomi perhitungannya dg cara anak SMA menangani masalah..dulu sembako murah... sekarangmahal... hitungannya seharusnya banyakfaktor. Misalkan berfikiran tentang teknik saja..mana tau dia pelajaran tentang mekanika teknik???...tinggal dikibulin aja ntar dg bawahanya. menangani masalah sosial relation..gimana mo nangani??...belajar *Public Relation* aja gk kenal mgkn...

Megawati juga tidak mempersiapkan juru bicara untuk menjembatani kebutuhannya dengan masyarakat pendukungnya. Akibatnya, yang terjadi adalah penilaian langsung terhadap pribadi dan tindakan politik yang dilakukan oleh Megawati.

Tindakan itu dianalogikan dengan kebiasaan para ibu untuk menjual barang ketika tidak memiliki uang. Komentar di bawah ini juga menekankan konteks ibu rumah tangga karena tidak mampu mendengarkan kritikan masyarakat.

Bapak anda saja dihujat sewaktu lengser, apalagi anda yang tidak bisa apa-apa? sudah mendingan mejadi Ibu Rumah Tangga yang baik aja...OK?

Di antara yang berkomentar ada yang menyinggung masalah peran ibu mengurus rumah tangga. Peran ini diangkat untuk memperlihatkan bahwa Megawati sudah pernah menjadi presiden yang sebaiknya memberikan kesempatan pada yang lebih muda.

mendingan ibu ngurus keluarga aja..cukup sekali bangsa ini pernah dipimpin oleh ibu... mbok legowo gitu 😊 Negeri ini

butuh pemimpin muda yang mampu membuat perubahan lebih baik.

Kepemimpinan perempuan dalam hal ini pengalaman Megawati dikaitkan dengan nama ayahnya. Konteks seperti ini bukan hal baru di dalam politik dan perempuan, karena asumsi dasarnya adalah perempuan di ruang politik berkaitan dengan generasi atau keluarga kelas menengah atas.

orang capres cuma ngekor nama ayahnya n cm dorongan dari suaminya ya gt...latar pendidikan aja cuma sma pluit... ga malu apa yg laen pada cum laude dr luar negri, mau jadi bangsa kuli lagi???mau jual pulau lagi??? mau jual aset bumh lagi??? ngomong aja masih ga konsekuen! hr ini tolak blt, eh besoknya ngawasin blt pk bagi2 aqua segala...maksud loe biar simpatik gt??? ha2 biar miskin tapi rakyat Indonesia ga bisa lagi dibodohin...

Kondisi yang dimiliki Megawati jika terjadi pada perempuan pada umumnya akan mempersulit posisinya di dalam masyarakat. Megawati mampu mengatasinya karena adanya konteks generasi.

Ternyata analogi kepemimpinan perempuan dengan analogi keluarga dan rumah tangga. Beban ganda perempuan tidak lepas ketika dia menjadi pemimpin, dan beban ganda ini menjadi semakin jelas ketika digunakan untuk menilai kepemimpinan perempuan.

mmmmmm, lihat dulu lah kalau mau milih presiden bisa gak ngurus keluarganya. Kalau keluarga aja gak bisa apalagi negara. Kesimpulan menurutku pas Pemerintahan Ibu yang itu tu:

1. Gak cerdas
2. Jualan warisan aja (perusahaan telko yang dijual tuh)
3. Gak tau malu (apalagi suaminya)
4. Diam mulu (yang dibilang diam itu emas padahal gak ngeh he he he he....)

Selain penilaian seperti itu, kepemimpinan perempuan juga dinilai berdasarkan sikap pasif perempuan. Dalam pembahasan tentang sosialisasi perempuan, salah satu yang menjadi karakter perempuan

adalah sikapnya yang cenderung pasif. Sebagai seorang pemimpin sikap seperti ini muncul dan menjadi salah satu sikap Mega yang paling diingat orang.

Meskipun demikian, ada konteks lain yang bisa jadi berlawanan dengan kecenderungan pasifnya Megawati. Ketika Megawati tidak lagi menjadi presiden yang terjadi adalah kecenderungannya untuk menghujat pemimpin yang saat ini sedang memimpin.

Dasar Plin-Plan, tukang hujat!!!! Suharto tidak pernah menghujat presiden sebelumnya,
Habibie tidak pernah menghujat presiden sebelumnya,
Gusdur tidak pernah menghujat presiden sebelumnya,
SBY tidak pernah menghujat presiden sebelumnya,
Mega??? Punya otak ndak sih dia??? Tu Cangkir dijaga!!!!

Akibatnya, terdapat kesan yang menjadi lebih kentara bahwa perempuan suka menggosip ternyata digunakan untuk melihat situasi politik yang ada. Penilaian seperti ini yang menjadikan Megawati tampak buruk dihadapan presiden pendahulu lainnya.

Dia itu wanita yang tidak tahu malu, nunggu orang banyak
Say No To mgawti, baru komentar, katanya black campaign,
kasihan kambing dari dulu dijadikan kambing hitam.

Terutama bagi masyarakat dunia maya, komentar Megawati bahwa SNTM merupakan kampanye hitam ternyata melukai mereka. *Posting* seperti ini memperlihatkan bahwa PDIP tidak menyadari adanya media baru yang bisa memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan partai tersebut.

Tindakan dan komentar atau tidak berkomentarnya Megawati, merupakan titik kelemahan di dalam kepemimpinan perempuan ala Megawati. Kecenderungannya membuatnya tampak tidak profesional, kecenderungan tindakan perempuan yang kurang berkomentar dengan berbagai alasan. Selain juga komentarnya yang cenderung seperti pola komentar keseharian, yang tampak seperti pola menjelekkkan orang lain. Dalam hal ini tindakan politik seperti ini perlu disadari sebagai kecenderungan yang ada dan ternyata bernilai buruk di dalam

masyarakat. Komentar seperti ini merupakan kecenderungan bahwa sesuatu yang pribadi sekarang ini menjadi publik dengan berbagai kemajuan TIK termasuk di dalamnya adalah peran media massa.

Masalah yang berkaitan dengan perempuan dikaitkan dengan isu emansipasi. Dalam konteks seperti ini Megawati sudah diberi kesempatan tetapi tidak memanfaatkannya dengan baik.

sampeyan butuh emansipasi wanita mbak?? udah dikasih kesempatan gitu lho. tapi kok buktinya, banyak banget hal-hal bodoh yang dilakukan...bukankah seharusnya presiden itu bisa berpikir lebih intelektual daripada kami-kami masyarakat dunia maya 😊)

Meskipun tidak berkaitan langsung, tindakan politik ketika Megawati menjabat sebagai presiden, dinilai sebagai tindakan yang 'bodoh'. Oleh karena itu, sebagai konteksnya adalah masyarakat dunia maya yang memiliki kecenderungan yang berbeda dibandingkan dengan Megawati. Pada dasarnya masyarakat pernah menaruh harapan pada Megawati. Akan tetapi, harapan tersebut pupus karena kebijakan politiknya dinilai kurang berhasil.

@ Bu Mega: "Dulu Aku Suka~Suka Padamu, Sekarang taksudi~taksudi~taksudiii...Kutaksuditak...Yayaa...Megawati No Way..."

Kepemimpinan Mega juga tampak tidakimbang ketika dilakukan proses dialog dengan capres. Jawaban Mega tampak tidak dapat mengimbangi jawaban dari kontestan lainnya.

lihat metro ato tv1 kmaren kaga' bro? yang Bu Mega jadi narasumber? O men, bener2 ga banget, jawabannya ga kena sama sekali and waktu ada mahasiswa yang ngajuin pertanyaan ke bliow mala bliow bilang gini men, "pertanyaan yang cukup sulit.." o men itu kan artinya dy sulit mencerna pertanyaan and butuh waktu agak panjang untuk ngejawabna? harusna kalimat kayak gitu kan di dalem ati aja, e mala din ucapin lisan pake mic pula.. haha, itu masi anak skolahan yang nanya, apalgi kalo org2 yg pendidikanna lebi tinggi ato

tamu negara??? supaya tidak menjatuhkan nama indonesia
mari qta pilih selaen Mega saja... hohohoho!!!

Khususnya dengan proses menjelang pilpres, Megawati pernah melontarkan kata-kata dekrit. Kata dekrit membuat masyarakat menjadi takut, karena belum menjadi presiden kesannya sudah sangat keras.

Nah lho belum apa2 sdh menyiapkan dekrit..! mulai keliatan sifat aslinya, militeristik dan otoriterisme. Kalau emang buaya gak usahlah berkamufase menjadi cecak, berbaur dengan pemulung bantar gebang segala. Kebayang kalau dia berkuasa dikit2 keluarkan dekrit... apa2 yang dia gak setuju dia keluarin dekrit. gak mustahil kebebasan kita mengakses dan berekspresi mengkritik dia di internet jg bisa kena dekrit, mampuslah kita...! Ayo kawan kita gelorakan anti Mega-Prabowo ke kerabat dan orang2 disekeliling kita, kita jangan mau dijebak dengan isu ekonomi neolib atau kerakyatan, semua cuma jargon kampanye. Kalau gak bersalah dalam kasus penculikan gak mungkinlah dia dipecat dari TNI oleh Wiranto, itu fakta yang gak bisa dibantah.

Konteks ini menjadi lebih nyata karena cawapres yang diusung oleh Megawati adalah Prabowo. Di Indonesia, pada saat ini masih merasa trauma dengan kepemimpinan militer yang dinilai otoriter. Sikap seperti ini yang menjadikan Megawati juga tidak dapat menarik simpati masyarakat.

Ternyata di dalam *posting*-an ini juga ada yang menertawakan rasa ketidakpuasan terhadap kepemimpinan perempuan. Di dalam konteks SNTM yang terlihat adalah seorang perempuan yang dikerubutin para laki-laki.

ha ha ha...semua pada panik karena Mega ternyata cukup populer...sunggu ngalahin SBY...so 1 cara: ...hajar Megawati...gitu kan...ha ha ha ha ha...ini ciri manusia pengecut...1 perempuan dikeroyok puluhan ribu lelaki...apa ga maluuuuu?????

Komentar yang ada meskipun ada benarnya. Akan tetapi, juga memiliki kesan menjelekkkan Megawati.

Wah..... Bu Megawati jangan dijelek-jelekan dong, beliau kan masih manusia buktinya masih ada yang mau jadi suaminya, berarti masih cantik khan dimata pak Taufik K. wakkakakaka.....

Meskipun seorang perempuan menjadi berarti dihadapan suaminya. Sikap yang menjelek-jelekan ini tidak sehat karena bangsa Indonesia sendiri yang memiliki citra buruk ini. Upaya menjelekan orang lain sebenarnya berlaku pada diri kita sendiri dan bukan milik Megawati.

kalo masyarakat Indonesia banyak berisi seperti bapak dan ibu sekalian yang suka menghujat orang apalagi tokoh kita...Indonesia ngga akan berkah/makmur semua tokoh yang kalian hina itu, apapun judulnya pernah mengiring Indonesia tumbuh. SBY, JK ataupun Mega... Mereka manifestasi Bapak dan Ibu kita...Apalagi Mega seorang Ibu... Jadi tidak usah menghujat beliau2, karena hujatan itu menuju ke kita...kenapa la wong yang jelek kita kok...

Selain itu, ada juga yang mengangkat posisi ibu sebagai orang yang dituakan dan dihormati sehingga menjelekan Megawati bukanlah sebuah tindakan yang baik.

Posting tidak semua menjelekan Megawati, ada juga yang membela dengan memperlihatkan bahwa satu perempuan harus di'keroyok' oleh banyak laki-laki. Sayangnya tokoh politik perempuan yang saat ini posisinya paling tinggi adalah Megawati. Meskipun keberadaannya di domain tersebut sangat berkaitan dengan konteks kesejarahan dari Megawati itu sendiri. Komentar seperti ini meskipun tidak populer di SNTM namun memperlihatkan bahwa beberapa orang di dalam pemosting mengingatkan bahwa kecenderungan komentar mereka tidak berbeda dari Megawati. Seakan-akan menjelekan orang lain merupakan kecenderungan dari masyarakat itu sendiri.

3.3.8 Perpecahan dan Kesatuan

Komentar terhadap Megawati juga mengarah pada masalah perpecahan dan perlunya Indonesia untuk tetap bersatu. Akan tetapi,

berpartisipasi pada gerakan SNTM ternyata berguna untuk mempersatukan pandangan yang serupa.

SAY NO TO MEGAWATI ! Akhirnya Megawati berguna juga buat menyatukan warga Indonesia 🙏

Pandangan negatif terhadap Megawati berkaitan dengan dampak yang tersebar karena ulah pengikutnya.

duh...Megawati...??? jangan bikin bangsa ini hancur deh. Orang2 dibelakangmu itu kebanyakan bajingan... jangan jadi penyebar kebencian ... tobatlah...

Masalah perpecahan merupakan salah satu tema ‘baru’ di dalam *posting-an* mengenai SNTM. Pada umumnya pemosting akan berkomentar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan politik.

Masih berkaitan dengan perpecahan, ada juga pemosting yang melihat bahwa pembentukan group ini merupakan mekanisme menyebarkan kebencian dalam bentuk lain.

Semoga Allah SWT memaaafkan pembuat Group ini, bermaksud tidak menyebar Kebencian, Namun jadinya sebagai penyebar kebencian baru.

Dalam hal ini FB sebagai mekanisme yang positif tetapi juga bisa negatif tergantung pada penggunaannya.

Barangkali gambaran yang mengagumkan dari SNTM adalah perasaan bahwa mereka ternyata memiliki kesamaan dalam pemikiran meskipun tidak pernah berjumpa, tidak terkait pada organisasi tertentu, dan bukan anggota partai politik. Kesadaran ini yang kemudian melihat sisi positif dari SNTM, yaitu mempersatukan, sehingga komentar yang tadinya dinilai buruk ternyata memiliki fungsi yang positif. Yang menjadi perhatian menarik dalam konteks dunia maya ini adalah adanya kesadaran tentang kesatuan di antara perbedaan yang mereka miliki. Barangkali perasaan seperti ini yang justru jarang dan menjadi pertanyaan bagi individu-individu ini sendiri. FB sebagai sebuah jejaring sosial ternyata memiliki fungsi positif di dalam politik Indonesia.

3.3.9 Sikap Terhadap Kepemimpinan Mega

Pandangan terhadap Megawati sebagai kontestan sangat berkaitan dengan pengalamannya memimpin Indonesia. Pengalaman ini juga berkaitan dengan kelas sosial di mana para *facebooker* ini berada. Karena kedekatannya terhadap teknologi dapat diasumsikan mereka memiliki pendidikan yang memadai, terbuka terhadap pengaruh, dan kemajuan teknologi, memiliki sumber daya untuk mengakses internet. Keberadaan FB sangat dipermudah oleh adanya jenis telepon selular yang mampu mengakses FB.

Ada pendapat yang berkaitan dengan sikap Mega menghadapi masalah besar yang dihadapi Indonesia, seperti peristiwa bom. Peristiwa ini terjadi dengan dampak yang sangat memilukan. Akan tetapi, reaksi presiden terhadap hal ini dianggap lambat.

@idarmadi: saya sih nggak akan mau memilih presiden yang:

- saat menjabat jadi presiden, bungkam berhari-hari saat negaranya dibom bunuh diri
- lebih memilih berdiskusi soal *shopping* ketimbang soal negara
- membiarkan air cucian kakinya diminum oleh seseorang yang mengkultuskan dirinya

Atau pendapat yang berkaitan dengan hilangnya aset Indonesia kepada pihak asing. Keputusan ini dinilai sebagai keputusan yang tidak membela Indonesia. Berdasarkan pandangan seperti ini, pemosting menyatakan diri mereka tidak melakukan *black campaign*, melainkan sebuah fakta politik.

Jelas gerakan ini menurut saya bukan *black campaign* tapi merupakan reaksi spontan atas semua kekesalan dan uneg-uneg masyarakat mengenai kepemimpinan beliau selama ini. Sewaktu beliau menjadi presiden, masyarakat kesal terhadap penjualan indosat, kapal tanker VLCC, dan aset-aset BPPN yang terlalu murah, tingkah laku suaminya yang merasa

seperti presiden (padahal istrinya yang presiden!), membiarkan SPBU anaknya yang ada di jalur hijau,dll...

setelah turun tahta, beliau malah berkampanye plin-plan dari semula mencaci orang-orang penerima BLT seperti orang yang tidak punya harga diri menjadi pendukung program BLT dengan iklan PDIP menjadi pengawal BLT (padahal menurut Metro TV, Puan Maharani dan caleg-caleg PDIP cuma satu jam saja mengawal di lokasi pembagian BLT, tapi iklannya berhari-hari). makanya Bu, tolong berpikir lebih panjang dulu sebelum bertindak

Dosa karena keputusan politik itu ditambah lagi dengan sikap Mega terhadap kontestan yang ada. Sikapnya dianggap suka menjelekan dan mengkritik. Padahal pada kenyataannya Mega juga tidak bisa melaksanakan kekuasaan yang sesuai dengan kritik yang diajukannya.

hoby mencela orang, padahal semua ini kan dia ada andil juga selama masa pemerintahan dia dulu yg ga berhasil.....

Sikap terhadap komentar politik yang tidak tepat sehingga justru memperlihatkan kualitas kontestan yang kurang tergarap dengan baik.

Kemarin pas liat berita, Gubernur Jateng (dari PDIP) mengatakan jangan percaya pada caleg yang mengkampanyekan sekolah gratis (kita tau pemerintah-SBY-gencar2nya kampanye untuk pendidikan). katanya itu tidak masuk akal..saya lantas berfikir kenapa ya kok gubernur sampai bilang gitu. Pdhl di Semarang program tu dh jalan&baek2 ja.,pa mungkin beliau2 tu tkt ya klo rakyat indonesia pd pinter. soale klo rakyat Indonesia pada pinter pasti ga ada yang mau milih Megawati... 🙄

Pandangan pemosting memperlihatkan sikap bahwa mereka tidak bisa menerima pandangan yang menganggap rakyat tidak tahu. Sikap seperti ini merupakan reaksi masyarakat terhadap tindakan politis yang diambil oleh masyarakat.

Megawati dianggap sebagai presiden yang jarang berbicara dan berkomentar. Akan tetapi, ketika menjadi kontestan, Megawati dianggap sangat vokal mengomentari lawan politiknya.

dulu waktu jadi presiden diem melulu sekarang malah ngebacot melulu

Penilaian terhadap Megawati memiliki beragam bentuk termasuk di antaranya adalah sikap yang berkaitan dengan keinginan Megawati untuk bertahan. Salah satu yang dianggap membuat Megawati ingin bertahan adalah;

mungkin ini ambisi suami Ibu ya ?, yg ingin berkuasa di bawah ketiak Bu Mega. hehe ... weleh

Pada kenyataannya tindakan politik yang pernah diambil oleh Megawati ketika menjabat sebagai presiden tidak dapat dipisahkan antara hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan privat dan publik. Di bawah ini adalah beberapa perkara yang dianggap sebagai dosa dari Megawati.

1. ngehibahin rumah negara seharga 2 miliar buat diri sendiri
2. Taufik Kiemas yang pernah joget sambil meluk inul dari belakang yang lagi ngebor.(bejat)
3. BBM Naik yang untung suami sendiri
4. penjual aset negara
5. si bodoh yang dikelilingi orang2 licik
6. si bodoh yang dikelilingi orang2 koruptor
7. si bodoh yang dikelilingi preman
8. si bodoh yang dikelilingi orang2 bodoh
9. si bodoh yang memimpin partainya wong licik
10. si badan besar yang punya partai besar punya mulut besar punya nafsu kekuasaan besar dari keluarga yang punya nama besar tapi sayang punya otak kecil dan punya jiwa kerdil.

maaf ya bu.....

saya sebenarnya gak mau nulis ini kalo ibu bisa berkaca dengan benar....

atau mungkin ibu gak punya kaca yang besar??

Dalam pencalonan dirinya sebagai calon presiden menumbuhkan rasa tidak percaya yang berdampak pada ungkapan seperti di atas ini.

Akan tetapi, tidak semua pendapat melihat Megawati secara negatif, ada juga yang mengungkapkan dukungan pada dirinya. Komentar yang dilantarkan oleh pemosting merupakan bagian dari kelemahan pemimpin di Indonesia secara umum, sehingga tidak fair jika hanya Mega yang kelihatan negatif.

Tetep aj ak bakal coblos tuch Megawati.... emang kenapa kalo MSP itu ga pinter, bkn cowok, tidak menarik?Kl cm ngeliat kekurangan Presidedn2 kita mah segudang.... Soekarno dgn Presiden seumur hidup, Soeharto dgn KKN, Konglomerasi, dan Krismon nya, Habibie dgn lepasnya Timtim, Gusdur dgn para pembisiknya, Mega dgn yg kalian sebutkan td, SBY? dengan tiap bln ad yg rakyat mati sia2 kena tsunami, gempa, tanah longsor (itu krn ibu pertiwi/MSP dikhianati katanya...hehehe becanda bro), Brp pesawat jatuh, brp Kereta api anjlok, pesawat kita diembargo kagak bs terbang ke Eropa, pesawat ilang ga bs nemuin,kapal tabrakan, tenggelem, putra2 terbaik bangsa (TNI) mati karena kelelep pake amphibi, jatuh naek heli, nabrak hanggar(ditotal brp jiwa melayang2 sia2 karena manajemen transportasi amburadul), Harga minyak tanah jadi 8.000, gas 3kg susah belinya, tarif angkutan ga bs turun pdhal harga Minyak dah turun dri US\$ 150 jd US\$40 harga bensin dari Rp6.000 jd 4.500, SBI turun tp suku bunga kredit kagak turun2, Lapindo (halah ga usah dibahas), Situ Gintung (ga tahu salah siapa soale dibuat zaman Belanda tp tetep aj salahin SBY, wong anda2 jg suka nyalahin MSP), Nilai tukar Rupiah (zaman MSP berape, zaman SBY berape) pendukung SBY pasti nyalahin Subprime mortgage, swasembada beras (ngomong2 itu yg berhasil SBY, Pak Apriantono, apa Pak JK dgn Bulog nya? jd binun),

Posting yang membela Megawati cenderung terbatas dan pada dasarnya memperlihatkan bahwa penilaian orang terhadap Megawati jauh lebih tajam dibandingkan dengan kandidat presiden atau yang pernah menjadi presiden sebelumnya. Hal ini merupakan kecenderungan

posisi perempuan di dalam ranah politik yang masih dilihat sebagai ranah laki-laki.

Posting di bawah ini merupakan komentar terhadap kepemimpinan politik yang ada di Indonesia. Pemimpin politik dianggap merupakan tokoh yang hanya perlu masyarakat ketika Pemilu, namun setelahnya akan melupakan janji mereka.

Di Indonesia ini skrg pemimpin ada yang bisa dipercaya, siapa saja yang bakal naik jadi Presiden itu dah pasti lupa sama janji-janjinya waktu kampanye, kalau memang mau ngobrol janji saat kampanye coba lihat ga ada satu pun partai yang berani bahas masalah Lapindo yang sudah bertahun-tahun ga jelas penyelesaiannya, itu lah sosok pemimpin Indonesia kalau kita mau tau, dan kita ga bisa mengejek hanya 1 orang saja sedang yang lain juga tidak sama bagusnya dengan Megawati, jadi untuk apa sebenarnya Pemilu diadakan kalau pemimpinnya masih saling egois, mementingkan kelomponya masing-masing tapi selalu mengatasnamakan rakyat saat kampanye tiba. Liat SBY...menantunya kasus tapi skrg seakan hilang gitu aja.

Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan buat kita semua bahwa yang ga bagus itu bukan cuma Megawati tapi semua pemimpin negeri ini.

Pemosting ada juga yang menanggapi cara *facebooker* mengomentari Megawati dan melihat konteks politik di Indonesia.

saya juga ga pilih Megawati, tapi saya juga ga pilih sby or jk.. tapi saya ga suka cara kalian menjelek2kan orang. Mega maju karena masih ada yang milih dya, seandainya kalian dipilih 14 juta pendukung apa kalian bakal mundur?? kalian ngejelekin juga ttg pendidikan dia, tapi kalian apa pernah blajar sejarah bahwa dia ditekan sehingga orba sehingga pendidikannya terhenti. mgkn kalian ga bkl ngerti karena kalian benci sekali dengan dia. dia sudah ditekan sedemikian rupa tapi dia tetap berani maju. meskipun saya nggak dukung dia tapi saya kagum dgn perjuangannya. buat yang mau pilih sby, pikir2 dulu deh, liat yang ada di sekeliling sby skrg. penjiat smua,

PKS katanya ga mau dukung tp jdi juga, PAN sampai harus mengkundeta ketuanya, PPP, PKB, dll juga sama, liat kader demokrat, apa ada yang benar2 bagus, mereka terlalu mengkultuskan SBY, liat aja sultan bathoegana, ruhut sitompul, andi mallarangeng dll. busuk smua ngomongnya seakan2 sby itu tuhan ga pernah salah. kalian juga harus tau kalo duit blt tu dapetnya dari utang dari luar negeri. mau pilih JK?? sama aja dia tuh malah berjiwa pengusaha, bahkan terlalu pengusaha mgkn bisa kayak Megawati apa2 dijual. JK sucks...Hidup GOLPUT!!!

Dalam hal ini pandangan tentang gerakan tidak memilih alias golongan putih (golput) menyeruak di antara komentar terhadap Megawati. Mereka yang bertekad tidak memilih adalah mereka yang tidak dapat menerima gaya kepemimpinan dari tokoh politik yang ada. Selain itu, juga mereka tidak dapat menerima tindakan politik yang terjadi di Indonesia.

Ada pula yang tidak menganjurkan golput, walaupun mengutarakan kesalahan politik zaman Megawati.

@ SAK golput? nggak deh....dengan memberi suara kepada capres lain selain Mega-Prabowo paling tidak saya sudah memperbesar suara dan peluang capres lain sekaligus memperkecil peluang Mega untuk jadi presiden.

Soal BLT, saya kira ngutang untuk bantu rakyat nggak masalah daripada ngobral aset negara tapi gak jelas duitnya buat apa? Fakta lain adalah th 2008 pendapatan pemerintah dari sektor pajak 500 triliun sehingga mampu membiayai APBN sebesar 1000 triliun sedangkan zamannya Mega APBNnya saja cuma th 2004 hanya 300 triliun. Dari angka2 di atas ada 3 kemungkinan:

1. Pada saat ini ada pertumbuhan dan aktifitas ekonomi yang cukup signifikan yang secara otomatis meningkatkan pendapatan pajak.
2. Dalam meningkatkan pendapatan negara menteri2 bid. ekonomi Megawati tidak berbuat apa2 selain mengobral aset negara, sementara pengusaha2 besar dibiarkan tidak

bayar pajak yang bila ditagih dengan benar ternyata besarnya 1,5 kali APBN 2004.

3. Pendapatan dari pajak itu mungkin memang besar tapi tidak accountable dan banyak penyelewengan.

Posting seperti ini mengajurkan tidak golput dan tidak Megawati, tetapi dapat mendukung konstestan lainnya.

3.3.10 Tentang SNTM dan FB

Dari salah satu forum yang mengomentari tentang SNTM, yaitu Forum Kompas yang diposting oleh *french fry* pada 6/4/09 pada jam 12.57. *Posting*-an ini menarik karena dia mengatakan bahwa sikap PDIP dalam mengcounter berita SNTM berlebihan dan gagal total, dan tidak dapat memanfaatkan waktu kampanye yang tinggal sedikit hari lagi. Kegagalan tersebut karena tidak menyadari apa yang dihadapi, SNTM bukan *black campaign* karena bukan dilancarkan oleh lawan politik atau lingkup elit politik. SNTM berasal dari masyarakat yang meskipun masih terbatas, jumlahnya menjanjikan yaitu 70 ribu.

fenomenal it is... and I am proud to be one of those members...

Besarnya jumlah pemosting dalam tempo yang sangat singkat membuat gerakan ini menjadi sesuatu yang berarti. Namun pada sisi lain gerakan ini tentu saja membuat gerah PDIP itu sendiri.

Posting-an seperti di bawah ini dengan jujur memperlihatkan pandangannya. Pandangan ini berdasar dari pengalaman Indonesia di bawah kepemimpinan Megawati. Pandangan seperti ini mengambil dari perumpamaan di mana keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama.

SAY NO TO MEGAWATI, karena cuman orang bodoh yang masuk lubang yang sama dua kali & cuman orang bodoh juga yang memilih presiden yang pernah memimpin dan GAGAL!

Pandangan seperti ini memperlihatkan rasa marah dan putus asa yang luar biasa terhadap kebijakan politik yang diambil oleh Mega ketika dia berkuasa.

Meskipun pengunjungnya banyak ada juga yang memberikan pengarahan bahwa pengunjung dengan pendukung adalah sesuatu yang berbeda. Meskipun secara jumlah hal ini merupakan sebuah peningkatan jumlah yang sangat bagus, tetapi di dalam kenyataannya jumlah menggambarkan pengunjung SNTM.

[...] karena tidak bisa membedakan antara mana jumlah pengunjung dengan mana jumlah pendukung “*Say No To Megawati*”: Yeileh ternyata ngaku pada pinter ternyata bodoh smua termasuk pemilik *blog* ini yg [...]

Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena FB merupakan media yang digunakan tanpa memahami apa yang dimaksudkan dengan kunjungan orang pada laman tersebut. Sehingga berdasar pemahaman dari pemosting adalah kunjungan yang berjumlah spektakuler tersebut bukanlah sebuah angka pendukung.

Dalam konteks internet dan *facebooker*, beberapa komentar mempertanyakan jumlah yang spektakuler tersebut dengan memasukkan kemungkinan *hacker*. Karena ada yang mempertanyakan kemungkinan orang yang tidak menyatakan dukungan tetapi akunya masuk pada laman ini.

Sepertinya Group *Facebook Say No To Megawati* ada yg aneh. Keponakan dan ada salah seorang teman saya, tidak pernah menjadi Fans di group tersebut. Namun Account *Facebooknya* bisa masuk menjadi supporter di group tersebut. Sepertinya ada pihak2 yang menggunakan cara2 Hacker untuk memperbanyak Jumlah Supporter di group tersebut.

Pekerjaan *hacker* dianggap memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk meningkatkan jumlah dari mereka yang mendukung SNTM.

Dalam hal ini memang terdapat kecurigaan karna jumlah pendukung meningkat dengan sangat pesat. Sehingga dalam hal ini kecurigaan muncul dari kemungkinan adanya akun baru yang dibuat untuk meningkatkan jumlah ini,

Saya juga melihat di group tersebut terdapat Ribuan Account *Facebook* yang baru dibuat. Mungkin sengaja dibuat hanya untuk memperbesar Jumlah member.

Meskipun demikian ada pula yang memperlihatkan bahwa kecurigaan tersebut tidak ada alasannya. Terutama karena administrasi dari SNTM sudah membuat aturan yang memperlihatkan bahwa akunnya adalah akun yang resmi.

Silakan dicek apabila anda mempunyai *Account Facebook* dan tidak pernah merasa ikutan bergabung di group tadi, namun account anda tercantum sebagai member.

Pada kenyataannya mekanisme FB sangat mudah digunakan, juga jika seseorang ingin keluar dari dukungannya.

lalu, apa susahnya sih klik “keluar dari grup ini”? saya kemarin melakukannya tuh, cuma 1 kali klik, gak perlu konfirmasi segala, susah banget yah buat keponakan dan teman anda? kayaknya masih lebih susah memeriksa ada ribuan account *facebook* apakah baru dibuat atau tidak ya? 😊

Sekaligus kutipan ini memperlihatkan bahwa tidak mungkin seseorang membuat ribuan akun dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini disebabkan karena keanggotaan FB dilakukan secara individual.

Untuk mengatasi pertanyaan tentang jumlah akun dan maksud tujuan dari SNTM, administrasi dari akun ini membuat klarifikasi. Tindakan ini merupakan jawaban dari beberapa komentar tentang keberadaan dari SNTM

Saya adalah salah satu admin di grup ini bro ryosaeba. ijin kan saya klarifikasi beberapa hal tentang grup kami yg saya rasa perlu diluruskan.

1. Kami tidak setuju kalau dibilang grup kami black campaign, karena kami membicarakan semuanya dengan adanya fakta. silahkan cek link berkas kami: <http://www.facebook.com/topic.php?uid=76200719488&topic=8439> dan itu adalah hal yg menyebabkan kami tidak setuju kalau Mega menjadi Presiden. para admin

juga tidak ada yg berafiliasi dengan partai politik lain. kebanyakan admin masih sangat muda (<30 tahun) dan masih idealis. itulah satu2nya alasan mereka bersedia menjadi admin untuk menjaga ketertiban di grup ini.

2. @ Idamardi. Memang banyak di antara para member yg hanya sekedar mendaftar dan pergi. jumlah member yg benar2 aktif memang minoritas di grup kami. tapi kami menolak kalau mereka dikatakan pendemo bayaran. sebab kami sama sekali tidak pernah mengiming2i mereka dengan bayaran apapun. apapun alasan mereka mendaftar, mereka melakukannya sendiri secara sukarela.
3. @ Cahyadi. memang benar kalau grup ini mungkin malah membuat Megawati menjadi populer. kami sadar akan resiko itu. tapi fokus kami di sini bukan hanya tidak menghendaki Megawati jadi presiden lagi. tapi juga mendidik para pemilih muda untuk lebih aktif dalam urusan politik seperti ini dan memilih seorang presiden yg benar2 pantas dan bukan hanya sekedar ikut2an generasi tua. dan kami yakin tujuan pendidikan politik ini lebih penting karena akan terus terbawa sampai generasi berikutnya.
4. menanggapi *posting*-an Heri sebayang yg menyatakan adanya hacker dan hal2 aneh. silahkan semuanya mengkopi pernyataan bro Heri tadi dan memasukkannya ke google. hasilnya ? banyak sekali *posting*-an di berbagai tempat dengan kata2 yg PERSIS sama. kebetulan ? atau memang provokasi ? silahkan tentukan sendiri.
5. soal grup ini, telah ada grup baru yg sama dengan pengawasan yg diperketat dan diawasi oleh tim admin yg jauh lebih berdedikasi. pada beberapa saat lalu, memang ada seorang admin di antara sekian ratus itu yg sengaja mengangkat orang2 menjadi admin secara acak. tujuannya ? kami juga tidak tahu. untuk mencegah hal2 yg tidak diinginkan, para admin aktif memutuskan untuk menurunkan para admin bayangan itu dan hasilnya ?

grup kami jauh lebih sedikit jumlah adminnya tapi jauh lebih terkontrol dari sebelumnya.
sekitan konfirmasi dari saya. terima kasih telah mengijinkan konfirmasi dari saya di *blog* ini. maaf kalau saya menggunakan nama dan email anonym. seperti yg kita sama pernah dengar, ada ancaman legal terhadap kami para admin. untuk mencegah hal ini, kami berniat untuk tidak meninggalkan jejak secara serampangan terutama di situs lokal.
Salam.

Tindakan seperti ini merupakan sebuah tindakan yang baik untuk menepis beberapa pertanyaan tentang keberadaan dari SNTM. Seperti telah disebutkan pada pembukaan dari artikel ini bahwa akun di sini adalah asli dan sudah diketahui oleh administrasi dari SNTM itu sendiri.

Barangkali yang menarik adalah melihat *posting* seperti di bawah ini yang mengomentari tentang partisipasi masyarakat yang sangat tinggi di dalam SNTM. Gerakan atau partisipasi terhadap gerakan ini merupakan tindakan yang berbeda dibandingkan dengan kegiatan pada umumnya.

Sebenarnya yang membuat negara kita ini nyaris bangkrut, bukan mantan2 presiden-nya kali ya, tapi kita2 yang muda2. Yang gampang demam, lebih tertarik pada hal2 yang berlingkaran ke arah negative. Generasi yang lebih banyak complain daripada berkontribusi. Lebih tertarik pada tontonan sinetron daripada tontonan edukasi, lebih suka beritanya “manohara” dibandingkan mengikuti perkembangan harga saham.*** itu lah alasannya mengapa pendukung “*Say No To megawati*” begitu tinggi euforia-nya***

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa partisipasi ini adalah partisipasi positif dari generasi muda yang memiliki aksi yang berbeda dibandingkan dengan generasi muda lain yang dianggap lebih suka bersenang-senang. Laman seperti SNTM merupakan lahan yang bagus bagi partisipasi generasi muda yang lebih baik.

Senjata kritik adalah data, fakta, dan pemahaman, dan tentunya seenggam harapan terjadinya perbaikan ditambah dengan sedikit rasa cinta.

Senjata mencela adalah fitnah, ghibah, dan tentunya seenggam harapan terjadinya kehancuran ditambah dengan sedikit rasa iri dan dengki.

Pemosting yang masuk ke laman ini tidak hanya berisi pandangan yang tidak membela Megawati tetapi juga mereka yang memiliki pertanyaan terhadap gerakan seperti ini. Salah satunya dapat diilustrasikan di bawah ini;

@rujak cingur: benarkah sebagian besar dari simpatisan SNTM benar2 mengerti atau sekedar ikut2an? Point saya adalah, jika kita berprinsip, kudu punya alasan yang valid, sesederhana apapun, daripada hanya ikut2an.... Kalau tidak punya pengertian dan pemahaman, 40-50rb member di SNTM itu tidak beda dengan para pendemo bayaran.

Karakter yang dapat digunakan oleh individu di dalam melakukan *posting* ini memang terbatas, sehingga dapat diasumsikan bahwa komentar ini memang muncul dari situasi percakapan. Pola percakapan yang ditekskan dan di'*share*' pada banyak orang yang kemudian diikuti dengan komentar lainnya.

@dedhi: Anda memang tidak harus menjelaskan kepada saya kenapa Anda tidak suka Megawaty, atau kenapa Anda merasa Mega kurang cantik. Sekali lagi point saya adalah, apakah para pendukung SNTM itu benar2 mengerti atau cuman ikut2an?

Dalam konteks seperti ini tidak heran kemudian ada yang mempertanyakan apakah pemosting memahami konteks politis ataukah hanya sebuah fad, ikut-ikutan deman FB saja.

Ada pula komentar terhadap perilaku memberi komentar pada laman seperti ini. Terlihat bahwa perilaku saling hujat merupakan perilaku yang cenderung mendominasi. Sehingga tidak aneh bahwa

perilaku seperti ini dapat dilihat sebagai perilaku yang tidak kondusif dan tidak menguntungkan.

daripada say no ke mega, mendingan say yes ke yang lain.
nggak suka Mega? dukung lawan politiknya. tingkatkan popularitas lawan politiknya. atau mau terus hujat2an?

Dalam hal ini perilaku ini dapat dilihat sebagai ungkapan perasaan dan pendapat ataukah sebuah perilaku pemilih kontestan tertentu. Hal ini merupakan sebuah pertanyaan mendasar terhadap ungkapan pendapat seseorang terhadap Megawati.

Di dalam kebiasaan orang awam terhadap politik di Indonesia masalah hujat menghujat merupakan salah satu yang bisa berdampak baik. SBY mendapatkan banyak simpati dari masyarakat karena dirinya dihujat oleh Megawati. Tindakan ‘negatif’ Megawati tersebut ternyata berdampak baik baik SBY sehingga salah satunya adalah SBY mendapatkan kursi kepresidenan.

Setuju dengan Cahyadi S, jangan2 kejadian SBY dulu, terjadi sama Megawati. Saat SBY dikatakan seperti “Anak-anak” sama Taufik Kiemas, rakyat jadi simpatik ama SBY. Apakah hal yang sama akan terjadi sama Megawati. Secara rakyat kita ini kan sudah jadi korban Sinetron, biasanya mereka akan menyukai yang teraniaya

Pemahaman politik awam ini sangat terkait dengan kebiasaan yang dimiliki oleh Indonesia di ruang publiknya. Dalam hal ini cerita seperti sinetron merupakan sebuah analogi bahwa orang Indonesia cenderung memihak pada mereka yang terlihat teraniaya.

Dalam konteks memberi komentar, ada pula yang tidak terpengaruh oleh gerakan seperti ini. Hal ini disebabkan karena perilaku pengguna FB yang tidak jauh dari perilaku masyarakat Indonesia.

Mengapa begitu cepat dukungan terhadap halaman “*Say No To Megawati*”? Sangat sederhana:

- Karena kita di Indo gampang terserang demam
- Parahnya lagi, demam yang nggak jelas

- Mau politic, music, movie or entertainment lainnya, masyarakat kita mudah demam. Cenderung buta, dan mem-babi-buta.
- Apalagi kalau yang berbau2 menjelekkkan atau menyanjung berlebihan.
- Kita di Indo, paling antusias kalo dapat kesempatan “misuhi” orang. Apalagi misuhi yang bisa dilakukan dengan murah [bahkan gratis].

FB di dalam hal ini merupakan laman yang gratis dan sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia. Dalam kata lain, aktifitas yang sanggup menggaet banyak pengunjung ini meski untuk beberapa orang dianggap sesuatu yang fenomenal, namun merupakan pencerminan dari kebiasaan ‘demam’ saja.

Yang menarik dari pernyataan seperti itu adalah bahwa menghujat, ‘misuhi’ atau menjelekkkan orang lain seakan merupakan sebuah kebiasaan. Sehingga kecenderungan ini muncul secara ekstrem pada lingkup politik sebagai bagian dari kebiasaan orang Indonesia. Selain itu, kecenderungan tersebut juga terjadi karena FB adalah bahasa oral yang ditekskan, ketika orang menuliskan komentar tersebut, individu yang bersangkutan mengeluarkannya dengan sepenuh perasaannya. Tulisan tersebut tidak sempat lagi diendapkan oleh seorang individu, berbeda situasinya dengan model tulisan yang penuh dengan renungan dan pilihan kata-kata. Selain itu, FB yang saat ini digunakan dengan lebih cepat melalui telepon selular, merupakan media curhat – curahan hati – di mana individu memiliki media untuk mengungkapkan rasa kecewa dan marah yang selama ini terpendam. Dengan FB rasa marah dan kecewa mendapatkan salurannya.

Dalam konteks politik, rasa marah dan kecewa ini tidak mendapatkan porsi karena partai politik tidak dapat menjangkau konstituen yang jauh dan berjarak. Semoga dengan adanya kasus seperti ini, partai politik menjadi tersadar bahwa konstituen sekarang ini dapat dengan mudah dijangkau dan mereka juga dapat dengan mudah mengemukakan pandangannya tentang politik. Selama ini masyarakat dilabelkan sebagai orang yang berpendidikan rendah dan bersikap apatis,

ternyata tidaklah demikian kenyataannya. Bahwa mereka tidak aktif di dalam partai politik adalah sebuah kenyataan, namun mereka cukup sadar dan mengikuti perkembangan politik dan sosial yang terjadi di Indonesia.

Akan tetapi, komentar yang beragam seperti ini juga mengisyaratkan bahwa di dalam konteks politik, penghujatan harus dilihat sebagai sesuatu yang biasa saja. Hal ini merupakan bagian dari sikap dan penilaian masyarakat terhadap kontestan yang ada.

Menurut saya, sah-sah saja mengatakan “*Say No To Mega to President?*”. Mengapa demikian? karena untuk menduduki presiden harus yang mempunyai keberanian tuk mengatur negara ini, walaupun sampai ke pemerintahan sekarang belum optimal tuk memajukan Bangsa Indonesia ini.

Seorang kontestan harus berani dan mampu menerima kritikan dan penilaian dari masyarakatnya.

Berkaitan dengan penilaian sikap terhadap Megawati juga timbul karena pengalaman Megawati sendiri memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia ini.

Say No To Megawati karena: -gak pengen aset negara dijual lagi ke negara laen (sama ja menginjak harga diri kan? -gak hanya harga diri wong cilik, tapi harga diri bangsa Indonesia -gak pengen ada lagi sistem kerja kontrak -gak pengen ada bagian Indonesia jadi milik negara laen

Penilaian seperti ini menunjukkan adanya alasan tertentu yang membuat Megawati tidak dapat dengan mudah mempertahankan dirinya. Penilaian seperti ini merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari tersudutnya pekerjaan dan bisnis yang dikelola oleh kelas menengah di Indonesia. Pada dekade Orde Baru kelas menengah di Indonesia ditengarai memiliki sikap apatis terhadap politik. Akan tetapi, sebetulnya mereka tidak apatis sama sekali karena mereka memiliki sikap pula terhadap nasionalisme.

Pengalaman Megawati memimpin Indonesia sudah dinilai kurang baik dan dianggap merugikan Indonesia.

Alasan saya untuk *Say No To* Megawati sederhana saja, Megawati pernah diberi kesempatan memimpin bangsa ini selama 3 tahun. Hasil yang dicapai oleh Megawati dasyat sekali yaitu dilelangnya beberapa aset Indonesia kepada negara luar, namun sayang rakyat tidak merasakan hasil pelelangan tersebut. Mungkin jika Megawati diberikan kesempatan kembali saya yakin suatu saat beliau akan menjual harga diri bangsa !!!

Hal ini merupakan pukulan telak bagi Megawati dan PDIP yang seringkali mewacanakan mereka adalah partai yang nasionalis. Sehingga pandangan ini memperlihatkan kondisi masyarakat yang terluka terhadap tindakan politik yang diambil ketika Megawati memimpin Indonesia.

Sikap terhadap Megawati juga timbul karena perilaku politiknya pada saat proses Pemilu berlangsung. Sikap Megawati cenderung menyalahkan orang lain tanpa melihat apa yang sudah dilakukannya ketika dia menjadi penguasa

aku sih dah males kl liat Megawati nonggol di tv, buru-buru ku ganti channel lain. aku juga *Say No To* Megawati karena:

- > bisa nya cuma nyela, mencari kesalahan orang lain, kritik mulu, bukan nya bantu kek cari solusi.
- > dah merasa dirinya nya lah yang paling bener. ngak ngaca apa dulu waktu dia mimpin gimana keadaan Indonesia di bawah pimpinannya malahan tambah jelek dibuatnya.
- > jangan sampe deh dia kembali mimpin bangsa ini, mo dijadiin apa kelak Indonesia tercinta ini

Berdasar pada penilaian tersebutlah para *facebooker* memasukkan penilaiannya. Sikap seperti itu dianggap tidak berusaha mencari solusi bagi Indonesia. Bagi kelas menengah, keamanan dan kestabilan serta pekerjaan menjadi agenda utama. Sehingga tidak aneh ketika mereka menyuarakan sikap anti terhadap Megawati.

Selain itu, pemosting juga menyatakan kesetujuan terhadap pembuat akun SNTM. Pemosting bisa saja masih bersikap netral. Akan tetapi, ketika dia membaca *posting*-an orang lain dia pada akhirnya menyetujui pendapat yang mengalir.

wah seru bgt ni *blog*... setuju...setuju... ya sangat disesalkan juga ya... dengan perkataan Megawati..gua sih netral2 aja... dengan pernyataan dia yang tidak dewasa sama sekali membuat orang menjadi tidak simpati dan empati sama sekali..dengan melihat pengalaman Mega memimpin kemarin, tidak bisa dibayangkan gimana jadinya negeri ini kalo dipimpin dia lagi.... pengen lihat bgt kalo dia bicara di hadapan panelis2 hebat, apa yang mau dikatakannya.. Sukses buat *Say No To Megawati*

Sikap anti Megawati sendiri juga memiliki bentuk yang menyeluruh, dalam pengertian bahwa sikap tersebut tidak hanya terkait pada masalah politik saja. Sikap seperti ini memperlihatkan penolakan yang mendasar.

- Untuk "*Say No To Megawati*". saya cuman bilang "*Say No To be my President, no to be my Mother, no to be my Teacher, no to be my Guide, no to be ... apalagi yah...*" 😊

Pendapat seperti ini merupakan sebuah ungkapan dari rasa tidak percaya kepada Mega yang dimulai dari Mega sebagai presiden hingga Mega sebagai idola. Sikap seperti ini merupakan gambaran bahwa sesuatu yang dahulu dianggap sebagai privat sekarang menjadi publik. Sehingga kehidupan keseharian seorang tokoh politik akan menjadi perhatian dari masyarakatnya.

Pendapat yang sangat pribadi ini didukung lagi oleh pendapat lain yang menyertakan keluarga dari Megawati

dan membiarkan suaminya korupsi merajalela? no way...

Gambaran ini memperlihatkan bahwa keberadaan Megawati ditentukan juga oleh tindakan dari anggota keluarganya, seperti tindakan suami.

Sikap SNTM juga muncul karena sikap politik Mega yang berubah-ubah. Salah satunya adalah sikap anti PDIP terhadap BLT, yang kemudian justru berubah menjadi sikap yang pro BLT. Sikap seperti ini dianggap sebagai sebuah kesalahan pengambilan keputusan.

saya *Say No To* Mega karena: “Bu Mega dengan keras menolak adanya BLT di setiap kampanyenya karena dianggap memberikan ikan bukan pancing ke rakyat”, TAPI FAKTANYA...

sekarang malahan mengawasi distribusi BLT, itu kan sama saja menyetujui??? yg konkrit dunk . . .

“udah gitu bikin iklan mengawasi BLT rakyat dan bilang terima kasih PDIP, emang yang ngasih BLT itu PDIP ya? bukannya pemerintah??” TANYA KENAPA??

PDIP tidak hanya berubah sikap tetapi juga mengambil bagian dari program seperti itu, sebagai pengawas. Maksud PDIP adalah menjadi partai oposisi yang diterjemahkan sebagai partai yang mengawasi implementasi program pemerintah. Akan tetapi, bagi pemilih sikap seperti ini merupakan sikap yang kurang baik.

Ada pula komentar yang berkaitan dengan kepercayaan yang berkaitan dengan berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya bencana merupakan sesuatu yang embeded di Indonesia karena Indonesia berada di lempeng yang membuat kita rentan terhadap bencana.

Say No Mega plus *Say No* SBY, soale bencana terus ngikuti bangsa ini, nggak percayaa ??????

Keberadaan bencana di Indonesia dikaitkan dengan kekuasaan, di mana bencana menjadi kambing hitam dari kekuasaan di Indonesia. Jika dikembalikan pada mitos yang hidup di dalam masyarakat, keberadaan pemimpin selalu dikaitkan dengan kondisi bencana. Dalam konteks seperti ini maka bencana kemudian identik dengan karakter pemimpin yang tidak tepat untuk dijadikan panutan. Megawati dalam hal ini dinilai, lebih berat ketimbang pemimpin lainnya juga karena pengaruh dari suaminya.

Ada pula komentar yang memberikan untuk bergabung dengan laman ini seperti yang ada di bawah ini.

ntar mo gabung ah di grup *Say No To Megawati* 😊

Komentar untuk bergabung ini diikuti oleh komentar yang mendukung keinginan individu untuk bergabung di SNTM.

Kayaknya ngga perlu mikir panjang buat join group itu deh. Gue aja ga pake mikir. Begitu liat ada group itu, langsung: Yiha!! ternyata banyak yang ga suka Mega!—yaudah join group aja deh 😊

Barangkali yang menarik adalah adanya komentar tentang ketiadaan komentar yang memposisikan diri berbeda dari SNTM.

Kok jarang banget (malah gak ada?) yang protes ttg ini yah? Yang maki2 di post ini misalnya hehehe...

Barangkali karena *postingnya* sudah jelas memperlihatkan SNTM, sehingga yang masuk adalah mereka yang sudah memiliki simpati atau sudah memiliki pendapat yang serupa. Adanya SNTM merupakan pemicu untuk mengumpulkan individu-individu yang memiliki pandangan yang sama.

3.3.11. Analisis Gender

Analisis gender memfokuskan diri pada *posting-an Say No To Megawati*, yang berisi komentar, pandangan, sebutan yang berkaitan dengan Megawati. *Posting-an* seperti itu dapat memperlihatkan konstruksi perempuan yang mereka miliki. Pendefinisian tentang pemimpin perempuan merupakan gambaran tentang ideologi gender yang hidup di dalam masyarakat. Akan terlihat meskipun mereka yang berpartisipasi melalui FB adalah orang muda dan kemungkinan besar berpendidikan menengah – tinggi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih rancu dalam melihat perempuan sebagai pemimpin.

Dalam hal ini yang menarik adalah tidak semua hanya melihat pemimpin perempuan, tetapi juga mengomentari tentang kecenderungan

kepemimpinan yang sekarang ini menjadi ‘masalah’ di Indonesia. masyarakat masih dipengaruhi oleh pandangan metafisika. Dapatlah hal ini disebutkan sebagai pengaruh dari mitos tentang pemimpin yang hidup di dalam masyarakat. Mitos ini masih dipengaruhi oleh kepercayaan bahwa satrio piningit secara langsung mengacu pada laki-laki, karena kata satrio yang dipergunakannya.

Politik generasi mengacu pada kecenderungan kebertahanan dari patriarkhi. Secara kebetulan yang menjadi ilustrasi di sini adalah Megawati. Akan tetapi, di dalam konteks besar politik Indonesia, bahkan kecenderungan seperti ini muncul di dalam pilkada juga, seperti calon adalah istri atau anak dari seorang laki-laki yang pernah memegang kepemimpinan. Kecenderungan ini meski menyeruak kembali di politik Indonesia dan memperlihatkan struktur gender yang berdinamika di dalam politik.

Di dalam memperhatikan politik perempuan, ternyata kehidupan keseharian perempuan menjadi bagian yang tidak terlepas dari pandangan masyarakat. Akibatnya, tidak aneh bahwa perilaku Megawati menjadi perhatian. Kecenderungan ini kurang terlihat pada kontestan laki-laki. Di dalam memperhatikan politik perempuan, ternyata kehidupan keseharian perempuan menjadi bagian yang tidak terlepas dari pandangan masyarakat. Kecenderungan ini kurang terlihat pada kontestan laki-laki. Dalam hal ini termasuk juga perhatian masyarakat pada gaya kepemimpinan Megawati itu sendiri, kecenderungannya yang mengkritik orang lain menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kecenderungan ini sendiri merupakan kepanjangan reaksi dari politik generasi yang ada, di mana terdapat kecenderungan elit di dalam politik. Hanya saja situasi yang sekarang ini berkembang sudah mulai keluar dari ciri politik elit.

Dalam kaitannya dengan politik generasi termasuk juga mereka yang dianggap sebagai pengikut fanatik merupakan turunan dari pengikut generasi sebelumnya. Saat ini ada kecenderungan untuk melihat bahwa pengikut Megawati adalah preman yang memiliki keinginan untuk melakukan kekerasan. Meskipun pada kenyataannya hal ini

merupakan proses labelisasi yang mengikuti perkembangan dari partai politik pendukung Megawati.

Ketika konsep demokrasi menjadi bagian yang dibahas, maka demokrasi yang didiskusikan adalah demokrasi yang berkaitan dengan dunia maya. Di dunia maya konteks demokrasi mendapatkan bentuk lain yaitu adanya pemahaman tentang demokrasi di dalam pikir. Dalam hal ini mempertanyakan demokrasi dalam pikiran yang dikomentari sebagai 'bukan demokrasi' sehingga demokrasi yang hidup dalam keseharian adalah demokrasi dalam konteks ekspresi langsung. Mereka yang bergiat di FB pada umumnya adalah masyarakat umum yang cenderung turut dalam ekspresi politik secara langsung juga terbatas. Di sini terlihat adanya 'kelas' yang berbeda dan terkait pula pada perbedaan pemahaman tentang demokrasi.

Para pemosting dalam hal ini bereaksi terhadap kemiskinan sebagai komoditas politik yang diangkat, baik oleh Megawati maupun oleh partai penunjangnya. Pemosting juga menyadari tentang sikap yang ditampilkan oleh Megawati dan pendukungnya terhadap kemiskinan. dalam hal ini terlihat adanya kesenjangan dari tokoh politik yang cenderung elit politik dengan pendukungnya yang menamakan diri kelas bawah. Dalam hal ini baik tokoh maupun dari partai pendukung belum menggarap isu 'wong cilik' dalam konteks perkembangan saat ini yang berbeda situasinya dari kata yang sama pada dekade generasi sebelumnya. 'Wong cilik' sudah tidak memiliki konsep sosialis yang mendukungnya seperti pada zaman generasi sebelumnya, sekarang konsep ini sangat berkaitan dengan kemiskinan yang menjadi bagian dari masalah Indonesia.

Dalam konteks penggunaan sebutan, beberapa dari sebutan memperlihatkan bahasa yang seksis yang menyudutkan perempuan. Sebutan tersebut muncul dari sikap Megawati sendiri di dalam mengambil tindakan politik yang dinilai tidak konsisten. Meskipun ada pula bahasa yang seksis yang mengacu pada tubuh seperti bentuk bibir ataupun umur.

Adanya kecenderungan untuk mengomentari Megawati dalam konteks bahasa yang seksis. Akan tetapi, juga disebabkan karena pilihan tindakan politik Megawati. Dalam hal ini para pemosting merupakan kelompok yang cenderung terpengaruh oleh tindakan yang diambil oleh Megawati, mereka memiliki pandangan nasionalisme yang tidak disadari oleh elit politik. Para elit politik yang mengatasnamakan rakyat di dalam mengambil keputusan ternyata tidak disetujui oleh sebagian dari mereka, namun tidak memiliki cara untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan politik tersebut. Akibatnya, tidak aneh melihat komentar terhadap tindakan politik Megawati yang tidak disukai mereka. Kelas sosial ini adalah kelas yang memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan yang membuat mereka juga memahami detail yang terlepas dari pandangan masyarakat Indonesia yang tampil di ruang publik politik pada umumnya.

Sebagai pemimpin yang perempuan, padanan yang dijadikan contoh adalah pemimpin kelas dunia seperti Hillary Clinton yang sepanjang kehidupannya sudah mendapatkan pendidikan politik yang baik. Dalam konteks perbandingan seperti ini keberadaan Mega menjadi sesuatu yang dapat dianggap sebagai sebuah harapan bagi sebagian orang yang mengharapkannya untuk menghasilkan sesuatu yang sangat hebat. Namun di sisi lain, Megawati juga berhadapan dengan kenyataan adanya masalah generasi dalam regenerasi pemimpin di Indonesia. Megawati juga berhadapan dengan beberapa laki-laki yang tampak menonjol di dalam politik Indonesia. Padananya dengan SBY dalam konteks tubuh memperlihatkan kecenderungan masyarakat Indonesia untuk melihat laki-laki sebagai pemimpin. Tidak hanya sebagai pemimpin, laki-laki yang cocok sebagai pemimpin adalah orang dengan tubuh yang secara rata-rata lebih besar dibandingkan dengan rata-rata orang Indonesia.

Komentar yang muncul adalah kecenderungan pribadi Megawati di dalam bertindak yang menjadi perhatian dari pemosting. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa tindakan politik tokoh politik perempuan juga menyangkut kecenderungannya secara pribadi dan dalam tindakan kesehariannya. Hal yang kurang menjadi perhatian dari masyarakat terhadap tokoh politik laki-laki. Artinya, di dalam menilai

sebuah tindakan maka tokoh politik perempuan masih membawa beban tradisional perempuan yaitu dinilai tidak hanya pada domain publik tetapi juga pada domain privat.

Komentar pemosting terhadap NKRI dan juga kepentingan Indonesia yang kurang terwakili di dalam daftar keputusan politik yang diambil oleh para tokoh politik, dalam hal ini Indonesia, memperlihatkan pandangan nasionalisme mereka. Tidak dalam konteks nasionalisme yang buta melainkan nasionalisme yang menyadari potensi Indonesia, potensi diri mereka dan bagaimana mereka 'dirugikan' paling tidak dalam konteks bahwa mereka dianggap tidak mengetahui politik. Selain itu, juga pandangan mereka yang menyadari tentang perkembangan dunia global.

Para pemosting yang memiliki kecenderungan umur orang muda tidak memiliki konteks 'feodal' seperti yang dimiliki oleh pengikut fanatik. Feodal dalam hal ini adalah tindakan seperti kultus individu. Dalam hal ini tidak ada yang dapat dipersalahkan karena memang terhadap kesenjangan generasi di mana tindakan kultus individu seperti itu tidak pernah dialami oleh mereka yang sekarang mengembangkan sikap individu seperti kemandirian. Meminum air cucian kaki dilakukan oleh pengikut Katolik dalam menghormati kepemimpinan Paus. Akan tetapi, konteks seperti itu terlihat tidak sesuai dengan konteks sosial di Indonesia. Dalam hal ini politik masih dilihat sebagai ranah yang seharusnya demokratis.

Tindakan dan komentar atau tidak berkomentarnya Megawati, merupakan titik kelemahan di dalam kepemimpinan perempuan ala Megawati. Kecenderungannya membuatnya tampak tidak profesional, Selain itu komentarnya yang cenderung seperti pola komentar keseharian, yang tampak seperti pola menjelekkkan orang lain. Dalam hal ini tindakan politik seperti ini perlu disadari sebagai kecenderungan yang ada dan ternyata bernilai buruk di dalam masyarakat. Komentar seperti ini merupakan kecenderungan bahwa sesuatu yang pribadi sekarang ini menjadi milik publik dengan berbagai kemajuan TIK termasuk di dalamnya adalah peran media massa.

Posting tidak semua menjelekkkan Megawati, ada juga yang membela dengan memperlihatkan bahwa satu perempuan harus di'keroyok' oleh banyak laki-laki. Sayangnya tokoh politik perempuan yang saat ini posisinya paling tinggi adalah Megawati, meskipun keberadaannya di domain tersebut sangat berkaitan dengan konteks kesejarahan dari Megawati itu sendiri. Komentar seperti ini meskipun tidak populer di SNTM namun memperlihatkan bahwa beberapa orang di dalam pemosting mengingatkan bahwa kecenderungan komentar mereka tidak berbeda dari Megawati. Seakan-akan menjelekkkan orang lain merupakan kecenderungan dari masyarakat itu sendiri.

Barangkali gambaran yang mengagumkan dari SNTM adalah perasaan bahwa mereka ternyata memiliki kesamaan dalam pemikiran meskipun tidak pernah berjumpa, tidak terkait pada organisasi tertentu, bukan anggota partai politik. Kesadaran ini yang kemudian melihat sisi positif dari SNTM, yaitu mempersatukan, sehingga komentar yang tadinya dinilai buruk ternyata memiliki fungsi yang positif. Yang menjadi perhatian menarik dalam konteks dunia maya ini adalah adanya kesadaran tentang kesatuan di antara perbedaan yang mereka miliki. Barangkali perasaan seperti ini yang justru jarang dan menjadi pertanyaan bagi individu-individu ini sendiri. FB sebagai sebuah jejaring sosial ternyata memiliki fungsi positif di dalam politik Indonesia. *Posting* yang membela Megawati cenderung terbatas dan pada dasarnya memperlihatkan bahwa penilaian orang terhadap Megawati jauh lebih tajam dibandingkan dengan kandidat presiden atau yang pernah menjadi presiden sebelumnya. Hal ini merupakan kecenderungan posisi perempuan di dalam ranah politik yang masih dilihat sebagai ranah laki-laki.

Yang menarik dari pernyataan seperti itu adalah bahwa menghujat, 'misuhi' atau menjelekkkan orang lain seakan merupakan sebuah kebiasaan. Akibatnya, kecenderungan ini muncul secara ekstrem pada lingkup politik sebagai bagian dari kebiasaan orang Indonesia. Selain itu, kecenderungan tersebut juga terjadi karena FB adalah bahasa oral yang ditekskan, ketika orang menuliskan komentar tersebut, individu yang bersangkutan mengeluarkannya dengan sepenuh perasaannya.

Tulisan tersebut tidak sempat lagi diendapkan oleh seorang individu, berbeda situasinya dengan model tulisan yang penuh dengan renungan dan pilihan kata-kata. Selain itu, FB yang saat ini digunakan dengan lebih cepat melalui telepon selular, merupakan media curhat – curahan hati – di mana individu memiliki media untuk mengungkapkan rasa kecewa dan marah yang selama ini terpendam. Dengan FB rasa marah dan kecewa mendapatkan salurannya.

Dalam konteks politik, rasa marah dan kecewa ini tidak mendapatkan porsi karena partai politik tidak dapat menjangkau konstituen yang jauh dan berjarak. Semoga dengan adanya kasus seperti ini, partai politik menjadi tersadar bahwa konstituen sekarang ini dapat dengan mudah dijangkau dan mereka juga dapat dengan mudah mengemukakan pandangannya tentang politik. Selama ini masyarakat dilabelkan sebagai orang yang berpendidikan rendah dan bersikap apatis, ternyata tidaklah demikian kenyataannya. Mereka tidak aktif di dalam partai politik adalah sebuah kenyataan, namun mereka cukup sadar dan mengikuti perkembangan politik dan sosial yang terjadi di Indonesia.

Keberadaan bencana di Indonesia dikaitkan dengan kekuasaan, di mana bencana menjadi kambing hitam dari kekuasaan di Indonesia. Jika dikembalikan pada mitos yang hidup di dalam masyarakat, keberadaan pemimpin selalu dikaitkan dengan kondisi bencana. Dalam konteks seperti ini maka bencana kemudian identik dengan karakter pemimpin yang tidak tepat untuk dijadikan panutan. Megawati dalam hal ini dinilai, lebih berat ketimbang pemimpin lainnya juga karena pengaruh dari suaminya.

BAB IV

PANDANGAN FACEBOOKERS TERHADAP DEMOKRATISASI MELALUI INTERNET

4.1 Perkembangan Demokrasi Melalui Internet di Indonesia

Bagian ini merupakan rangkuman dari hasil wawancara dengan para *facebbokers* di Bandung dan Yogyakarta yang berprofesi sebagai mahasiswa S1, mahasiswa S2, dosen, dan peneliti. Pada umumnya informan menuturkan bahwa demokratisasi melalui internet di Indonesia sudah mulai berkembang. Sapto (bukan nama sebenarnya) yang bekerja sebagai peneliti pada BPPU Yogyakarta menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam melihat demokratisasi melalui internet. Para *digital immigrant* umumnya mencurigai kejujuran ekspresi demokratisasi melalui internet, namun bagi para *digital native* umumnya yakin bahwa ekspresi politik mereka yang terlibat dalam forum diskusi ‘*Say No To...*’ adalah jujur. Menurut Sapto, bisa saja identitas mereka tidak jujur namun ekspresi politik mereka jujur.

Lebih lanjut Sapto menjelaskan bahwa kampanye melalui internet sangat penting meskipun penduduk Indonesia yang mengakses internet berkisar baru 10% karena kampanye tersebut tidak jarang dijadikan ”rujukan“ oleh media lain yaitu media elektronik dan cetak. Seringkali setelah isu dihembuskan melalui internet maka media lain mengembangkan isu tersebut. Lebih lanjut sebut saja televisi, media inilah yang menurut saya paling signifikan karena beragam berita yang disiarkan termasuk fenomena kampanye di internet dapat diketahui oleh khalayak. Kita mengetahui bahwa kini televisi bukan lagi barang mewah bagi masyarakat Indonesia, dan dari sinilah sebagian masyarakat Indonesia mengetahui kampanye presiden termasuk isu kampanye yang berkembang melalui internet. Penyampaian informasi kepada khalayak mengenai kampanye di internet dan televisi, terlepas dari benar dan salahnya dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kecenderungan pencitraan salah satu calon tertentu.

Kampanye melalui internet, misalnya melalui FB, *blog* atau situs pribadi, dipandang penting karena cukup pesatnya perkembangan internet di Indonesia. Pengguna situs-situs jejaring sosial seperti *maillist*, FB, dan *twitter* merupakan kelompok-kelompok masyarakat baru yang mempunyai kekuatan untuk bisa memengaruhi sebuah kebijakan publik, contohnya ialah “Gerakan 1.000.000 *facebookers* dukung Bibit samad Riyanto dan Chandra Hamzah” ketika terjadi kasus kriminalisasi KPK serta gerakan dukung Prita melalui ”Koin untuk Prita“. Gerakan “Koin untuk Prita” yaitu gerakan untuk melawan kesewenang-wenangan RS Omni internasional.pada awalnya merupakan melalui internet, namun gerakan tersebut kemudian berlanjut ke dunia nyata. Begitupun dengan hujatan dari *bloggers* dan *facebookers* terhadap tayangan “Silet” yaitu sebuah acara *infotainment* yang oleh sebuah stasiun televisi swasta yang menyebutkan bahwa “Yogya adalah kota Bencana” berdampak pada dihentikannya tayangan Silet tersebut.

Walaupun gerakan ini belum bisa sepenuhnya dikatakan berhasil, namun gerakan-gerakan dari pengguna internet yang dilakukan melalui situ-situs jejaring sosial tersebut dapat membuktikan bahwa mereka mempunyai kekuatan untuk bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dan mengkritisi masalah-masalah yang sedang terjadi di lingkungan mereka. Mereka dapat menggalang bantuan untuk menolong orang yang tidak mempunyai biaya.

Berangkat dari keberhasilan “Gerakan 1.000.000 *facebookers* dukung Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah” dan “Koin untuk Prita” menandakan bahwa cukup penting bagi capres/cawapres untuk berkampanye di internet. Melalui internet capres/cawapres bisa masuk ke dalam komunitas-komunitas dunia maya untuk menyampaikan visi-misi mereka. ”Para petualang di dunia maya” harus dirangkul karena kekuatan yang dapat dihasilkan dari komunitas-komunitas dunia maya cukup besar.

Memang ada yang menganggap bahwa kemunculan beberapa *blog* “*Say No To...*” tersebut mungkin dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk *black campaign*. Bagaimana sekelompok orang membuat

sebuah *blog*, forum, atau situs yang isinya mencoba untuk menggalang “kekuatan” untuk mengajak orang lain agar ikut kepada keinginan mereka. Tidak jarang berbagai *blog* itu digunakan untuk mendiskreditkan capres/cawapres lawan masing-masing, di samping menggugulkan pasangan idolanya. Bahkan, tidak sekedar upaya pendiskreditan mentah semata, tidak sedikit diembeli dengan beragam fakta-fakta mengenai “dosa-dosa” tiap-tiap capres/cawapres lawan. Sebut saja bagaimana salah satu capres-cawapres diberikan “kegagalannya” dalam memerintah pada periode sebelumnya dan berbagai dosa lainnya. Hal ini jelas berpengaruh terhadap reputasi orang-orang yang terdapat dalam situs tersebut. Data-data yang disajikan di dalam situs tersebut adalah data-data yang berupaya untuk menggiring opini para pembaca agar pembaca bisa ikut dengan keinginan mereka. Kalau pembaca terpengaruh oleh apa yang disajikan dalam *blog* tersebut, maka jelas tujuan dari pembuatan *blog* tersebut tercapai.

Seringkali tujuan dari pembuatan FB “*Say No To...*” tersebut sudah jelas merupakan sebuah upaya “mendiskreditkan” pasangan yang ada di FB tersebut. Ada sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai penilaian tersendiri terhadap capres/cawapres yang berdasarkan penilaiannya tersebut merasa bahwa calon tersebut tidak pantas untuk menjadi presiden. Mereka berupaya untuk menjegal calon tersebut dengan berupaya menggiring opini publik berdasarkan informasi atau data-data yang mereka tampilkan di dalam FB yang mereka buat. Apabila data-data yang disajikan di dalam FB tersebut dianggap merupakan sebuah fitnah, maka sah-sah saja jika pasangan tersebut melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu). Malah jika memang informasi tersebut adalah sebuah bentuk fitnah yang bertujuan untuk melakukan sebuah bentuk pembunuhan karakter, bisa saja si calon melaporkannya kepada pihak kepolisian atas dasar pencemaran nama baik. persoalannya ialah: apakah sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hal itu? Seharusnya bawaslu harus mengambil sikap atas terjadinya fenomena seperti itu karena hal itu akan terus berlanjut dalam Pemilu berikutnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaduan ke bawaslu itu sangat bisa mengurangi kredibilitas calon tersebut kepada pemilih. Kepercayaan publik akan calon tersebut tentu saja akan tergerus, apalagi apabila secara terang-terangan *blog-blog* tersebut membeberkan “fakta-fakta” keburukan dari capres tersebut, terutama jelas-jelas calon tersebut “pernah dianggap gagal” selama pemerintahannya sebelumnya.

Munculnya fenomena *blog* yang mendiskreditkan salah satu capres/cawapres memang bertujuan untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap calon yang tidak mereka sukai. Pada mulanya kegiatan ini dilakukan mungkin dengan segala cara untuk bisa mencapai semua golongan masyarakat. Mulai dari yang paling murah, seperti omongan-omongan di warung, forum-forum diskusi, internet, sampai dengan yang paling mahal, seperti melalui kampanye *black campaign* di media cetak dan televisi.

Internet dianggap sebagai bagian penting untuk menggiring opini publik ini karena internet sudah menjadi media yang bisa mempertemukan mereka dengan orang lain melalui situs-situs jejaring sosialnya seperti *blog, facebook, twitter, group, dan mail-list*. Jejaring sosial ini dirasakan cukup kuat untuk menggiring opini publik. Apakah munculnya *blog* yang mendiskreditkan salah satu capres-cawapres merupakan bagian dari demokrasi? Seorang informan dengan tegas mengatakan: ”Ya mungkin saja. Saya tidak begitu memahami apa bentuk demokrasi tersebut. Yang jelas dari apa yang mereka lakukan ini, dunia politik kita memang sudah lama tercemar oleh cara-cara kotor hingga melahirkan istilah-istilah keren yang memasyarakat. Ada *money politic*-lah, ada *character assassination*-lah sampai kepada *black campaign*-lah. Mungkin ini bagian dari demokrasi. Sisi baik dari sebuah *blog* ini adalah, masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi yang sifatnya negatif dari calon meskipun hal itu bisa saja bukan hal yang sebenarnya. Bertambahnya pengetahuan mengenai calon-calon tersebut seharusnya bisa menjadi dasar bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, kedewasaan berpikir dan analisis pemilih terhadap kebenaran informasi tersebut diperlukan sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya dengan bijak”.

Terlepas dari demokratis atau tidak dengan keberadaan *blog* yang mendiskreditkan capres-cawapres, selama *blog-blog* yang bisa diakses khalayak memberikan informasi faktual dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, hal tersebut sah-sah saja. Apalagi, berita-berita dalam *blog* tersebut disiarkan dalam media-media lain, khalayak pemilih (awam) secara tidak langsung akan mengetahui dan percaya mengenai validitas informasi yang dimuat. Persoalannya ialah: apakah masyarakat Indonesia sudah memiliki kemampuan menyaring informasi?

Ada sejumlah pandangan mengenai hubungan antara *blog/facebook* dengan unsur lain. **Pertama**, FB "*Say No To....*" memang menjadi resonansi kekecewaan masyarakat terhadap masing-masing capres/cawapres tersebut. Masyarakat yang kecewa terhadap calon ini, akan berusaha untuk menjegalnya. Mereka tidak ingin pasangan tersebut berhasil karena berdasar pengetahuan dan pengalaman mereka, calon tersebut mungkin tidak layak menjadi presiden. Bisa saja calon tersebut dianggap tidak akan mampu membawa perubahan terhadap nasib bangsa.

Kedua, bisa saja FB "*Say No To....*" bukan sebuah bentuk kekecewaan, tetapi merupakan sebuah ketakutan karena apabila calon yang mereka "hujat" ini berkuasa mereka akan terancam. Bisa saja karena terancam secara hukum atau terancamnya usaha/mata pencaharian mereka karena mereka ini adalah lawan politik mereka sebelumnya. Oleh karena itu, mereka akan berupaya untuk menjegal calon tersebut agar tidak bisa berkuasa sehingga kehidupan mereka tetap bisa nyaman.

Ketiga, kemunculan FB "*Say No To....*" memang diskenariokan oleh pasangan tersebut. Di antara informan ada yang melihat dalam konteks dua pilpres kemarin, 2004 dan 2009. Pada Pemilu 2009, dari beberapa calon yang maju, capres-cawapres, yang paling piawai dan produktif menciptakan '*black campaign*', harus diakui, adalah pasangan SBY-Boediono pada pilpres 2009. Tim FOX yang merupakan konsultan politiknya SBY-Boediono, habis-habisan dalam usaha ini. Mereka berusaha untuk melakukan *black campaign* terhadap pasangan SBY-

Boediono. Hal ini mereka lakukan karena berdasarkan pemilihan pilpres sebelumnya, "calon yang dianggap **dizholimi** akan menjadi pemenang." Tim Fox ini sadar bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas adalah penikmat sinetron adalah bangsa yang pelupa dan mudah bersimpati kepada orang yang sedang dizholimi. Oleh karena itu, mereka berupaya habis-habisan membuat isu-isu yang dianggap sebagai sebuah bentuk penzholiman terhadap SBY dan Boediono. Banyak rakyat yang termakan dengan isu-isu murahan yang di buat oleh FOX ini, sehingga kritik-kritik dan pandangan negatif terhadap SBY dan Boediono yang keluar dari masyarakat maupun tim sukses dari calon lain, juga dianggap sebagai sebuah upaya penzholiman.

4.2 Pola Penggunaan Media Baru untuk Politik dan Demokrasi

Berkembangnya demokratisasi melalui internet disebabkan oleh penggunaan media baru di kalangan masyarakat meningkat. Ina (bukan nama sebenarnya) menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat menggunakan media baru, terutama FB untuk keperluan politik dan demokrasi ketika mereka masuk di perguruan tinggi. Hanya beberapa saja yang memulainya ketika tahun terakhir di SMA. Alasan mereka menggunakannya adalah karena ikut-ikutan dan hal itu menjadi kegiatan yang menarik. Mereka mulai dari *chatting*, YM dan baru kemudian ketika FB ada mereka juga turut di dalamnya.

Sekarang mereka menggunakan *twitter* karena moda itu sedang in. Selain itu, di dalam *twit* bisa lebih cepat mendapatkan berita. *Twitter* lebih mudah dan lebih banyak orang yang dapat dihubungi secara langsung. Di dalam pola *twitter* dibuka setiap hari, dan setiap ada kesempatan. Mereka merasa bahwa tanpa membuka *twitt* mereka merasa ditinggalkan dan ada yang hilang. Penggunaan mekanisme seperti ini menghasilkan orang autis yaitu orang yang sibuk dengan dirinya masing-masing.

Dilihat dari pola penggunaannya, mereka membuka FB tidak setiap hari melainkan 3 kali seminggu hingga 1 minggu sekali. Mereka

membuka FB untuk mengecek status dari para teman serta untuk *on line* shopping. Mereka menyukai pola penjualan melalui FB yang dilakukan dengan tahapan meng-*add* sebagai teman dan kemudian meulai menjajakan dagangannya. Produk yang diperdagangkan dapat dilihat melalui foto yang ditampilkan, membayar harganya dan dkemudian menunggu barang tersebut di rumah. Informasi tentang yang *add* diperoleh dari *tag* orang pertemanan dan persaudaraan.

Seorang informan mengemukakan bahwa dia pernah menggunakan FB untuk mendukung Bibit-Chandra, Prita, serta Bilqis. Sementara itu responden lain mengemukakan bahwa dirinya pernah mendukung gerakan Rp 10.000 untuk seseorang supaya mampu menyelesaikan sekolah. Namun demikian penggunaan terbanyak adalah untuk mencari teman. Setelah berkenalan melalui FB beberapa responden melanjutkan dengan copy darat bahkan beberapa di antaranya kemudian berteman dengan baik.

Twitter dapat digunakan untuk kebutuhan demokrasi sebagai ilustrasinya adalah forum BDG, yang berisi informasi tentang banyak hal. Setelah ditelusuri ternyata ini adalah inisiatif pribadi dan tidak ada lembaganya. Masalah kelembagaan cukup penting karena berhubungan dengan kredibilitas. Seperti berita dari Kompas atau Detik akan lebih dipercaya. Selain itu, pembuat berita seperti itu berlomba-lomba memasukkan berita yang lebih kini dibandingkan dengan media lain, atau mereka menggambarkan dengan sudut yang berbeda.

Beberapa informan juga melakukan pengamatan terhadap *twitter* Tifatul Sembiring. Hal ini disebabkan karena Tifatul Sembiring adalah Menkominfo. Artinya, mereka melakukan pengamatan terhadap orang-orang tertentu yang dianggap penting di Indonesia.

Perhatian tentang ini belum disadari oleh lembaga pendidikan di mana mereka belajar. Meskipun mereka mengetahui tentang *citizen journalism*. Akan tetapi, Forum BDG belum dianggap sebagai kajian untuk jurnalisme. Alasannya adalah pekerjaan tetang jurnalisme harus mengacu pada media yang sudah mapan saja. Yang lain tidak dianggap sebagai media termasuk koran lokal.

Twitter pernah digunakan untuk menggerakkan demonstrasi. Hal ini bisa dilihat pada acara evaluasi 100 hari SBY. Di dalam *twitter* terdapat himbauan untuk berkumpul di Monas pada jam dan tanggal tertentu. Himbauan ini bekerja karena beberapa mahasiswa datang ke tempat yang sudah ditentukan dan melakukan demonstrasi. Di dalam *twitter* dapat dilakukan dialog dan diskusi tentang hal-hal yang penting, membuka kesempatan bagi *fans* untuk berhubungan dengan para selebritis yang disukai mereka. Ada kasus seseorang masuk ke *twitt* karena merasa bahwa *twitt*-nya tidak dijawab oleh Cristian Sugiono. Tiba-tiba ada jawaban dari Christian dan kemudian dia menaruh berita tersebut pada status di FB-nya.

Mekanisme ini bisa digunakan untuk sesuatu yang baik, seperti *twitt* sebenarnya adalah *citizen journalism* di mana orang tidak menyukai kecenderungan *media mainstream* bisa menggunakan media baru atau internet. Yang terjadi sebenarnya isu dan pendapat di dalam masyarakat dipengaruhi oleh media dengan kemampuannya sebagai *agenda setting*. Oleh karena itu, media internet merupakan bentuk perlawanan.

Hal ini masih merupakan sebuah tantangan, karena informasi yang diberikan adalah bahwa Indonesia menggunakannya lebih banyak untuk berhubungan sosial, dan tidak untuk sesuatu yang penting. Selain untuk perlawanan, media ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mengarsipkan sesuatu, seperti melalui photo atau mengarisbawahi sebuah pendapat. Mereka menggunakan cara seperti Wikiku yang berisi pandangan dari diri pribadi. Akan tetapi, dibutuhkan administrasi untuk melihat bahwa berita atau tulisan yang diberikannya menggunakan bahasa yang sesuai.

BAB V

P E N U T U P

Cyber demokrasi adalah kajian yang sangat penting karena ada fenomena di dalam masyarakat yang belum dilihat sebagai sesuatu yang penting. *Cyber demokrasi* di dalam kajian ini didefinisikan secara umum sebagai gerakan masyarakat madani yang muncul melalui internet, dengan kasus penggunaan FB pada pilpres 2009. Penggunaan FB yang diamati adalah gerakan *Say No To Capres*, seperti *Say No To Megawati*, *Say No To Jusuf Kalla* dan *Say No To SBY*.

Metode yang digunakan adalah analisis wacana dengan menggunakan metode Sara Mills dengan memfokuskan pada tiga masalah, yaitu kelas, ras/etnisitas, dan gender. Metode penelitian lain yang digunakan adalah wawancara mendalam pada beberapa pakar serta pengguna FB. Wawancara seperti ini dilakukan dengan maksud memberikan gambaran yang lebih nyata tentang signifikansi dari kajian ini. Dalam proses penelitian terdapat beberapa hal yang membutuhkan perubahan, antara lain adalah *Say No To Megawati* dihentikan sehingga data asli tentang hal ini tidak dapat diperoleh. Untuk mengatasi ini ada gerakan *Say No To Megawati (clean)* yang dibuat khusus untuk menggantikan gerakan yang sudah ditutup tersebut. Kemudian, di dalam proses penelitian ternyata data terbanyak adalah pada *Say No To Megawati* dibandingkan dengan capres lainnya. Sangat menarik bahwa reaksi terhadap Megawati merupakan reaksi yang dominan. Oleh karena itu, jumlah informasi yang dikumpulkan pada gender akan lebih banyak dibandingkan dengan data kelas dan ras/etnisitas.

Deskripsi yang dilakukan ini merupakan tahapan dari beberapa proses yang muncul pada analisis wacana. Proses awal merupakan kompilasi dari tema-tema yang muncul yang kemudian dibagi pada konsep kelas, ras/etnis, dan gender. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah mengategorikannya pada tema-tema yang dinamakan struktur diskursif pada laporan ini. Tahapan selanjutnya yang masih di dalam

proses adalah membacanya dalam konsep kelas, ras/etnisitas, dan gender yang lebih mendalam.

Gerakan seperti *Say No To* salah satu capres ini menarik karena beberapa hal. Di dalam penggunaan bahasa, bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan yang ditekskan. Salah satu kritik yang muncul di dalam penggunaan bahasa adalah kekasaran, keterbukaan yang berlebihan sehingga dianggap sebagai bahasa yang menjelek-jelekkan. Akibatnya, kritik tidak hanya terhadap penggunaan bahasa dan kesan menjelekkan. Akan tetapi, juga penjelasan tentang reaksi yang berlebihan terhadap fenomena seperti ini. Komentar yang *diposting*kan memiliki berbagai sisi yang dinamakan di dalam analisis wacana yang digunakan sebagai struktur diskursif. Terdapat beberapa struktur diskursif yang ditemukan, antara lain tentang kenyataan reaksi spontan di FB. Struktur diskursif ini merupakan pengategorian tema-tema yang muncul di dalam gerakan seperti ini.

Tema yang muncul berkaitan dengan sebutan, seperti Ratu Plin Plan yang ditimpakan kepada Megawati. Sebutan seperti ini merupakan pandangan seseorang terhadap tindakan politik yang dalam kasus ini ditujukan kepada Megawati. Sebutan seperti ini tidak muncul secara langsung. Akan tetapi, merupakan reaksi terhadap tindakan politik yang dilakukan oleh Megawati.

Tema kemiskinan merupakan gambaran dari kepedulian masyarakat terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah besar di Indonesia yang cenderung menjadi komoditas politik, sehingga tidak aneh bahwa konsep seperti ini kerap muncul di dalam politik. Salah satunya adalah kemiskinan merupakan kritik dari mereka yang berada di luar kekuasaan untuk mengkritik apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Demokrasi adalah bagian yang lekat tidak hanya karena situs yang diakses merupakan pandangan terhadap masalah politik. Masyarakat dalam hal ini melihat FB sebagai penyaluran aspirasi atau pandangan masyarakat yang tidak masuk di dalam pandangan elit politik. Pandangan ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak apatis dan

sangat mengikuti perubahan politik yang terjadi. *Posting* mereka di FB menggambarkan pandangan politik yang berkembang di kalangan mereka yang dapat mengakses internet, kebanyakan dari mereka adalah orang muda.

Pandangan politik yang berkaitan dengan Megawati menggambarkan pula pola politik generasi yang mewarnai panggung politik. Politik generasi di dalam hal ini merupakan kelanjutan seperti yang terjadi pada Megawati di mana orang tuanya adalah presiden dan kemudian dia juga terjun ke dunia politik. Pola seperti ini juga ada pada Prabowo dan pada tokoh politik lainnya yang mewarnai panggung politik Indonesia

Pandangan terhadap pemimpin dan pemimpin perempuan merupakan tema tentang pemimpin Indonesia yang diinginkan atau yang didambakan oleh para pemosting. Penjelasan tentang pemimpin perempuan memperlihatkan penggambaran gender yang sangat kental, di mana perempuan masih tidak dilihat sebagai pemimpin.

Facebookers yang tergabung dalam ‘*Say No To...*’ juga masih terperangkap dalam pandangan bahwa presiden Indonesia adalah Jawa. Kenyataan sejarah di mana presiden Indonesia hampir semua dari Jawa (hanya Presiden B.J. Habibie yang berasal dari luar Jawa) berpengaruh terhadap pandangan tersebut. Oleh karena itu, banyak *facebookers* yang belum bisa menerima kehadiran calon presiden dari luar Jawa. Kekurangmampuan menerima hal baru yaitu kehadiran calon presiden dari luar Jawa diekspresikan dalam bentuk pengembangan isu yang sifatnya rasis/syak wasangka etnis.

Soesilo Bambang Yudhoyono merupakan calon presiden yang paling sedikit mendapat kritikan dari *facebookers*. Posisinya sebagai *incumbent*, laki-laki dan berasal dari Jawa nampaknya cukup menguntungkan sebagai calon presiden.

Salah satu yang menarik untuk diperhatikan adalah masalah perpecahan dan kesatuan menjadi bagian yang penting di dalam politik. Menarik untuk melihat bahwa kesatuan dan perpecahan merupakan tema

yang muncul yang menjadi bagian dari hal yang kurang diperhatikan oleh para elit politik. Mereka yang berseteru di panggung politik seperti tidak menyadari masalah di dalam komunitas di Indonesia, seperti ada gap antara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan politik elit. Ketika mereka membahas sikap kepemimpinan Mega merupakan gambaran bahwa apa yang mereka *posting* merupakan reaksi terhadap tindakan politik, dalam hal ini kasusnya adalah masa kepresidenan Megawati.

Mereka juga menyadari tentang gerakan seperti ini, bahkan pada satu sisi para pemosting merasa terperanjat melihat antusiasme pemosting lainnya. Kenyataan ini memperlihatkan pengetahuan mereka tentang dunia maya yang awalnya digunakan untuk berjejaring sosial, pada akhirnya menjadi sebuah gerakan yang sangat menarik perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Axford, Barrie dan Huggins, Richard (ed). 2001. *New media and Politics*. London: Sage Publications.
- Anderson, Benedict R. O’G. 1990. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Barret, Boyd. 1995. “Conceptualizing Public Sphere”. Dalam Barret, Oliver Boyd dan Newbold Christ, *Approaches to Media, A Reader*. London: Arnold.
- Boehlert, Eric. 2009. *Bloggers on the Bus: How Internet Changed Politics and The Press*. New York: Free Press.
- Busyairi, Mufid A. 2009. *Swasembada Beras: Usaha Siapa?.* Koran *Tempo*, 25 Februari.
- Bijker, Wiebe E. 1987. *Social Konstruktion of Technological System New Directions in Sociology and History of Technology*. Cambridge: MIT Press.
- Crystal, David. 1987. *Clinical Linguistics a Phonetics*. UK Universtiy College of North Works.
- Cristal, David. 1987. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. Cambridge, England, Cambridge University.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, Norman. 2003. *Analysing Discourse*. London: Routledge.
- Farrel, David M. dan Beck-Rudiger Schmitt (ed). 2002. *Do Political Campaign Mater?: Campaign Effect in Elections and Referendum*. London: Routledge.

- Hall, Stuart. 1996. *Signification, Representation, Ideology, Althusser and the Post-Structuralist Debates* dalam *Cultural Studies and Communications*. London: Arnold.
- Hall, Stuart. 1979. *Culture, Media and the Ideological Effect* dalam *Mass Communication and Society*, Curran James et al (ed). Beverly Hills: Sage Publications.
- Jones, Jason. 1999. Language and Social Class. Dalam Linda Thomas dan Shan Wareing. *Language, Society and Power*. New York: Routledge.
- Iklan Swasembada Beras: Demokrat, Golkar dan PKS Menyalahi Aturan* (<http://www.berita8.com/news.php?cat=1&id=8893>, diakses 2 Maret 2009, 03:17 WIB).
- Khudori. 2009. *Kegagalan Memahami Hakikat Kemiskinan*. Koran *Tempo* 12 Agustus.
- Mills, Sara. 1997. *Discourse*. London: Roudledge.
- Patria, Nezar. 2010. *Tiga Layar Kerumunan Virtual*. Dalam Puthut EA. *Oposisi Maya*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Poster, Mark. 1997. *Cyberdemocracy: The Internet and the Public Sphere*. Dalam Holmes, David (ed): *Virtual Politics: Indentity & Community in Cyberspace*. London: Sage Publication.
- Prasetyawan, Wahyu. 2009. *Bantuan Tunai Langsung, Pro-Rakyat Miskin?*. Koran *Tempo* 2 April.
- Van Dijk, Teun A. 1999. *Discourse, Ethnicity, Culture, and Racism*. Dalam *Discourse as Social Interaction: Discourse Studies A Multidisciplinary Introduction*. Volume 2, Teun A. Van Dijk (ed.). London: Sage Publications.